



E-ISSN 2775-0922

JURNAL STUDI INOVASI

Vol. 1 No. 1 Januari 2021



Inovbook Publications



**Jurnal
Studi Inovasi**

<https://jurnal.studiinovasi.id>



PEMIMPIN REDAKSI

Wanda Tifani Arantika
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Airlangga
wandatifany@gmail.com

BAGIAN EDITOR

Wanda Tifani Arantika
wandatifany@gmail.com

Siti Muntamah
sitim080@gmail.com

GRAFIS

Ali Mujahidin

ASOSIASI EDITOR

Karina Idria Setyawati
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Airlangga

Devita Ramadhani
Kurniasari
Fakultas Teknologi Industri,
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember

Wahidah Mumtahanah
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Airlangga

Fauziah Putri Indi
Rahmawati
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas
Pembangunan Nasional
Veteran Surabaya

Amadea Fitri Syaharani
Fakultas Sains dan
Teknologi, Universitas
Airlangga

MITRA BESTARI

Leope Pinnega
Badan Kepegawaian dan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tulungagung

Farid Pribadi
Universitas Negeri Surabaya

Iman Iskandar
Badan Sumber Daya
Manusia Kementerian Dalam
Negeri

Heri Wahyudianto
Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi
Papua

Agustinus Hartopo
Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi
Papua

Tedi Gunawan
Ritsumeikan University

Adi Asmariadi Budi
Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung

Ambar Rosidhah Qoonitah
Badan Pengawas Pemilu

Adi Suhendra
Kementerian Dalam Negeri

Firdaus Sany Lewenussa
The University of Sheffield,
Inggris



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya kami dapat menerbitkan Jurnal Studi Inovasi (JSI) Volume 1 Nomor 1, Januari 2021.

Seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta sumberdaya manusia maka hasil-hasil penelitian maupun sanggahan ilmiah inovasi perlu dipublikasikan dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pembaca.

Dalam edisi ini disajikan 8 (delapan) makalah yang meliputi: (1) Inovasi Sistem Regu Tanam Padi Jajar Legowo Kabupaten Gresik, (2) Analisis Inovasi Perencanaan Sebagai Strategi Tata Kelola Yang Baik Di Berbagai Provinsi, (3) Analisis Inovasi Perencanaan Sebagai Strategi Tata Kelola Yang Baik Di Berbagai Provinsi, (4) Analisis Peningkatan Pelayanan Dengan Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Digital, (5) Inovasi Sistem Perizinan Primbon (Proses Ijin Mendirikan Bangunan Dengan Telepon), (6) Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Inovasi Perikanan, (7) Teknologi Dalam Perubahan Pelayanan Publik Perkotaan, (8) Pemberdayaan Masyarakat Inovatif Dalam Mendukung Kemajuan Daerah Perkotaan.

Terima kasih kami sampaikan kepada para peneliti dan para fungsional lain yang telah ikut berpartisipasi mengirimkan makalah untuk kelangsungan jurnal ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat diterbitkan..

Kami mengharapkan masukan saran dan kritik demi penyempurnaan terbitan selanjutnya, serta semoga kerjasama yang telah berjalan dapat ditingkatkan.

Jakarta, Januari 2021

Redaksi



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| Inovasi Sistem Regu Tanam Padi Jajar Legowo Kabupaten Gresik Slamet Hari Sutanto dan Adibah Sayyidati | 1-6 |
| Analisis Inovasi Dalam Upaya Mempermudah Capaian Kinerja Dan Data Potensi Kinerja Daerah Perkotaan (Studi Penelitian Pada Kota Bekasi Dan Kota Tangerang Selatan) Wendrian Fadli dan Muhammad Ro'uuf Fadhillah | 7-15 |
| Analisis Inovasi Perencanaan Sebagai Strategi Tata Kelola Yang Baik Di Berbagai Provinsi (Studi Penelitian Pada Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Dan Provinsi Sulawesi Selatan) Herman yaarozatulo Harefa | 16-21 |
| ANALISIS PENINGKATAN PELAYANAN DENGAN MEMANFAATKAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL (Studi Penelitian Inovasi Daerah Pada Kota Bekasi Dan Kota Jambi) Imansyah Abinda dan Firdaus Arnidiana | 22-27 |
| Inovasi Sistem Perizinan Primbon (Proses Ijin Mendirikan Bangunan Dengan Telepon) Dpmpstsp Kabupaten Semarang Dan Simba (Sistem Informasi Mendirikan Bangunan) Kabupaten Sragen Yusniah Anggraini | 28-34 |
| Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Inovasi Perikanan (Studi Penelitian Pada Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, Dan Kabupaten Banggai) Adi Suhendra | 35-43 |
| Teknologi Dalam Perubahan Pelayanan Publik Perkotaan (Studi Inovasi Daerah Di Kota Bekasi Dan Kabupaten Gresik) Muhammad Riksa Praba Haskara dan Ranty Purnamasari Inovasi | 44-51 |
| Pemberdayaan Masyarakat Inovatif Dalam Mendukung Kemajuan Daerah Perkotaan (Studi Penelitian Pada Kota Bontang, Kota Palembang, Dan Kota Makassar) Yulius Christian | 52-61 |



HALAMAN INTISARI

e-ISSN : 2775-0922

Date of Issue: Januari 2021

Halaman ini dapat direproduksi atau disalin tanpa izin dari editor dan penulis

Slamet Hari Sutanto dan Adibah Sayyidati (Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Jl. Gayung Kebonsari No.56, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235)

Inovasi Sistem Regu Tanam Padi Jajar Legowo Kabupaten Gresik

JURNAL STUDI INNOVASI, Januari 2021, vol 1, no 1, hal. 1-6, 3 g, 1 tab, 9 ref

Sedikitnya petani di kabupaten Gresik yang memahami tanam padi jajar legowo membuat ketahanan pangan khususnya padi di Gresik jauh dari kata aman, idealnya satu desa satu regu tanam, akan tetapi dari total 308 desa tim regu tanam di Gresik hanya 14 regu tanam dan yang memahami sistem tanam padi menghindari sistem ini dikarenakan kurangnya dana untuk membayar tenaga tanam, hal ini melatarbelakangi untuk dilakukan inovasi, hal ini membuat pemerintah daerah kabupaten Gresik untuk membuat sistem regu tanam padi jajar legowo tang efektif. Metode yang digunakan penelitian ini deskriptif dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dengan analisa kualitatif, hasil yang didapatkan setelah sistem regu tanam dari pemerintah daerah kabupaten Gresik berjalan, terlihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dan puncaknya pada tahun 2016 dengan stok beras surplus 146.743,12 ton.

(author)

Kata kunci: Sistem regu tanam, jajar legowo, Inovasi

Muhammad Ro'uuf Fadhilah dan Wendrian Fadli (Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, Jl. Jend. Ahmad Yani No.1, RT.001/RW.005, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bekasi, Jawa Barat 17144)

Analisis Inovasi Dalam Upaya Mempermudah Capaian Kinerja Dan Data Potensi Kinerja Daerah Perkotaan (Studi Penelitian Pada Kota Bekasi dan Kota Tangerang Selatan)

JURNAL STUDI INNOVASI, Januari 2021, vol 1, no 1, hal. 7-15, 1 g, 0 tab, 10 ref

Indonesia sejak tahun 2009 telah memiliki peraturan perundangan tersendiri sebagai sebuah standar bagi pelayanan kepada masyarakat, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah kota yang telah melakukan inovasi di daerahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kota Tangerang Selatan yang bertujuan untuk menganalisis inovasi dalam upaya mempermudah capaian kinerja dan data potensi kinerja.

(author)

Kata Kunci : Inovasi, Pelayanan Publik, Potensi Kinerja Daerah, Masyarakat, Perkotaan

Herman yaarozatulo Harefa (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No.132, RT.1/RW.9, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430)

Analisis Inovasi Perencanaan Sebagai Strategi Tata Kelola Yang Baik Di Berbagai Provinsi (Studi Penelitian Pada Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Dan Provinsi Sulawesi Selatan)

JURNAL STUDI INNOVASI, Januari 2021, vol 1, no 1, hal. 16-21, 0 g, 0 tab, 17 ref

Inovasi menjadi kalimat sakral dalam kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa, baik di level mikro ekonomi (korporasi) hingga level makro ekonomi (negara). Khusus tentang inovasi telah ada landasan hukumnya dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah bertajuk Inovasi Daerah, dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014. Inovasi yang dimaksud dalam Pasal 386 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

(author)

Kata Kunci : Inovasi, Perencanaan, Tata Kelola

Imansyah Abinda Firdaus (Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, Jl. Jend. Ahmad Yani No.1, RT.001/RW.005, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144)

Arnidiana (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, Jl. RM. Nur Atmadibrata No. 1, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361)

Strategi Kota Bekasi Dan Kota Jambi Dalam Pengembangan Inovasi Digital Dan Kreativitas Masyarakat

JURNAL STUDI INNOVASI, Januari 2021, vol 1, no 1, hal. 22-27, 0 g, 0 tab, 16 ref

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga sangat menguntungkan dibandingkan dengan cara-cara manual atau tradisional. Hal itu dibuktikan dengan semakin cepatnya masyarakat dalam mendapatkan informasi melalui berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang semakin baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam upaya memanfaatkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan efisiensi aktivitas yang dilakukan pada setiap Kota/Kabupaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif diharapkan mampu menggali data secara lebih mendalam sehingga dapat diidentifikasi sejumlah inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kota Jambi.

(author)

Kata Kunci : Inovasi, Teknologi Digital, Layanan Publik, Masyarakat, Informasi

Yusniah Anggraini (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Albantani No. 1 Curug, Kota Serang, Banten 42171)

Inovasi Sistem Perizinan Primbon (Proses Ijin Mendirikan Bangunan Dengan Telepon) Dpmptsp Kabupaten Semarang Dan Simba (Sistem Informasi Mendirikan Bangunan) Kabupaten Sragen

JURNAL STUDI INNOVASI, Januari 2021, vol 1, no 1, hal. 28-34, 2 gl, 0 tab, 10 ref

Lambatnya proses perizinan Izin Mendirikan Bangunan menjadi masalah pemerintah daerah, lambat ini memberikan dampak merugikan bagi masyarakat kota Semarang dan kabupaten Sragen dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Inovasi ini memberikan dampak positif kepada masyarakat yang menggunakannya, menjadi lebih cepat dalam proses perizinan bisa memangkas waktu jadi 7 hari dari sebelumnya sekitar 14-28 hari. Kesimpulan penelitian ini inovasi telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah kota semarang maupun kabupaten sragen.

(author)

Kata kunci: Sistem gu tanam, jajar legowo

Adi Suhendra (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No.132, RT.1/RW.9, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430)

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Inovasi Perikanan (Studi Penelitian pada Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Banggai)

JURNAL STUDI INNOVASI, Januari 2021, vol 1, no 1, hal. 35-43, 0 g, 0 tab, 15 ref

Sektor perikanan memiliki peran dan potensi sebagai penggerak utama perekonomian nasional Indonesia. Inovasi adalah kunci sukses untuk meningkatkan daya saing (Barney, 2002; MolinaCastillo dan Munuera-Aleman 2009; Shapiro, 2002; Rogers, 2003). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi daerah dalam bidang perikanan sebagai strategi untuk perubahan berkualitas yang dilakukan di tiga kabupaten, yaitu pada Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Banggai. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten yang telah melakukan inovasi di daerahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Banggai yang memiliki tujuan dalam bidang perikanan sebagai strategi untuk perubahan yang berkualitas.

(author)

Kata Kunci : Inovasi, Perikanan, Perkembangan, Strategi, Pemerintahan Daerah

Muhammad Riksa Praba Haskara dan Ranty Purnamasari (Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, Jl. Jend. Ahmad Yani



No.1, RT.001/RW.005, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144)

Inovasi Teknologi Dalam Perubahan Pelayanan Publik Perkotaan (Studi Inovasi Daerah di Kota Bekasi dan Kabupaten Gresik)

JURNAL STUDI INNOVASI, Januari 2021, vol 1, no 1, p.44-51, 2 g, 0 tab, 16 ref

Hasil dari adanya inovasi Layanan SIAP PPDB Online di Kota Bekasi, yaitu diantaranya Tanpa Instalasi & Berbasis Cloud, Multi Platform & Multi Akses, Responsive Design, Multi Model Alur Pendaftaran, Multi Jalur Seleksi, Real Time Process, sehingga dapat mengelola data calon siswa secara otomatis dan langsung setiap waktu mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil. Sedangkan, hasil dari adanya Aplikasi e-Planning di Kabupaten Gresik mempunyai tujuan untuk menerapkan perencanaan menggunakan teknologi informasi berbasis Web yang terintegrasi dan user friendly, menyelaraskan/mengintegrasikan perencanaan strategis jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan, memetakan usulan program dan kegiatan dari DPRD, Unsur Pimpinan dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, menyusun rencana kerja anggaran dengan cepat dan tepat.

(author)

Kata Kunci : Inovasi, Perkotaan, Ide Kreatif, Pemerintah, Teknologi

Yulius Christian (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No.132, RT.1/RW.9, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430)

Pemberdayaan Masyarakat Inovatif Dalam Mendukung Kemajuan Daerah Perkotaan (Studi Penelitian pada Kota Bontang, Kota Palembang, dan Kota Makassar)

JURNAL STUDI INNOVASI, Januari 2021, vol 1, no 1, hal. 52-61, 0 g, 0 tab, 19 ref

Perkembangan dunia dewasa ini telah berjaan begitu cepat, teknologi telah membuat batasan antar informasi dan kebutuhan manusia semakin dekat. Kecepatan dan ketepatan ini juga dibutuhkan dalam proses interaksi pemerintah dan warga Negara, namun sayangnya mobilitas warga Negara yang tinggi tidak diimbangi dengan ketepatan dan juga kecepatan pemerintah dalam hal pelayanan khususnya pelayanan kepada publik. Populasi dalam penelitian ini adalah kota yang telah melakukan inovasi di daerahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kota Bontang, Kota Palembang, dan Kota Makassar yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar berperan aktif dalam membantu mewujudkan kemajuan daerahnya.

(author)

Kata Kunci : Inovasi, Kemajuan Perkotaan, Masyarakat, Pemerintah, Ciri Khas



Korespondensi

Email¹ : slametharisutanto@gmail.com
Email² : adibah_sayyidati@yahoo.com



Inovbook Publications
Wisma Monex 9th Floor
Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

INOVASI SISTEM REGU TANAM PADI JAJAR LEGOWO KABUPATEN GRESIK

Slamet Hari Sutanto^{1*}, Adibah Syidati^{2*}

^{1,2} Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur | Jl.
Gayung Kebonsari No.56, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa
Timur 60235

Disetujui: 30 Januari 2021

Abstract

The few farmers in Gresik district who understand the planting of legowo row rice make food security, especially rice in Gresik far from safe, ideally one village is one planting team, but out of a total of 308 villages, the planting team in Gresik is only 14 planting teams and those who understand the rice planting system avoiding this system due to lack of funds to pay for planting labor, this is the background for innovation, this makes the Gresik district government to make a system of effective legowo row rice planting squads. The method used in this research is descriptive by conducting interviews with several informants with qualitative analysis, the results obtained after the planting team system of the Gresik district government runs, it appears that there is an increase from year to year and the peak in 2016 with a surplus of 146,743.12 tons.

Keywords: *Planting squad system, Row legowo, Innovation*

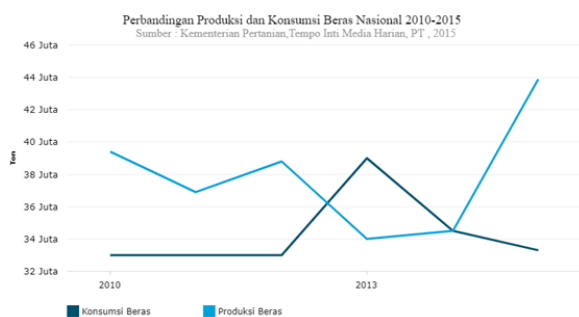
Abstrak

Sedikitnya petani di kabupaten Gresik yang memahami tanam padi jajar legowo membuat ketahanan pangan khususnya padi di Gresik jauh dari kata aman, idealnya satu desa satu regu tanam, akan tetapi dari total 308 desa tim regu tanam di Gresik hanya 14 regu tanam dan yang memahami sistem tanam padi menghindari sistem ini dikarenakan kurangnya dana untuk membayar tenaga tanam, hal ini melatarbelakangi untuk dilakukan inovasi, hal ini membuat pemerintah daerah kabupaten Gresik untuk membuat sistem regu tanam padi jajar legowo yang efektif. Metode yang digunakan penelitian ini deskriptif dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dengan analisa kualitatif, hasil yang didapatkan setelah sistem regu tanam dari pemerintah daerah kabupaten Gresik berjalan, terlihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dan puncaknya pada tahun 2016 dengan stok beras surplus 146.743,12 ton.

Kata Kunci: Sistem regu tanam, jajar legowo, Inovasi

I. PENDAHULUAN

Di era modern ini petani semakin bertambahnya jumlah manusia, terutama juma populasi di Indonesia membuat petani diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan semakin banyak. Bertambahnya manusia membuat semakin banyaknya kebutuhan pangan yang dibutuhkan. Hal ini membuat pemerintah untuk melakukan import pangan khususnya beras untuk menjaga stabilitas pangan. Hal ini mendorong pemerintah untuk memeberi misi kepada para petani perlu melakukan inovasi agar dapat mendapatkan hasil panen lebih banyak dan kualitas beras yang bagus.



Gambar 1. Perbandingan Konsumsi dan Produksi Beras tahun 2011-2015
(Sumber: Kementerian Pertanian, Tempo Inti Media Harian PT, 2015)

Irawan (2003) melaporkan bahwa selama 1978-1998 sekitar 1,07 juta ha lahan (30,8%) telah terkonversi menjadi lahan non pertanian. Selama periode yang sama, terdapat pembukaan sawah baru sekitar 0,91 juta ha. Namun, sejak krisis ekonomi yang berkepanjangan, pembukaan sawah baru hampir tidak mungkin karena keterbatasan dana pembangunan. Dengan demikian, adalah sangat sulit mempertahankan luas areal tanam padi di Jawa. Di lain pihak, sekitar 48% padi ditanam di Jawa, mempunyai kontribusi produksi sekitar 58% dari produksi padi nasional. Ini berarti bahwa konversi lahan di Jawa akan berpengaruh buruk terhadap produksi beras nasional dan dengan sendirinya memperlemah ketahanan pangan (Sudaryanto et al., 2006).

(Hendayana and Saliem, 1998) menyatakan keputusan petani untuk mengadopsi suatu teknologi terutama ditentukan oleh faktor internal yang meliputi sikap dan tujuannya dalam melakukan usahatani. Sikap petani dalam hal ini sangat

tergantung dari karakteristik petani itu sendiri yaitu, umur petani, pendidikan formal, jumlah anggota keluarga, dan penguasaan lahan usahatani, sedangkan tujuan petani dalam melakukan usahatani pertimbangannya selain meningkatkan pendapatan, ada juga yang hanya sekedar mencukupi kebutuhannya atau sub sistem.

(Hariyanto and Herwinarni, 2015) menyebutkan rendahnya penerapan suatu teknologi dapat disebabkan oleh (a) belum sampainya teknologi tersebut kepada petani; (b) teknologi tidak sesuai kebutuhan petani; (c) teknologi belum dipahami atau diyakini petani; (d) petani kesulitan mendapatkan produksi yang dianjurkan; serta (e) kemampuan petani yang sangat terbatas. Faktor lainnya adalah mengubah kebiasaan petani. Hal ini tidak mudah, jika penerapan inovasi tersebut mempunyai risiko besar. Makin kecil skala usaha semakin takut dengan risiko yang dihadapi. Keputusan petani dalam menerapkan teknologi menurut (Indraningsih, 2011) merupakan proses mental sejak pertama kali mengetahui suatu inovasi, membentuk sikap terhadap inovasi tersebut, mengambil keputusan untuk mengadopsi atau

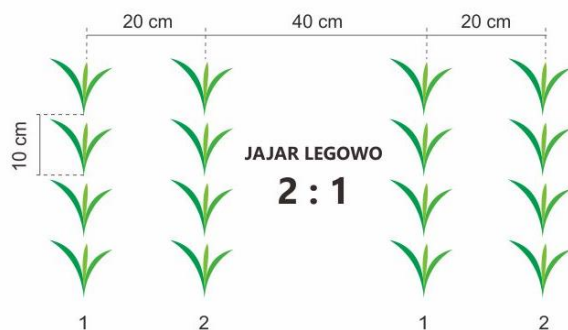
menolak, mengimplementasikan ide baru, dan membuat konfirmasi atas keputusan tersebut. Proses ini terdiri atas rangkaian pilihan dan tindakan individu dari waktu ke waktu atau suatu sistem evaluasi ide baru dan memutuskan mempraktekkan inovasi atau menolaknya.

Upaya peningkatan produksi padi nasional untuk mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 dan swasembada berkelanjutan memerlukan teknik budi daya yang lebih baik. Cara budi daya padi yang disorot dan diangkat sebagai salah satu terobosan dalam peningkatan produktivitas padi adalah sistem tanam padi jajar legowo. Sistem tanam padi jajar legowo memiliki jumlah rumpun per satuan luas lebih banyak dibandingkan cara tanam tegel yang setara, misalnya tanam tegel 20 cm x 20 cm memiliki populasi 250.000 rumpun per ha, sedangkan legowo 2:1 yang setara dengan 10 cm x 20 cm x 40 cm memiliki populasi 360.000 rumpun. Orientasi pertanaman jajar legowo meskipun pada populasi yang sama berpeluang menghasilkan gabah yang lebih tinggi karena lebih banyaknya fotosintesis yang terjadi, karena lebih efektifnya pertanaman menangkap radiasi

surya dan dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan. Pola tanam legowo menurut Bahasa Jawa berasal dari kata “Lego” yang berarti luas dan “dowo” atau panjang.

Inovasi pada teknologi pertanian diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, hal ini terbukti yang sudah berhasil adalah sistem tanam padi jajar legowo dimana penerapannya dibutuhkan tenaga tanam yang terampil dan terlatih. Untuk lebih terkoordinir diharapkan tenaga tanam tersebut dibentuk dalam “Regu Tanam padi jajar legowo”. Yang mana regu tanam jajar legowo ini dapat memaksimalkan dalam pengerjaan.

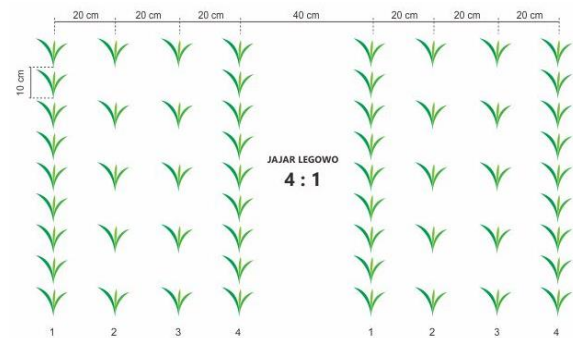
Pada prinsipnya sistem tanam padi jajar legowo adalah meningkatkan populasi dengan cara mengatur jarak tanam. Sistem tanam ini juga memanipulasi tata letak tanaman, sehingga rumpun tanaman sebagian besar menjadi tanaman pinggir. Tanaman padi yang berada di pinggir akan mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak, sehingga menghasilkan gabah lebih tinggi dengan kualitas yang lebih baik



Gambar 1. Sistem tanam padi jajar legowo 2:1
(sumber: <https://unsurtani.com/2019/01/tingkatkan-produktivitas-padi-dengan-sistem-tanam-jajar-legowo>)

Pada cara tanam legowo 2:1, setiap dua baris tanaman diselingi satu barisan kosong dengan lebar dua kali jarak barisan, namun jarak tanam dalam barisan dipersempit menjadi setengah jarak tanam aslinya. Pengaturan sistem tanam ternyata menentukan kuantitas dan kualitas rumpun tanaman padi, yang kemudian bersama populasi/jumlah rumpun tanaman per satuan luas berpengaruh terhadap hasil tanaman. Populasi yang lebih tinggi pada sistem tanam padi jajar legowo memberi peluang untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Keragaman varietas pada jarak tanam lebar (40cm x 40cm) berbeda dibandingkan dengan jarak tanam

rapat terutama pada jumlah malai. Penerapan sistem tanam padi jajar legowo yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat hampir dapat dipastikan akan meningkatkan produktivitas tanaman padi dan keuntungan bagi petani, sedangkan perluasannya secara nasional dapat meningkatkan produksi padi.



Gambar 2. Sistem tanam padi jajar legowo 2:1
(sumber: <https://unsurtani.com/2019/01/tingkatkan-produktivitas-padi-dengan-sistem-tanam-jajar-legowo>)

Akan tetapi untuk menerapkan sistem tanam padi jajar legowo di kabupaten Gresik memiliki beberapa kekurangan, kekurangan tersebut meliputi kurangnya jumlah tenaga tanam padi jajar legowo yang terampil, hal ini idealnya dalam satu desa seharusnya ada satu regu tanam padi jajar legowo, akan tetapi di kabupaten Gresik itu sendiri hanya memiliki 14 regu tanam (225 tenaga tanam) tanam yang tersebar di 9 Kecamatan termasuk didalamnya Kecamatan Dukun dan Kecamatan Balongpanggang. Jumlah tersebut sangat sedikit sehingga luas lahan sawah yang ditanami dengan sistem Jajar Legowo (Jarwo) juga sedikit. Di sisi lain penanaman sistem tanam jajar legowo tergantung dengan pihak lain (regu tanam), sehingga hal ini membuka peluang pekerjaan bagi buruh tani untuk membentuk regu tanam. Dengan adanya latar belakang ini perlu dilakukan inovasi yang bisa menyelesaikan minimnya jumlah tenaga tanam, kedua optimasi sistem tanam padi jajar legowo kurang hal ini dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tenaga tanam yang terampil, sehingga banyak petani di kabupaten Gresik yang kurang suka dengan sistem ini.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif.

Metode diskriptif adalah suatu cara untuk mendeskripsikan tentang bagaimana inovasi yang digunakan dengan melakukan wawancara terhadap berbagai pihak yang memiliki kepentingan untuk membuat regu tanam jajar padi legowo ini berhasil dan sukses, beberapa narasumber yang di wawancara, petani tunggal kabupaten Gresik, regu tanam padi jajar legowo dari kabupaten Gresik, dinas pertanian kabupaten Gresik, bupati Gresik, mahasiswa pertanian yang tinggal di kabupaten Gresik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi Sistem Tanam Padi Jajar Legowo

Hasil dari data deskriptif dalam penelitian dengan beberapa narasumber didapatkan hasil sistem perhitungan yang dilakukan oleh kedinasan pertanian, pemerintah kabupaten Gresik dan mahasiswa pertanian kabupaten Gresik perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan tanam konvensional dan Jajar legowo

| Keterangan | Konvensional | Jajar Legowo 2:1 | Jajar Legowo 4:1 |
|-----------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Jarak Tanam | 25cm x 25 cm | 10cm x 20 cm x 40 cm | 20:10:40 |
| M ² dalam rumpun | 16 rumpun | 33 rumpun | 30 rumpun |
| Ha dalam rumpun | 160.000 rumpun | 330.000 rumpun | 300.000 rumpun |

Dari tabel diatas terlihat jelas tanam jajar legowo lebih menguntungkan daripada tanam secara konvensional. Berdasarkan analisa tersebut diatas Bupati Gresik melalui Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2015 tanggal 11 Pebruari 2015 menginstruksikan kepada Seluruh Petani/ Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani agar Menerapkan Sistem Tanam Jajar Legowo 2 : 1 pada Budidaya Padi di Wilayah Kabupaten Gresik. Serta Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2015 tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Pendampingan dan Penyuluhan Petani oleh Petugas Dinas Pertanian dalam Penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo (pemkab, Gresik).

Untuk merealisasikan Instruksi Bupati tersebut, ternyata tidak mudah karena 80% lahan pertanian di Kabupaten Gresik merupakan sawah tadah hujan. Hal tersebut menyebabkan para petani melakukan tanam serempak begitu musim hujan tiba. Akibatnya tenaga tanam yang ada tidak mencukupi, oleh karena itu dibutuhkan buruh tanam dari luar Kabupaten Gresik. Namun demikian buruh

tanam dari luar tersebut tidak ahli dan tidak mau melakukan tanam jajar legowo karena dianggap rumit dan membutuhkan waktu yang lama.

B. Analisa Finansial

1. Suatu teknologi akan diterapkan secara berkelanjutan jika secara ekonomi teknologi tersebut memberikan insentif yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi lama. Hasil survei menunjukkan bahwa cara tanam padi yang diterapkan responden bervariasi mulai dari sistem
2. tanam pindah dan tabel baik dengan model legowo maupun model konvensional serta terdapat juga petani yang menggunakan sistem tanam hambur benih langsung. Lebih lanjut dapat dilihat penerapan teknologi cara tanam legowo baik dengan sistem tanam pindah maupun dengan sistem tabel memberikan keuntungan yang lebih baik. Hal tersebut sesuai hasil penelitian (Abidin, Bananiek and Raharjo, 2013) bahwa keuntungan cara tanam legowo lebih baik dibandingkan dengan cara tanam biasa. Hal ini karena produksi yang dihasilkan lebih tinggi, yang diakibatkan oleh adanya berbagai pengaruh positif dari perubahan cara tanam maupun faktor agronomis lainnya misalnya efek pinggir dari cara legowo yang memberikan kemampuan tanaman untuk berfotosintesis yang lebih baik (Mohaddesi et al., 2011).
3. Pada tahun 2015 sistem tanam untuk menanam padi sebesar 11.510 Ha, akan tetapi semenjak adanya program sistem regu tanam luasnya menjadi 16.609 Ha, hal ini menandakan bahwa ada selisih penambahan sekitar 16.609-11.510 sebesar 5.099 ha jika di hitung untuk mengetahui berapa produktivitas dengan sistem regu tanam jajar legowo di 5099x33x10000x25 sebesar 42.066,75 ton.

C. Persepsi Petani Terhadap Sistem Regu Tanam Padi Jajar Legowo

Hasil analisis persepsi terhadap sistem tanam jajar legowo dengan melakukan wawancara dengan 20 narasumber berupa petani dari kabupaten Gresik, terlihat bahwa 80% dari total keseluruhan narasumber ketika di wawancarai setuju dengan diadakannya sistem regu tanam padi jajar legowo, hal ini

dikarenakan dengan sistem regu tanam padi jajar legowo membantu para petani di kabupaten Gresik untuk berhemat biaya, karena nanti sistem nya bagi hasil ke tenaga lain, sehingga mengurangi biaya upah untuk pembayaran tenaga tanam, yang kedua sekitar 90% dari petani yang menjadi narasumber merasakan meningkatnya produktivitas hasil tani, dikarenakan sistem tanam padi jajar legowo memberikan peningkatan produktivitas dua kali lipat lebih, hal ini dikarenakan sistem tanam padi jajar legowo memaksimalkan lahan, yang ketiga menurut petani memberikan edukasi kepada tenaga tanam yang baru tau mekanisme regu tanam padi jajar legowo, hal ini dapat membentuk tambahan regu yang lain sehingga dapat mewujudkan satu desa satu tim regu tanam. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa petani mayoritas setuju dengan sistem tanam regu padi jajar legowo dari manfaat yang di dapatkan pada petani. Dari semua persentase atas persetujuan petani dalam menerapkan sistem tani regu tanam pad jaajr legowo, dapat membentuk persepsi petani tentang sistem regu tanam padi jajar legowo, persepsi ini tentunya terbangun dari sikap, mental, pendidikan, edukasi, informasi dan pengalaman dalam menjalankan usaha pertanian terutama di persawahan untuk menanam padi.

D. Strategi Pemerintah Daerah Agar Regu Tanam Padi Jajar Legowo Diterapkan

Pertama pemerintah daerah melakukan penyuluhan ke tiap-tiap desa khususnya ke petani-petani untuk memberikan edukasi bahwa sistem regu tanam padi Jajar Legowo dapat meningkatkan produksi padi.

Kedua bupati Gresik membuat terobosan dengan jalan membentuk Regu Tanam Padi Jajar Legowo (Rutan Pajale) dari Kabupaten Gresik sendiri yang dikukuhkan pada tanggal 3 Juni 2015 sebanyak 14 regu (255 tenaga tanam) yang berkembang menjadi 26 regu (437 tenaga tanam) (pemkab. Gresik). Penambahan Regu Tanam Padi Jajar Legowo sesuai dengan intruksi presiden untuk mewujudkan negara Indonesia yang swasembada pangan demi meningkatkan produksi beras untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Dengan terbentuknya regu-regu tersebut penanganan sistem tanam jajar legowo di Kabupaten Gresik semakin luas dan produksinya meningkat sehingga pada Tahun 2016 terjadi surplus beras sebesar 42.066,75 ton.

E. Keuntungan Penggunaan Sistem Regu Tanam Padi Jajar Legowo

Dengan adanya sistem regu tanam padi jajar legowo terdapat beberapa keuntungan :

Pertama, memperbanyak tanaman pinggir barisan supaya semakin banyak sinar matahari , maka proses fotosintesis daun semakin tinggi sehingga akan mendapatkan buah yang lebih berat. Seperti yang dibahas pada jurnal (M.Assad, Sri B, Warda S, dan Zainal A.) bagian tepi adalah bagian yang krusial karena mendapatkan sinar matahari secara langsung sehingga dapat menghasilkan produksi yang maksimal.

Kedua, lahan relative terbuka dapat Menekan serangan hama tikus, kelembaban akan semakin berkurang sehingga penyakit semakin berkurang; hal ini melupakan cara untuk menghindari gagal panen dari hama sekitar yang merusak tanaman.

Ketiga, Mempermudah pelaksanaan pemupukan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), dengan sistem regu tanam jajar legowo ini dapat dikendalikan dengan tenaga yang sudah dibentuk. Hal ini memperbesar petani untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal.

Keempat, Menambah populasi tanam, pada sistem tanam jajar legowo 2:1 bertambah \pm 30 sampai 40%, dengan bertambahnya populasi tanam akan memberikan peningkatan produksi. Pelaksanaan sistem tanam padi jajar legowo di Kabupaten Gresik semakin luas, 2016 = 16.609 Ha 2015 = 11.510 Ha (pemda kab. Gresik). Seperti yang dibahas pada jurnal (M.Assad, Sri B, Warda S, dan Zainal A.), bahwa dengan melakukan tanam regu jajar legowo memperluas area yang bisa ditanami dengan padi secara maksimal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem regu tanam padi jajar legowo dapat membantu meningkatkan produksi hasil padi, dengan metode 2:1 tanam padi jajar legowo dapat memberikan

keuntungan yang maksimal daripada metode 4:1 ataupun metode tanam konvensional ketika musim panen, pada sistem regu tanam padi jajar legowo di kabupaten gresik. Pemerintah daerah juga mendukung untuk menambah regu tanam padi di kabupaten gresik dengan membuat peraturan daerah dari Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2015 tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Pendampingan dan Penyuluhan Petani oleh Petugas Dinas Pertanian dalam Penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo (pemkab, Gresik). Sehingga tercapainya produksinya meningkat sehingga pada Tahun 2016 terjadi surplus beras sebesar 42.066,75 ton.

Saran untuk pemerintah daerah agar selalu menambah tim tanam regu tiap tahun, sehingga dapat tercapai program satu desa satu regu tanam padi jajar legowo, serta saran untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti memperdalam ke kabupaten yang menjadi prioritas sebagai lumbung padi di Indonesia sejauh mana kabupaten tersebut dapat menerapkan sistem tanam regu jajar legowo sehingga kabupaten tersebut bisa mempercepat langkah pemerintah untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara swasembada

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan penulis kepada petani di kabupaten gresik, regu tanam petani di kabupaten gresik, pemerintah daerah dinas pertanian kabupaten gresik, bupati gresik, mahasiswa pertanian gresik, sebagai narasumber dan atas kesempatannya sehingga penelitian karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Kementrian pertanian atas data yang diberikan dapat mendukung penelitian ini. Dan semua pihak yang terlibat tidak dapat disebutkan satu persatu.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Bananiek, S. and Raharjo, D. (2013) 'Analisis ekonomi sistem tanam padi sawah di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara', *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 16(1), pp. 56-64.
- Hariyanto, W. and Herwinarni, E. M. (2015) 'Analisis intervensi teknologi umur bibit, jajar Legowo, dan pemupukan urea

- terhadap produksi padi', *Informatika Pertanian*, 24(1), pp. 9-16.
- Hendayana, R. and Saliem, H. P. (1998) 'Determinan adopsi sistem tanam benih langsung (TABELA) dalam pengkajian SUTPA: kasus SUTPA di Propinsi Jawa Timur dan Lampung', *Jurnal Agro Ekonomi*, 9(1 dan 2), pp. 61-75.
- Indraningsih, K. S. (2011) 'Pengaruh penyuluhan terhadap keputusan petani dalam adopsi inovasi teknologi usahatani terpadu', *Jurnal Agro Ekonomi*, 20(1), pp. 1-24.
- Irawan. B. (2003). *Konversi lahan sawah di Jawa dan dampaknya terhadap produksi padi (Land conversion in Java and its impact on rice production)*.
- Sudaryanto, T., D. K. S Swastika, B. Sayaka, and S. Bahri. (2006). *Financial and economic. Pemerintah Daerah Kab. Gresik (2009) PTT Padi Sawah. Gresik, Indonesia: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.*
- Muh. Asaad, Sri Bananiek S, Warda dan Zainal Abidin, (2017) "Analisis Persepsi Petani Terhadap Penerapan Tanam Jajar Legowo Padi Sawah Di Sulawesi Tenggara", *Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara*



***Korespondensi**

Email¹ : wendrianfadli@gmail.com

Email² : rouffadhillah@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

ANALISIS INOVASI DALAM UPAYA MEMPERMUDAH CAPAIAN KINERJA DAN DATA POTENSI KINERJA DAERAH PERKOTAAN (Studi Penelitian pada Kota Bekasi dan Kota Tangerang Selatan)

Wendrian Fadli^{1*}, Muhammad Ro'uuf Fadhillah^{2*}

^{1,2} Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi | Jl. Jend. Ahmad Yani No.1,
RT.001/RW.005, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat
17144

Disetujui: 30 Januari 2021

Abstract

Since 2009, Indonesia has had its own laws and regulations as a standard for services to the community, so on July 18 2009 Indonesia passed Law No. 25 of 2009 on Public Services. This research uses a descriptive qualitative method that describes an objective state or certain event based on visible facts or as it should be, which is then accompanied by general conclusions based on these historical facts. The population in this study are cities that have made innovations in their regions, while the samples in this study are innovations made by Bekasi City and South Tangerang City which aim to analyze innovation in an effort to facilitate performance achievement and performance potential data. The results of this study are proven that as an important actor, the Regional Government according to its authority is expected to be able to produce appropriate decisions and actions to solve problems and meet the needs of the people in their regions. In line with this, we realize that serious efforts are needed to raise the quality of local government decisions and actions to be more effective and efficient through innovative breakthroughs. The results of E-Sipeng Kesbangpol's Innovation (Information Technology-Based Activity Implementation Control System and Performance Achievement of KESBANGPOL Agency) in Bekasi City in the short term, one of which is the formation of an effective team. Meanwhile, the innovation results that can be felt with the SIMPUS Innovation (Puskesmas Management Information System) in South Tangerang City, one of which is work effectiveness: Accelerating the process of health services to the community (eg registration from 7 minutes manually to 1 minute).

Keywords: Innovation, Public Service, Regional Performance Potential, Community, Urban

Abstrak

Indonesia sejak tahun 2009 telah memiliki peraturan perundangan tersendiri sebagai sebuah standar bagi pelayanan kepada masyarakat, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah kota yang telah melakukan inovasi di daerahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi

yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kota Tangerang Selatan yang bertujuan untuk menganalisis inovasi dalam upaya mempermudah capaian kinerja dan data potensi kinerja. Hasil dari penelitian ini adalah terbukti bahwa sebagai salah satu aktor penting, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang dimilikinya diharapkan mampu menghasilkan keputusan dan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Sejalan dengan hal tersebut, kita menyadari bahwa dibutuhkan upaya yang serius untuk mengangkat kualitas keputusan dan tindakan Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien melalui terobosan-terobosan inovatif. Hasil Inovasi E-Sipeng Kesbangpol (Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dan Capaian Kinerja Berbasis Teknologi Informasi Badan KESBANGPOL) pada Kota Bekasi dalam jangka pendek, salah satunya yaitu terbentuknya tim efektif. Sedangkan, hasil inovasi yang dapat dirasakan dengan adanya Inovasi SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) pada Kota Tangerang Selatan salah satunya yaitu efektivitas kerja: Mempercepat proses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat (mis: pendaftaran dari 7 menit secara manual 1 menit).

Kata Kunci : Inovasi, Pelayanan Publik, Potensi Kinerja Daerah, Masyarakat, Perkotaan

I. PENDAHULUAN

Salah satu tuntutan dalam Reformasi 1998 adalah reformasi di bidang birokrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi harapan baru masyarakat bagi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bebas dari KKN dan dapat memberikan pelayanan secara tepat, cepat, efektif, efisien dan konsisten sebagai perwujudan dari birokrasi yang baik dan akuntabel. Peningkatan pelayanan publik menjadi concern atau perhatian utama dalam reformasi birokrasi karena pelayanan publik menjadi pusat dari setiap aktifitas dimana semua komponen dalam lembaga pemerintahan baik kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur diarahkan. Selain itu kepuasan atas pelayanan publik menjadi indikator yang kuat dalam mengukur kinerja birokrasi. (Setianto, 2016: 152) Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir di negara-negara demokrasi telah

terjadi inovasi pelebagaan yang cukup radikal terkait perlibatan publik dalam pengambilan keputusan politik pemerintah termasuk birokrasi. (McNulty, 2012)

Indonesia sejak tahun 2009 telah memiliki peraturan perundangan tersendiri sebagai sebuah standar bagi pelayanan kepada masyarakat, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut UU tersebut, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (Kurniawan, 2017: 571)

Sebagai salah satu aktor penting, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang dimilikinya diharapkan mampu menghasilkan keputusan dan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Sejalan dengan hal tersebut, kita menyadari bahwa dibutuhkan upaya yang serius untuk mengangkat kualitas keputusan dan tindakan Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien melalui terobosan-terobosan inovatif. Secara lebih tegas dapat dinyatakan bahwa inovasi dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas keputusan dan tindakan yang dihasilkannya agar dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. (Wicaksono, 2019: 197) Dimana, masyarakat menjadi salah satu aktor penentu keberhasilan dari suatu kebijakan. (Hadi et al., 2020: 6)

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Inovasi juga merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya. (Hutagalung & Hermawan, 2018: 33,36) Konsepsi inovasi mengajarkan bahwa ekosistem inovasi penting untuk mendukung inovasi. (Andhika, 2018: 212)

Inovasi pemerintah merupakan suatu ide/gagasan/metode ataupun peralatan yang digunakan pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Inovasi dalam pemerintahan merupakan sebuah ide kreatif dalam melakukan pembaharuan dalam sistem pemerintahan guna meningkatkan kinerja pemerintahan itu sendiri. (Rozikin et al., 2020: 9) Secara umum inovasi seringkali diterjemahkan sebagai penemuan baru. Namun sebenarnya aspek “kebaruan” dalam inovasi sangat ditekankan untuk inovasi di sektor swasta atau disektor industri. (Anggraeny, 2013: 88) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada pemerintah lokal dapat meningkatkan fungsi dan manajemen kota. (Gumilar, 2019: 19)

Seperti halnya inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi yang bernama Inovasi E-Sipeng Kesbangpol (Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dan Capaian Kinerja Berbasis Teknologi Informasi Badan KESBANGPOL), dimana dengan adanya inovasi ini terdapat tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, yaitu diantaranya tercapainya sasaran strategis Badan Kesbangpol Kota Bekasi yaitu terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang berwawasan kebangsaan dan terselesaikannya masalah kerawanan sosial di Kota Bekasi, serta tersedianya dokumen perencanaan yang berbasis data capaian kinerja dan data potensi kinerja.

Selain itu, terdapat juga Inovasi SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) pada Kota Tangerang Selatan, dimana inovasi ini merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi dalam upaya mempermudah capaian kinerja dan data potensi kinerja, yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kota Tangerang Selatan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang,

dan tidak dapat diukur dengan angka. Teknik Pengambilan data yang dilakukan dengan studi pustaka yaitu mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah kota yang telah melakukan inovasi di daerahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kota Tangerang Selatan yang bertujuan untuk menganalisis inovasi dalam upaya mempermudah capaian kinerja dan data potensi kinerja.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi E-Sipeng Kesbangpol (Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dan Capaian Kinerja Berbasis Teknologi Informasi Badan KESBANGPOL) pada Kota Bekasi

Inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi ini dilatar belakangi oleh adanya optimalisasi pengendalian pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam sinkronisasi pengelolaan ketersediaan data laporan (Hutagalung & Hermawan, 2018) dan Analisis kerawanan sosial di wilayah sesuai kebutuhan kebijakan Kepala Daerah dan kebutuhan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat. (Pemenuhan konsekuensi logis terkait dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang).

Terdapat tiga jenis tujuan yang ingin dicapai oleh Kota Bekasi dengan adanya program inovasi E-Sipeng Kesbangpol, diantaranya yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yang ingin dicapai yaitu diantaranya, tersedianya sistem pengendalian

kegiatan dan capaian kinerja pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang dapat mendukung proses monitoring dan evaluasi (monev) kinerja di Badan Kesbangpol Kota Bekasi, tertatanya penyusunan dokumen perencanaan pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi sehingga bisa memenuhi kaidah SMART, serta tersedianya Database kinerja bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat digunakan sebagai dasar pimpinan dalam merumuskan suatu kebijakan Badan. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kota Bekasi, diantaranya yaitu target-target kinerja pembangunan yang diberikan Kepala Daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai, Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap capaian- capaian kinerja strategis Badan yang terdapat di Renstra Badan, serta dari hasil pengendalian dan evaluasi tersebut kemudian dapat dilakukan proses penyesuaian (revisi) terkait target - target capaian kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan RKT). Lalu, terdapat tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, yaitu diantaranya tercapainya sasaran strategis Badan Kesbangpol Kota Bekasi yaitu terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang berwawasan kebangsaan dan terselesaikannya masalah kerawanan sosial di Kota Bekasi, serta tersedianya dokumen perencanaan yang berbasis data capaian kinerja dan data potensi kinerja.

Manfaat yang akan diperoleh dengan adanya inovasi yang dilakukan di Kota Bekasi terbagi kedalam dua jenis, yaitu manfaat internal dan manfaat eksternal. Manfaat internal yang dirasakan dari adanya inovasi ini adalah meningkatnya kualitas pengendalian dan pengukuran capaian kinerja yang dilakukan di Badan Kesbangpol Kota Bekasi, meningkatnya kualitas dari proses penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen laporan capaian kinerja di Badan Kesbangpol Kota Bekasi, dan meningkatnya kualitas data capaian kinerja pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Sedangkan, manfaat eksternal yang dirasakan dari terwujudnya inovasi ini yaitu diantaranya memudahkan stakeholder di dalam merumuskan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan juga memudahkan untuk mencapai target RPJMD

Kota Bekasi yang diamanahkan kepada Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

Hasil Inovasi E-Sipeng Kesbangpol (Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dan Capaian Kinerja Berbasis Teknologi Informasi Badan KESBANGPOL) pada Kota Bekasi dalam jangka pendek diantaranya terbentuknya tim efektif, tersedianya sistem pengendalian pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi, tersusunnya Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tentang SOP Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian Kinerja pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi, dan tersosialisasikannya SOP Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian Kinerja pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Lalu, hasil inovasi yang dapat dirasakan dalam jangka menengah, diantaranya yaitu terlaksananya Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian Kinerja pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi, dan juga terkendalinya penyusunan laporan pengendalian Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Selain dari adanya hasil inovasi jangka pendek dan jangka menengah, terdapat pula hasil inovasi yang dapat dirasakan dalam waktu jangka panjang yaitu tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan berbasis data capaian kinerja.

B. Inovasi SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) pada Kota Tangerang Selatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional, karena kesehatan sangat terkait dalam konotasi di pengaruhi dan dapat juga mempengaruhi aspek demografi atau kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk pendidikan serta keadaan dan perkembangan lingkungan fisik maupun biologik.

Salah satu kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan dan usaha mencapai tujuan pembangunan kesehatan adalah informasi yang valid dan akurat. Oleh karena itu pembangunan system informasi, khususnya di bidang kesehatan dewasa ini perlu semakin dimantapkan dan dikembangkan. Hal ini mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan dan pengembangan upaya - upaya

kehatan demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

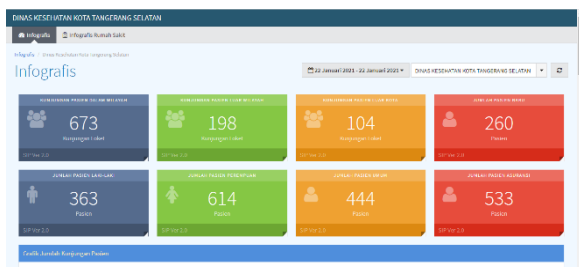
Perubahan pelayanan di bidang Kesehatan yang ditandai dengan adanya perdagangan bebas mengharuskan sektor kesehatan untuk meningkatkan daya saing dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sistem Informasi Manajemen saat ini merupakan sumber daya utama, yang mempunyai nilai strategis dan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai daya saing serta kompetensi utama sebuah organisasi dalam menyongsong era Informasi ini. Untuk mewujudkan informasi atas segala kegiatan pelayanan kesehatan salah satunya adalah Puskesmas maka perlu satu system alat bantu berupa system informasi Puskesmas (Simpus) agar semua kegiatan dapat termonitor dengan baik. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen.

Perubahan era globalisasi membawa dampak yang luas bagi warga masyarakat. Pendidikan masyarakat yang relatif tinggi dan akses terhadap informasi tentang segala hal termasuk informasi tentang kesehatan, serta kesadaran hukum yang semakin tinggi, menyebabkan semakin bervariasi dan tinggi tuntutan kebutuhan kesehatan mereka. Hal ini akan membawa dampak luas dalam pelayanan kesehatan termasuk kesiapan informasi untuk mendesain dan menilai pelayanan kesehatan yang tepat. Masalah dalam Pelayanan Kesehatan yakni Pengelolaan data Puskesmas yang sangat banyak, baik data medik pasien maupun data-data administrasi yang dimiliki oleh Puskesmas sehingga mengakibatkan Redudansi Data, yaitu pencatatan data yang berulang-ulang menyebabkan duplikasi data sehingga kapasitas yang di perlukan membengkak dan pelayanan menjadi lambat. Selain itu mengakibatkan Unintegrated Data, dimana penyimpanan data yang tidak terpusat menyebabkan data tidak sinkron, informasi pada masing-masing bagian mempunyai asumsi yang berbeda-beda. Akibat lain yang timbul adalah Human Error yang merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara manual menyebabkan terjadinya kesalahan

pencatatan yang semakin besar. Akibat selanjutnya yaitu terlambatnya informasi dikarenakan dalam penyusunan informasi harus direkap secara manual maka penyajian informasi menjadi terlambat dan kurang dapat dipercaya kebenarannya. Maka perlu dipikirkan mengenai sistim informasi yang mudah,cepat serta dapat dilihat dan dimengerti yaitu dengan adanya SIMPUS.

Dengan adanya inovasi Simpus, terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan. Diantaranya, yaitu manfaat umum, manfaat manajerial, dan manfaat organisasi. Manfaat umum memberikan nilai tambah dengan meningkatkan efisiensi, kemudahan dan kecepatan data, dokumentasi dan pelaporan yang Auditable dan Accountable, meningkatkan profesionalisme dan kinerja Manajemen Puskesmas, dan mendukung koordinasi antar bagian-bagian didalam Puskesmas. Selain itu, terdapat manfaat umum lainnya yaitu pertama, ketepatan pada awal pemasangan Sistem Informasi Puskesmas, ketika aliran kerja belum lancar, peningkatan kecepatan dan ketepatan data belum terlalu terasa. Namun ketika komitmen seluruh unit untuk tepat waktu memasukkan data dengan akurasi entri data yang tinggi dapat dipenuhi, maka akan terasa sekali dampak dan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas, terhadap ketepatan dan kecepatan kerja. Kedua, yaitu akurasi. Hal lain yang juga terasa berubah adalah akurasi data, apabila dulu dengan sistem manual orang harus mencek satu demi satu transaksi, namun sekarang dengan SIMPUS hal tersebut cukup dilakukan dengan membandingkan laporan antar unit yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas juga dapat mencegah terjadinya duplikasi data untuk transaksi-transaksi tertentu. misalnya, pasien yang sama diregistrasi 2 (dua) kali pada hal yang sama, maka system akan menolaknya, sistem juga akan memberikan peringatan jika tindakan yang sama untuk pasien yang sama dicatat 2 kali, hal ini menjaga agar user lebih teliti. Ketiga, yaitu integrasi. Hal lain yang juga terasa berpengaruh terhadap budaya kerja adalah integrasi data di setiap unit. Bila dengan sistem manual, data pasien harus dimasukkan di setiap unit, maka dengan SIMPUS data tersebut cukup sekali dimasukkan di pendaftaran saja. Hal ini jelas mengurangi beban kerja administrasi dan menjamin

konsistensi data. Keempat, yaitu peningkatan pelayanan. Pengaruh SIMPUS yang dirasakan oleh pasien adalah semakin cepat dan akuratnya pelayanan. Sekarang pasien tidak perlu menunggu lama untuk menyelesaikan administrasinya. Kelima, yaitu kemudahan pelaporan. Pekerjaan pelaporan adalah pekerjaan yang menyita waktu namun sangat penting. Dengan adanya SIMPUS, proses pelaporan hanya memakan waktu dalam hitungan menit sehingga kita dapat lebih konsentrasi untuk menganalisa laporan tersebut.



Sumber: Sistem Informasi Puskesmas (tangerangselatankota.go.id)

Selanjutnya, terdapat manfaat manajerial yang dapat dirasakan dengan adanya inovasi ini, diantaranya yaitu pertama, kecepatan manajer untuk mengambil keputusan. Dengan sistem manual, manajer seringkali mengambil keputusan berdasarkan informasi yang mungkin sudah tidak relevan lagi. Belum lagi jika yang dibutuhkan adalah trend berdasarkan selang waktu tertentu (harian/mingguan/dsb), ini mengakibatkan keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan kondisi nyata. Namun dengan SIMPUS, informasi yang disajikan bersifat real time, bahkan kita dapat membuat tabulasi dan informasi tersebut sehingga informasi yang kita dapati sudah sangat spesifik sesuai dengan kebutuhan kita. Kedua, akurasi dan kecepatan untuk mengidentifikasi masalah. Karena laporan-laporan yang dihasilkan SIMPUS memberi gambaran dan hari ke hari mengenai kinerja Puskesmas, maka jika ada hal-hal yang tidak normal dapat segera kita ketahui. Hal ini membuat identifikasi potensi masalah dapat dilakukan lebih dini, sehingga tindakan pencegahan atau penanggulangannya dapat segera teratasi dan disusun. Ketiga, memudahkan penyusunan rencana dan strategi. Sejalan dengan identifikasi masalah di atas, kita pun dapat menyusun strategi ke depan berdasarkan data populasi, bukan lagi

statistik, karena SIMPUS mampu memberikan data populasi dengan selang waktu tertentu. ini tentu saja semakin menajamkan strategi yang kita susun.

Selain kedua jenis manfaat tersebut, terdapat juga manfaat bagi organisasi, diantaranya yaitu Budaya Kerja. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas ini mensyaratkan kedisiplinan dalam memasukkan data, baik ketepatan waktu maupun keakuratan data, maka budaya kerja yang sebelumnya menanggukhal-hal seperti itu, menjadi berubah. Hal ini dapat terjadi karena integrasi SIMPUS dengan seluruh unit layanan. Sebagai contoh, jika unit registrasi tidak memasukkan data pasien yang akan berobat, Katakanlah semua unit sepakat untuk menanggukhal pemasukan datanya, maka keesokan harinya, manajer akan melihat penurunan trend pasien atau melihat ada pasien-pasien yang menggantung.

Hasil Inovasi yang dapat dirasakan dengan adanya inovasi ini diantaranya yaitu, pertama, efektivitas kerja yang terdiri atas mempercepat proses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat (mis: pendaftaran dari 7 menit secara manual 1 menit). Kedua, yaitu efisiensi proses yang terdiri dari perencanaan, pencatatan aset & kepegawaian, penilaian kinerja, dst. Ketiga, yaitu meminimalisir Resiko dan Total Cost of Ownership (TCO) untuk menghindari re-invent the wheel akibat promosi, rotasi dan relokasi SDM sekaligus melakukan penghematan dari sisi pengeluaran operasional (pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sistem). Keempat, yaitu data terintegrasi yang meminimalisir kesalahan entri data & entri data ganda, implementasi konsep master data (mis: 1 history rekam medis untuk 1 pasien di semua Puskesmas di Kota Tangerang Selatan). Kelima, yaitu penguatan jaringan kerjasama secara lebih intens dan produktif: Dinkes-Kominfo-Disdukcapil-BPJS-SKPD lainnya. Keenam, yaitu online reporting: mempermudah sistem pelaporan data ke Walikota dan Dinkes secara cepat dan akurat (mis: rekap ulang s.d menjadi laporan \pm 1 bulan on-time report delivery). Dan yang terakhir yaitu cerdas TIK: peningkatan e-literacy (kemampuan pengembangan, penguasaan, dan penerapan TIK) baik bagi penyedia layanan maupun warga, yang ditunjukkan dalam bentuk layanan teknologi bagi pengguna.

C. KEBERHASILAN DALAM SEBUAH INOVASI

Rogers (Hutagalung & Hermawan, 2018: 32) mendefinisikan sebagai proses dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu, dalam suatu jangka waktu tertentu diantara anggota suatu sistem sosial. Menurut Rogers dalam difusi ini terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan difusi inovasi, yaitu ada empat factor. Faktor pertama yaitu karakteristik inovasi (Produk). Sebuah produk baru dapat dengan mudah diterima oleh konsumen (masyarakat) jika produk tersebut mempunyai keunggulan relatif. Artinya produk baru akan menarik konsumen jika produk tersebut mempunyai kelebihan dibandingkan produk-produk yang sudah ada sebelumnya di pasar. Contohnya, handphone. Dalam waktu yang relatif pendek telah banyak digunakan oleh masyarakat karena produk tersebut mempunyai keunggulan relatif dibandingkan dengan sarana komunikasi sebelumnya. Faktor produk lain berupa compability juga berpengaruh terhadap hasil inovasi. Produk yang kompatibel adalah produk yang mampu memenuhi kebutuhan, nilai-nilai, dan keinginan konsumen secara konsisten. Faktor ketiga dari karakteristik produk berpengaruh terhadap difusi adalah kompleksitas. Semakin kompleks, semakin sulit mengoperasikannya, semakin tidak menarik konsumen. Konsumen akan memilih produk yang sederhana dan mudah digunakan. Konsumen lebih menarik menggunakan produk yang lebih sederhana dibandingkan dengan produk yang kesulitan dalam pengoperasiannya. Faktor keempat adalah kemampuan untuk dicoba (triability). Produk baru apabila memberikan kemudahan untuk dicoba dan dirasakan oleh konsumen akan menarik bagi konsumen. Dan faktor lain adalah kemampuan untuk dilihat konsumen (observability). Observability lebih menunjuk pada kemampuan produk untuk dapat dikomunikasikan kepada konsumen lainnya. Semakin mudah dilihat dan mampu mengomunikasikan kepada konsumen lain bahwa produk tersebut baru akan semakin menarik karena artinya mampu memberikan petunjuk kepada konsumen lain bahwa dirinya termasuk konsumen yang mengikuti perkembangan. Faktor kedua, yaitu saluran komunikasi inovasi akan menyebar pada konsumen yang ada di masyarakat melalui

saluran komunikasi yang ada. Suatu produk baru akan dapat dengan segera dan menyebar luas ke masyarakat (konsumen) jika perusahaan memanfaatkan saluran komunikasi yang banyak dan jangkauannya luas seperti media massa dan jaringan interpersonal. Faktor ketiga, yaitu upaya perubahan dari agen perusahaan harus mampu mengidentifikasi secara tepat opinion leader yang akan digunakan dan mampu melibatkannya sebagai agen perusahaan untuk mempengaruhi konsumen atau masyarakat dalam menerima dan menggunakan produk baru (inovasi). Faktor keempat, yaitu sistem sosial. Pada umumnya sistem sosial masyarakat modern lebih mudah menerima inovasi dibandingkan dengan masyarakat yang berorientasi pada sistem sosial tradisional karena masyarakat modern cenderung mempunyai sikap positif terhadap perubahan, umumnya menghargai terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan, mempunyai perspektif keluar yang lebih baik dan mudah berinteraksi dengan orang-orang di luar kelompoknya, sehingga mempermudah masukan penerimaan ide-ide baru dalam sistem sosial dan anggotanya dapat melihat dirinya dalam peran yang berbeda-beda.

IV. KESIMPULAN

Sebagai salah satu aktor penting, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang dimilikinya diharapkan mampu menghasilkan keputusan dan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Sejalan dengan hal tersebut, kita menyadari bahwa dibutuhkan upaya yang serius untuk mengangkat kualitas keputusan dan tindakan Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien melalui terobosan-terobosan inovatif.

Hasil Inovasi E-Sipeng Kesbangpol (Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dan Capaian Kinerja Berbasis Teknologi Informasi Badan KESBANGPOL) pada Kota Bekasi dalam jangka pendek diantaranya terbentuknya tim efektif, tersedianya sistem pengendalian pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi, tersusunnya Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tentang SOP Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian Kinerja pada Badan Kesbangpol Kota

Bekasi, dan tersosialisasikannya SOP Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian Kinerja pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Lalu, hasil inovasi yang dapat dirasakan dalam jangka menengah, diantaranya yaitu terlaksananya Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian Kinerja pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi, dan juga terkendalinya penyusunan laporan pengendalian Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Selain dari adanya hasil inovasi jangka pendek dan jangka menengah, terdapat pula hasil inovasi yang dapat dirasakan dalam waktu jangka panjang yaitu tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan berbasis data capaian kinerja.

Sedangkan, hasil inovasi yang dapat dirasakan dengan adanya Inovasi SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) pada Kota Tangerang Selatan diantaranya yaitu, pertama, efektivitas kerja yang terdiri atas mempercepat proses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat (mis: pendaftaran dari 7 menit secara manual 1 menit). Kedua, yaitu efisiensi proses yang terdiri dari perencanaan, pencatatan aset & kepegawaian, penilaian kinerja, dst. Ketiga, yaitu meminimalisir Resiko dan Total Cost of Ownership (TCO) untuk menghindari re-invent the wheel akibat promosi, rotasi dan relokasi SDM sekaligus melakukan penghematan dari sisi pengeluaran operasional (pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sistem). Keempat, yaitu data terintegrasi yang meminimalisir kesalahan entri data & entri data ganda, implementasi konsep master data (mis: 1 history rekam medis untuk 1 pasien di semua Puskesmas di Kota Tangerang Selatan). Kelima, yaitu penguatan jaringan kerjasama secara lebih intens dan produktif: Dinkes-Kominfo-Disdukcapil-BPJS-SKPD lainnya. Keenam, yaitu online reporting: mempermudah sistem pelaporan data ke Walikota dan Dinkes secara cepat dan akurat (mis: rekap ulang s.d menjadi laporan \pm 1 bulan on-time report delivery). Dan yang terakhir yaitu cerdas TIK: peningkatan e-literacy (kemampuan pengembangan, penguasaan, dan penerapan TIK) baik bagi penyedia layanan maupun warga, yang ditunjukkan dalam bentuk layanan teknologi bagi pengguna.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, sehingga penelitian dapat selesai dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, L. R. (2018). Element and Factor Governance Innovation in Government Public Service. *Jurnal Balitbangda*, 6(3), 207-222.
- Anggraeny, C. (2013). Inovasi Pelayanan Kesehatan, 1, 85-93.
- Gumilar, M. G. (2019). Inovasi Pemerintah Daerah Jogja Smart Service Dalam Menciptakan Smart and Liveable City Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Gama Societa*, 3(1), 19-27.
- Hadi, K., Asworo, L., & Taqwa, I. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). *Journal of Government and Civil Society*, 4(1), 115. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438>
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). Membangun Inovasi Pemerintah Daerah, 1-215. Diambil dari <http://repository.lppm.unila.ac.id>
- Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 569-586. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>
- McNulty, S. (2012). "Participatory Governance?" *Gender and Participation in Peru's Local Institutions*. *SSRN Electronic Journal*, 1-20. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2141404>
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61-80. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Setianto, W. A. (2016). Inovasi e-Health Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 151-164.
- Wicaksono, K. W. (2019). TIPOLOGI INOVASI SEKTOR PUBLIK PADA TIGA PROGRAM INOVATIF PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA (Tinjauan Reflektif terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah

Kota Surabaya Tahun 2018). Jurnal
Manajemen Pelayanan Publik, 1(2), 196.
<https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.19895>



***Korespondensi**

Email : harefa1972@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

ANALISIS INOVASI PERENCANAAN SEBAGAI STRATEGI TATA KELOLA YANG BAIK DI BERBAGAI PROVINSI

**(Studi Penelitian Pada Provinsi Jawa Barat, Provinsi
Kalimantan Barat, Dan Provinsi Sulawesi Selatan)**

Herman Yaározatulo Harefa

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri | Jl.
Kramat Raya No.132, RT.1/RW.9, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430

Disetujui: 30 Januari 2021

Abstract

Innovation is a sacred sentence in the progress and welfare of a nation, both at the microeconomic (corporate) level and the macroeconomic level (state). Especially regarding innovation, there is a legal basis in Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government entitled Regional Innovation, from Article 386 to Article 390 of Law 23/2014. The innovations referred to in Article 386 are all forms of reform in the implementation of regional government. This study aims to be able to analyze various kinds of planning innovations carried out by various provinces in order realizing people's welfare. This research uses a qualitative approach. The data collection technique was done by triangulating inductive data analysis and the results of qualitative research emphasized meaning rather than generalization. (Tahir, 2018) This type of research is qualitative descriptive research, which is a form of research that aims to provide an overview of various kinds of data collected from the field objectively. The population in this study are provinces that have made planning innovations, while the samples in this study are innovations carried out by West Java, West Kalimantan, and South Sulawesi as a concrete form of realizing people's welfare. Innovation is the key to increasing economic growth, regional competitiveness, and improving people's welfare. The innovation in question is all forms of reform in the implementation of Regional Government based on the following principles: increased efficiency, improved effectiveness, improved service quality, no conflict of interest, oriented to public interest, carried out openly, fulfilling the values of propriety, and can accounted for the results not for self-interest.

Keywords: Innovation, Planning, Governance

Abstrak

Inovasi menjadi kalimat sakral dalam kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa, baik di level mikro ekonomi (korporasi) hingga level makro ekonomi (negara). Khusus tentang inovasi telah ada landasan hukumnya dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertajuk Inovasi Daerah, dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014. Inovasi yang dimaksud dalam Pasal 386 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis berbagai macam inovasi perencanaan yang dilakukan oleh berbagai Provinsi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Tahir, 2018) Tipe

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif. Populasi dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kota Jambi dalam upaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terbaru yang bersifat digital. Hasil dari adanya inovasi PPDB Online yaitu proses penerimaan peserta didik baru berjalan lancar, serta terlaksananya pengelolaan beasiswa dan PPDB online. Kemudian, hasil dari adanya beasiswa online yaitu proses pemberian bantuan beasiswa prestasi disalurkan sesuai Quota yang ditetapkan. Sedangkan hasil dari adanya inovasi Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak yaitu layanan pengaduan melalui Psikolog dimana Psikolog yang melayani Tesa siap melayani 24 jam. Dimana, fungsi pelayanan melalui psikolog adalah Layanan Telekonseling Bagi Perempuan dan Anak, Layanan Penjangkauan, dan juga Layanan Darurat.

Kata Kunci: Inovasi, Perencanaan, Tata Kelola

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Artinya pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalkan potensi sumber daya, serta mengatur arah pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, pada dasarnya kewenangan tersebut adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. (Simandjuntak, 2015)

Inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya. (Hutagalung & Hermawan, 2018: 26) Beberapa faktor penting yang berpengaruh dalam pengembangan inovasi pemerintah daerah adalah sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, aspek kepemimpinan, infrastruktur, manajemen

informasi, dan lingkungan bisnis (swasta). Seperti dijelaskan oleh (Muflihah & Susanto, 2017: 306-308) dan (Andhika, 2018: 210-213), yaitu bahwa kesuksesan pelaksanaan inovasi pemerintah daerah sangat dipengaruhi adanya kolaborasi penataan kelembagaan, aktor kebijakan, dan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya inovasi, baik dari segi jumlah maupun jenis inovasi itu sendiri, terutama kemampuan pimpinan dalam mengorganisir lingkungan kerjanya untuk lebih inovatif. (Yudha & Susanto, 2019: 5)

Jembatan penghubung berbentuk infrastruktur pendukung akan memberikan dorongan suksesnya inovasi. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi harus didasari oleh kebijakan pemerintah, hal ini menggambarkan pemerintah ikut mendorong pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi aktivitasnya. Bila dibandingkan dengan kemajuan teknologi, maka teknologi menjadi alat transformasi diberbagai bidang pelayanan pemerintah antara penerima dan penyedia layanan. Teknologi umumnya dimanfaatkan dalam aktivitas pemerintah untuk memperbaiki sektor pelayanan publik, saat ini inovasi lebih sering dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi. (Andhika, 2018: 216)

Kondisi inovasi Pemerintah Indonesia saat ini berada pada urutan ke-85 dunia dan dua terbawah di tingkat Asia. (Cornell University, INSEAD, 2019: 36) Fakta ini membuktikan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum melakukan inovasi dalam implementasi e-government di Indonesia. Ini juga merupakan salah satu tantangan dan peluang pemerintah daerah untuk saling mendukung dalam mengembangkan inovasi. (Rozikin et al., 2020: 69) Upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. (Kementerian Komunikasi dan Informasi RI). (Supriyanto, 2016: 143) Masyarakat yang semakin modern dan mapan, memiliki segudang ekspektasi, seperti lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, adanya area publik yang memadai, serta kemudahan mengurus segala bentuk pelayanan publik. (Suhendra, 2017: 2)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga sangat menguntungkan dibandingkan dengan cara-cara manual atau tradisional. Hal itu dibuktikan dengan semakin cepatnya masyarakat dalam mendapatkan informasi melalui berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang semakin baik. Beberapa negara maju saat ini sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terbaru yang bersifat digital dan melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan baru, yang disebut sebagai *Electronic Government (E-government)*. (Widodo, 2016: 227) Hal ini dikarenakan di era globalisasi seperti saat ini perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi telah berjalan dengan sangat pesat. (Ulansari, 2015: 1852)

Seperti halnya Inovasi Telepon Sahabat Perempuan dan Anak di Kota Bekasi. Inovasi Telepon Sahabat Perempuan dan Anak atau yang sering sicut Tesa merupakan media bagi perempuan dan anak dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dimana perempuan dan anak dapat secara langsung berpartisipasi untuk mengungkapkan permasalahan, menyampaikan pandangannya dan menemukan solusinya. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tujuan adanya inovasi Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak yaitu memberikan layanan informasi, konsultasi, konseling dan rujukan dalam penanganan perempuan dan anak juga memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat apabila terjadi kekerasan.

Selain itu, terdapat pula inovasi yang memanfaatkan teknologi yang dilakukan oleh Kota Jambi yang bernama Inovasi Aplikasi Beasiswa dan PPDB Online. Latar belakang yang mendorong terbentuknya inovasi PPDB Online yaitu khusus Kota Jambi pemerataan siswa yang akan melamar ke sekolah SMA/SMK belum merata dikarenakan sekolah belum sepenuhnya merata di setiap kecamatan. Selain itu, arus siswa dari lulusan SMP yang akan masuk ke jenjang SMA/SMK tidak sebanding. Sedangkan untuk Beasiswa Online, berangkat dari permasalahan calon pendaftar sangat antusias untuk mengetahui info mengenai beasiswa online ke Dinas Pendidikan dan

kebudayaan Provinsi Jambi serta belum transparan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam upaya memanfaatkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan efisiensi aktivitas yang dilakukan pada setiap Kota/Kabupaten.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. (Gunawan, 2013: 3) Dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif diharapkan mampu menggali data secara lebih mendalam sehingga dapat diidentifikasi sejumlah inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kota Jambi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang telah melakukan inovasi di daerahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kota Jambi dalam upaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terbaru yang bersifat digital.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi TESA (Telepon Sahabat Perempuan dan Anak) di Kota Bekasi

Tesa merupakan media bagi perempuan dan anak dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dimana perempuan dan anak dapat secara langsung berpartisipasi untuk mengungkapkan permasalahan, menyampaikan pandangannya dan menemukan solusinya. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Tujuan adanya inovasi Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak yaitu memberikan layanan informasi, konsultasi, konseling dan rujukan dalam penanganan perempuan dan anak juga memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat apabila terjadi kekerasan.

Sedangkan, manfaat yang diperoleh dari inovasi Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak yaitu pertama, meningkatkan jumlah anak yang fungsi psikososialnya kembali normal. Kedua, peningkatan kesadaran publik akan pentingnya upaya perlindungan perempuan dan anak. Ketiga, penurunan jumlah tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Keempat, pelaksanaan layanan TeSA yang terpadu dan berkesinambungan.

Hasil dari adanya inovasi Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak yaitu layanan pengaduan melalui Psikolog dimana Psikolog yang melayani Tesa siap melayani 24 jam. Dimana, fungsi pelayanan melalui psikolog adalah Layanan Telekonseling Bagi Perempuan dan Anak, Layanan Penjangkauan, dan juga Layanan Darurat.

B. Inovasi Aplikasi Beasiswa dan PPDB Online di Kota Jambi

Latar belakang yang mendorong terbentuknya inovasi PPDB Online yaitu khusus Kota Jambi pemerataan siswa yang akan melamar ke sekolah SMA/SMK belum merata dikarenakan sekolah belum sepenuhnya merata di setiap kecamatan. Selain itu, arus siswa dari lulusan SMP yang akan masuk ke jenjang SMA/SMK tidak sebanding. Sedangkan untuk Beasiswa Online, berangkat dari permasalahan calon pendaftar sangat antusias untuk mengetahui info mengenai beasiswa online ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jambi serta belum transparan.

Tujuan dan manfaat dari adanya PPDB online yaitu masyarakat lebih mengetahui keadaan dan kondisi sekolah yang sesungguhnya sebagai dasar untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah menentukan sekolah pilihan. Dengan pelaksanaan pengelolaan beasiswa /PPDB online dan terkomputerisasi membuat azas profesional, berkeadilan, transparan dan tanpa pungutan liar (Pungli) dapat terpenuhi. Sedangkan tujuan dan manfaat dari adanya Beasiswa Online yaitu informasi penerimaan Beasiswa Pemerintah Provinsi Jambi sudah terbuka dan dapat di akses oleh masyarakat umum.

Hasil dari adanya inovasi PPDB Online yaitu proses penerimaan peserta didik baru berjalan lancar, serta terlaksananya pengelolaan beasiswa dan PPDB online.

Sedangkan hasil dari adanya beasiswa online yaitu proses pemberian bantuan beasiswa prestasi disalurkan sesuai Quota yang ditetapkan.

C. Beberapa Penyebab Pentingnya Kebutuhan Akan Inovasi

Menurut Damapour dalam Suwarno (Suwarno & Yogi, 2008: 4) menjelaskan bahwa sebuah inovasi dapat berupa teknologi, produk atau jasa baru, proses produksi yang baru, serta system struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Namun, menurut (Helmi et al., 2004) konsep kebaruan ini berbeda bagi kebanyakan orang, hal ini dikarenakan inovasi mempunyai sifat yang relative sehingga pandangan seseorang terhadap inovasi tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang baru, maka belum tentu hal itu sesuatu yang baru di mata orang lain.

Inovasi dibutuhkan dalam rangka memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, karena melalui inovasi dapat diciptakan sistem, metode, serta teknologi yang dapat menurunkan biaya, mempersingkat waktu layanan, memangkas birokrasi, dan yang terpenting memberikan kepercayaan bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. (Sari, 2014: 221)

Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara (2012: 63) menyebutkan bahwa kebutuhan akan inovasi dalam pelayanan publik disebabkan oleh beberapa hal berikut, pertama masyarakat Indonesia makin terdidik mengalami peningkatan pendidikan dari masyarakat pendapatan rendah ke pendapatan menengah, mengalami proses demokratisasi sehingga makin memahami hak-hak mereka. Implikasinya, masyarakat akan semakin demanding untuk mendapatkan pelayanan yang lebih berkualitas dari pemerintah. Kedua, pemerintah diharapkan lebih akuntabel dalam menggunakan dana publik. Tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaannya yang memenuhi kaidah administrasi keuangan, akan tetapi juga yang berkaitan dengan value for money. Ketiga, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga secara terus

menerus diharapkan mampu melakukan perubahan. Keempat, pemerintah diharapkan mampu memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan modern yang makin kompleks dimana masyarakat tidak lagi dapat bergantung pada mekanisme lama untuk menyelesaikan masalah mereka dengan makin terkikisnya keberadaan institusi tradisional.

Kelima, pemerintah dituntut mampu menciptakan pelayanan publik yang mampu mendorong competitiveness masyarakat dalam menghadapi tantangan global sehingga masyarakat mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk menyelesaikan masalah mereka maupun meningkatkan kesejahteraan. Keenam, pemerintah menghadapi tantangan makin terbatasnya anggaran, sementara kompleksitas dan tuntutan masyarakat terus berkembang sehingga dituntut untuk makin kreatif mencari sumber-sumber pendanaan dalam memberikan pelayanan publik.

IV. KESIMPULAN

Upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. (Kementerian Komunikasi dan Informasi RI). Dan hal ini perlahan-lahan terwujud dengan berkembangnya inovasi pada setiap daerah. Hasil dari adanya inovasi PPDB Online yaitu proses penerimaan peserta didik baru berjalan lancar, serta terlaksananya pengelolaan beasiswa dan PPDB online. Kemudian, hasil dari adanya beasiswa online yaitu proses pemberian bantuan beasiswa prestasi disalurkan sesuai Quota yang ditetapkan. Sedangkan hasil dari adanya inovasi Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak yaitu layanan pengaduan melalui Psikolog dimana Psikolog yang melayani Tesa siap melayani 24 jam. Dimana, fungsi pelayanan melalui psikolog adalah Layanan Telekonseling Bagi Perempuan dan Anak, Layanan Penjangkauan, dan juga Layanan Darurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini,

sehingga penelitian dapat selesai dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, L. R. (2018). Element and Factor Governance Innovation in Government Public Service. *Jurnal Balitbangda*, 6(3), 207-222.
- Cornell University, INSEAD, and W. (2019). *The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation*.
- Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. *Pendidikan*, 143. Diambil dari http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Helmi, F. A., & Sutarmanto, H. (2004). *Kewirausahaan dan Inovasi*.
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). Membangun Inovasi Pemerintah Daerah, 1-215. Diambil dari <http://repository.lppm.unila.ac.id>
- Muflihah, Y., & Susanto, T. D. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Warga dan Pemerintah dalam Adopsi E-Government: Sebuah Ulasan Sistematis. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 4(4), 304-310. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201744366>
- Penerapan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. (2012). In Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN.
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61-80. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Sari, M. A. P. (2014). Inovasi Pelayanan Publik Di Badan Penanaman Modal Public Services Innovation in Regional Board of Investment and Integrated Services (Bpmp) At Kubu Raya Regency. *Jurnal Borneo Administrator*, 10(2), 214-234.
- Simandjuntak, R. (2015). Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, 07(01), 57-67.

- Suhendra, A. (2017). Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Cerdas di Bandung dan Surabaya. *Matra Pembaruan*, 1(1),1-9.
<https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.1-9>
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(1), 141.
<https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.438>
- Suwarno, & Yogi. (2008). Inovasi Sektor Publik.
- Ulansari, L. (2015). Inovasi Sekolah Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Kejuruan (Studi Pada Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 3 Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(11), 1851-1856.
- Widodo, N. (2016). Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 58-67.
- Yudha, H., & Susanto, T. D. (2019). E-Leadership: The Effect of E-Government Success in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1201(1).
<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1201/1/012025>



***Korespondensi**

Email¹ : imansyahabindaf@gmail.com

Email² : arnidiana@yahoo.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

STRATEGI KOTA BEKASI DAN KOTA JAMBI DALAM PENGEMBANGAN INOVASI DIGITAL DAN KREATIVITAS MASYARAKAT

Imansyah Abinda Firdaus^{1*}, Arnidiana^{2*}

¹Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi | Jl. Jend. Ahmad Yani No.1, RT.001/RW.005, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144

²Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi | Jl. RM. Nur Atmadibrata No. 1, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361

Disetujui: 30 Januari 2021

Abstract: *The development of information and communication technology is also very profitable compared to manual or traditional methods. This is evidenced by the faster people get information through various information and communication technologies which are getting better. This study aims to analyze the innovations made by the Regency / City in an effort to take advantage of technological developments in increasing the efficiency of activities carried out in each City / Regency. This research uses a qualitative approach. With qualitative methods and descriptive approaches, it is hoped that the City of Bekasi and Jambi City will be able to dig deeper into data so that it can be identified a number of public service innovations that have been carried out by Bekasi City and Jambi City. The population in this study are districts / cities that have made innovations in their regions, while the samples in this study are innovations made by Bekasi City and Jambi City in an effort to utilize the latest digital information and communication technology. The result of the PPDB Online innovation is that the admission process of new students runs smoothly, as well as the implementation of online scholarship and PPDB management. Then, the result of the online scholarship is that the process of providing merit scholarship assistance is distributed according to the set quota. Meanwhile, the result of the innovation of the Telephone Sahabat Wanita dan Anak is a complaint service through a psychologist where the psychologist who serves Tesa is ready to serve 24 hours. Where, the function of services through psychologists is Telecounseling Services for Women and Children, Outreach Services, and also Emergency Services.*

Keywords: *Innovation, Digital Technology, Public Services, Society, Information*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga sangat menguntungkan dibandingkan dengan cara-cara manual atau tradisional. Hal itu dibuktikan dengan semakin cepatnya masyarakat dalam mendapatkan informasi melalui berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang semakin baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam upaya memanfaatkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan efisiensi aktivitas yang dilakukan pada setiap Kota/Kabupaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif diharapkan mampu menggali data secara lebih mendalam sehingga dapat diidentifikasi sejumlah inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Kota Bekasi

dan Kota Jambi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang telah melakukan inovasi di daerahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kota Jambi dalam upaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terbaru yang bersifat digital. Hasil dari adanya inovasi PPDB Online yaitu proses penerimaan peserta didik baru berjalan lancar, serta terlaksananya pengelolaan beasiswa dan PPDB online. Kemudian, hasil dari adanya beasiswa online yaitu proses pemberian bantuan beasiswa prestasi disalurkan sesuai Quota yang ditetapkan. Sedangkan hasil dari adanya inovasi Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak yaitu layanan pengaduan melalui Psikolog dimana Psikolog yang melayani Tesa siap melayani 24 jam. Dimana, fungsi pelayanan melalui psikolog adalah Layanan Telekonseling Bagi Perempuan dan Anak, Layanan Penjangkauan, dan juga Layanan Darurat.

Kata Kunci : Inovasi, Teknologi Digital, Layanan Publik, Masyarakat, Informasi

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Artinya pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalkan potensi sumber daya, serta mengatur arah pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, pada dasarnya kewenangan tersebut adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. (Simandjuntak, 2015)

Inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya. (Hutagalung & Hermawan, 2018: 26) Beberapa faktor penting yang berpengaruh dalam pengembangan inovasi pemerintah daerah adalah sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, aspek kepemimpinan, infrastruktur, manajemen

informasi, dan lingkungan bisnis (swasta). Seperti dijelaskan oleh (Muflihah & Susanto, 2017: 306-308) dan (Andhika, 2018: 210-213), yaitu bahwa kesuksesan pelaksanaan inovasi pemerintah daerah sangat dipengaruhi adanya kolaborasi penataan kelembagaan, aktor kebijakan, dan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya inovasi, baik dari segi jumlah maupun jenis inovasi itu sendiri, terutama kemampuan pimpinan dalam mengorganisir lingkungan kerjanya untuk lebih inovatif. (Yudha & Susanto, 2019: 5)

Jembatan penghubung berbentuk infrastruktur pendukung akan memberikan dorongan suksesnya inovasi. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi harus didasari oleh kebijakan pemerintah, hal ini menggambarkan pemerintah ikut mendorong pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi aktivitasnya. Bila dibandingkan dengan kemajuan teknologi, maka teknologi menjadi alat transformasi diberbagai bidang pelayanan pemerintah antara penerima dan penyedia layanan. Teknologi umumnya dimanfaatkan dalam aktivitas pemerintah untuk memperbaiki sektor pelayanan publik, saat ini inovasi lebih sering dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi. (Andhika, 2018: 216)

Kondisi inovasi Pemerintah Indonesia saat ini berada pada urutan ke-85 dunia dan dua terbawah di tingkat Asia. (Cornell University, INSEAD, 2019: 36) Fakta ini membuktikan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum melakukan inovasi dalam implementasi e-government di Indonesia. Ini juga merupakan salah satu tantangan dan peluang pemerintah daerah untuk saling mendukung dalam mengembangkan inovasi. (Rozikin et al., 2020: 69) Upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. (Kementerian Komunikasi dan Informasi RI). (Supriyanto, 2016: 143) Masyarakat yang semakin modern dan mapan, memiliki segudang ekspektasi, seperti lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, adanya area publik yang memadai, serta kemudahan mengurus segala bentuk pelayanan publik. (Suhendra, 2017: 2)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga sangat menguntungkan

dibandingkan dengan cara-cara manual atau tradisional. Hal itu dibuktikan dengan semakin cepatnya masyarakat dalam mendapatkan informasi melalui berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang semakin baik. Beberapa negara maju saat ini sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terbaru yang bersifat digital dan melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan baru, yang disebut sebagai *Electronic Government (E-government)*. (Widodo, 2016: 227) Hal ini dikarenakan di era globalisasi seperti saat ini perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi telah berjalan dengan sangat pesat. (Ulansari, 2015: 1852)

Seperti halnya Inovasi Telepon Sahabat Perempuan dan Anak di Kota Bekasi. Inovasi Telepon Sahabat Perempuan dan Anak atau yang sering disebut Tesa merupakan media bagi perempuan dan anak dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dimana perempuan dan anak dapat secara langsung berpartisipasi untuk mengungkapkan permasalahan, menyampaikan pandangannya dan menemukan solusinya. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tujuan adanya inovasi Telepon Sahabat Perempuan dan Anak yaitu memberikan layanan informasi, konsultasi, konseling dan rujukan dalam penanganan perempuan dan anak juga memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat apabila terjadi kekerasan.

Selain itu, terdapat pula inovasi yang memanfaatkan teknologi yang dilakukan oleh Kota Jambi yang bernama Inovasi Aplikasi Beasiswa dan PPDB Online. Latar belakang yang mendorong terbentuknya inovasi PPDB Online yaitu khusus Kota Jambi pemerataan siswa yang akan melamar ke sekolah SMA/SMK belum merata dikarenakan sekolah belum sepenuhnya merata di setiap kecamatan. Selain itu, arus siswa dari lulusan SMP yang akan masuk ke jenjang SMA/SMK tidak sebanding. Sedangkan untuk Beasiswa Online, berangkat dari permasalahan calon pendaftar sangat antusias untuk mengetahui info mengenai beasiswa online ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi serta belum transparan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam upaya memanfaatkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan efisiensi aktivitas yang dilakukan pada setiap Kota/Kabupaten.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. (Gunawan, 2013: 3) Dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif diharapkan mampu menggali data secara lebih mendalam sehingga dapat diidentifikasi sejumlah inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kota Jambi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang telah melakukan inovasi di daerahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kota Jambi dalam upaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terbaru yang bersifat digital.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi TESA (Telepon Sahabat Perempuan dan Anak) di Kota Bekasi

Tesa merupakan media bagi perempuan dan anak dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dimana perempuan dan anak dapat secara langsung berpartisipasi untuk mengungkapkan permasalahan, menyampaikan pandangannya dan menemukan solusinya. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Tujuan adanya inovasi Telepon Sahabat Perempuan dan Anak yaitu memberikan layanan informasi, konsultasi, konseling dan rujukan dalam penanganan perempuan dan anak juga memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat apabila terjadi kekerasan.

Sedangkan, manfaat yang diperoleh dari inovasi Telepon Sahabat Perempuan dan Anak yaitu pertama, meningkatkan jumlah anak yang

fungsi psikososialnya kembali normal. Kedua, peningkatan kesadaran publik akan pentingnya upaya perlindungan perempuan dan anak. Ketiga, penurunan jumlah tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Keempat, pelaksanaan layanan TeSA yang terpadu dan berkesinambungan.

Hasil dari adanya inovasi Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak yaitu layanan pengaduan melalui Psikolog dimana Psikolog yang melayani Tesa siap melayani 24 jam. Dimana, fungsi pelayanan melalui psikolog adalah Layanan Telekonseling Bagi Perempuan dan Anak, Layanan Penjangkauan, dan juga Layanan Darurat.

B. Inovasi Aplikasi Beasiswa dan PPDB Online di Kota Jambi

Latar belakang yang mendorong terbentuknya inovasi PPDB Online yaitu khusus Kota Jambi pemerataan siswa yang akan melamar ke sekolah SMA/SMK belum merata dikarenakan sekolah belum sepenuhnya merata di setiap kecamatan. Selain itu, arus siswa dari lulusan SMP yang akan masuk ke jenjang SMA/SMK tidak sebanding. Sedangkan untuk Beasiswa Online, berangkat dari permasalahan calon pendaftar sangat antusias untuk mengetahui info mengenai beasiswa online ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jambi serta belum transparan.

Tujuan dan manfaat dari adanya PPDB online yaitu masyarakat lebih mengetahui keadaan dan kondisi sekolah yang sesungguhnya sebagai dasar untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah menentukan sekolah pilihan. Dengan pelaksanaan pengelolaan beasiswa /PPDB online dan terkomputerisasi membuat azas profesional, berkeadilan, transparan dan tanpa pungutan liar (Pungli) dapat terpenuhi. Sedangkan tujuan dan manfaat dari adanya Beasiswa Online yaitu informasi penerimaan Beasiswa Pemerintah Provinsi Jambi sudah terbuka dan dapat di akses oleh masyarakat umum.

Hasil dari adanya inovasi PPDB Online yaitu proses penerimaan peserta didik baru berjalan lancar, serta terlaksananya pengelolaan beasiswa dan PPDB online. Sedangkan hasil dari adanya beasiswa online yaitu proses pemberian bantuan beasiswa

prestasi disalurkan sesuai Quota yang ditetapkan.

C. Beberapa Penyebab Pentingnya Kebutuhan Akan Inovasi

Menurut Damapour dalam Suwarno (Suwarno & Yogi, 2008: 4) menjelaskan bahwa sebuah inovasi dapat berupa teknologi, produk atau jasa baru, proses produksi yang baru, serta system struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Namun, menurut (Helmi et al., 2004) konsep kebaruan ini berbeda bagi kebanyakan orang, hal ini dikarenakan inovasi mempunyai sifat yang relative sehingga pandangan seseorang terhadap inovasi tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang baru, maka belum tentu hal itu sesuatu yang baru di mata orang lain.

Inovasi dibutuhkan dalam rangka memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, karena melalui inovasi dapat diciptakan sistem, metode, serta teknologi yang dapat menurunkan biaya, mempersingkat waktu layanan, memangkas birokrasi, dan yang terpenting memberikan kepercayaan bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. (Sari, 2014: 221)

Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara (2012: 63) menyebutkan bahwa kebutuhan akan inovasi dalam pelayanan publik disebabkan oleh beberapa hal berikut, pertama masyarakat Indonesia makin terdidik mengalami peningkatan pendidikan dari masyarakat pendapatan rendah ke pendapatan menengah, mengalami proses demokratisasi sehingga makin memahami hak-hak mereka. Implikasinya, masyarakat akan semakin demanding untuk mendapatkan pelayanan yang lebih berkualitas dari pemerintah. Kedua, pemerintah diharapkan lebih akuntabel dalam menggunakan dana publik. Tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaannya yang memenuhi kaidah administrasi keuangan, akan tetapi juga yang berkaitan dengan value for money. Ketiga, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga secara terus menerus diharapkan mampu melakukan perubahan. Keempat, pemerintah diharapkan

mampu memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan modern yang makin kompleks dimana masyarakat tidak lagi dapat bergantung pada mekanisme lama untuk menyelesaikan masalah mereka dengan makin terkikisnya keberadaan institusi tradisional.

Kelima, pemerintah dituntut memapu menciptakan pelayanan publik yang mampu mendorong competitiveness masyarakat dalam menghadapi tantangan global sehingga masyarakat mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk menyelesaikan masalah mereka maupun meningkatkan kesejahteraan. Keenam, pemerintah menghadapi tantangan makin terbatasnya anggaran, sementara kompleksitas dan tuntutan masyarakat terus berkembang sehingga dituntut untuk makin kreatif mencari sumber-sumber pendanaan dalam memberikan pelayanan publik.

IV. KESIMPULAN

Upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. (Kementerian Komunikasi dan Informasi RI). Dan hal ini perlahan-lahan terwujud dengan berkembangnya inovasi pada setiap daerah. Hasil dari adanya inovasi PPDB Online yaitu proses penerimaan peserta didik baru berjalan lancar, serta terlaksananya pengelolaan beasiswa dan PPDB online. Kemudian, hasil dari adanya beasiswa online yaitu proses pemberian bantuan beasiswa prestasi disalurkan sesuai Quota yang ditetapkan. Sedangkan hasil dari adanya inovasi Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak yaitu layanan pengaduan melalui Psikolog dimana Psikolog yang melayani Tesa siap melayani 24 jam. Dimana, fungsi pelayanan melalui psikolog adalah Layanan Telekonseling Bagi Perempuan dan Anak, Layanan Penjangkauan, dan juga Layanan Darurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, sehingga penelitian dapat selesai dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, L. R. (2018). Element and Factor Governance Innovation in Government Public Service. *Jurnal Balitbangda*, 6(3), 207-222.
- Cornell University, INSEAD, and W. (2019). *The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation*.
- Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. *Pendidikan*, 143. Diambil dari http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Helmi, F, A., & Sutarmanto, H. (2004). *Kewirausahaan dan Inovasi*.
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). Membangun Inovasi Pemerintah Daerah, 1-215. Diambil dari <http://repository.lppm.unila.ac.id>
- Muflihah, Y., & Susanto, T. D. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Warga dan Pemerintah dalam Adopsi E-Government: Sebuah Ulasan Sistematis. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 4(4), 304-310. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201744366>
- Penerapan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. (2012). In Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN.
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61-80. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Sari, M. A. P. (2014). Inovasi Pelayanan Publik Di Badan Penanaman Modal Public Services Innovation in Regional Board of Investment and Integrated Services (Bpmppt) At Kubu Raya Regency. *Jurnal Borneo Administrator*, 10(2), 214-234.
- Simandjuntak, R. (2015). Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, 07(01), 57-67.
- Suhendra, A. (2017). Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Cerdas di Bandung dan Surabaya. *Matra Pembaruan*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.1-9>

- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(1), 141. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.438>
- Suwarno, & Yogi. (2008). Inovasi Sektor Publik.
- Ulansari, L. (2015). Inovasi Sekolah Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Kejuruan (Studi Pada Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 3 Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(11), 1851-1856.
- Widodo, N. (2016). Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 58-67.
- Yudha, H., & Susanto, T. D. (2019). E-Leadership: The Effect of E-Government Success in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1201(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1201/1/012025>



***Korespondensi**

Email : yusnia.anggraini@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

PENGEMBANGAN PERIZINAN KOTA DENGAN INOVASI DAERAH STUDI KASUS PADA KABUPATEN SEMARANG DAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

Yusnia Anggraini

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten | Jl.
Syech Nawawi Albantani No. 1 Curug, Kota Serang, Banten 42171

Disetujui: 30 Januari 2021

Abstract

The slow process of building construction permits is a problem for the local government, this delay has a detrimental impact on the people of Semarang and Sragen regency in managing building permits. This makes the author to research and provide innovations in order to accelerate the building permit process. The method used in this research is descriptive method using qualitative analysis. With 20 respondents from each region. The results of this research innovation carried out the innovation of the Building Permit Process by telephone and Building Construction Information Systems. This innovation has a positive impact on the people who use it, being faster in the licensing process can cut the time to 7 days from the previous 14-28 days. The conclusion of this research innovation has been carried out well by the local government of the city of Semarang and the district government of Sragen.

Keywords: Licensing innovation, Technology innovation, Local government

Abstrak

Lambatnya proses perizinan Izin Mendirikan Bangunan menjadi masalah pemerintah daerah, lambat ini memberikan dampak merugikan bagi masyarakat kota Semarang dan kabupaten Sragen dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini menjadikan penulis untuk meneliti sekaligus memberikan inovasi guna mempercepat proses Izin mendirikan Bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan responden berjumlah 20 dari masing-masing daerah. Hasil penelitian ini inovasi dilakukan inovasi Proses izin Mendirikan Bangunan dengan telepon dan Sistem Informasi Mendirikan Bangunan. Inovasi ini memberikan dampak positif kepada masyarakat yang menggunakannya, menjadi lebih cepat dalam proses perizinan bisa memangkas waktu jadi 7 hari dari sebelumnya sekitar 14-28 hari. Kesimpulan penelitian ini inovasi telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah kota Semarang maupun kabupaten Sragen.

Kata Kunci : Inovasi perizinan, Inovasi Teknologi, Pemerintah daerah

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang, dimana membutuhkan banyak pembangunan di semua sector tak terkecuali sektor konstruksi dan bangunan. Sesuai dengan fokus pemerintahan sekarang fokus dalam pembangunan dan kontruksi menjadi pilihan utama, hal ini dikarenakan Indonesia ingin mengejar ketertinggalan infrastruktur yang mana berguna untuk menunjang aktivitas warga Indonesia untuk menajdi negara yang makmur dan sejahtera, seiring dibutuhkan banyak pembangunan, terlihat bahwa Di beberapa tahun terakhir tingkat pertumbuhan bangunan di Indonesia semakin cepat dari tahun ke tahun, data dari Biro Pusat Statistik mengatakan bahwa rata-rata pertumbuhan konstruksi dan bangunan di Indonesia sebesar 7-8%. Dengan pesatnya pertumbuhan ini perlu adanya aturan-aturan yang jelas, serta legalitas yang mana ketika mendirikan bangunan tidak memberikan dampak negative ke lingkungan sekitar.

Berdasarkan amanat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa "Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan ". Dalam aturan tersebut, pemerintah maupun pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan Sragen dengan tegas telah menekankan bahwa setiap bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan, bahkan aturan tersebut dilengkapi dengan ketentuan pidana bagi yang melanggar.

Akan tetapi pada kenyataan yang dihadapi saat ini, sebagian besar masyarakat hanya mengurus IMB rumah tinggalnya apabila berkaitan dengan perbankan atau dengan kata lain ketika membutuhkannya sebagai syarat dalam pengajuan pinjaman ke Bank. Tampaknya peraturan yang ada belum cukup menjadikan masyarakat menjadi patuh, sadar serta taat hukum. Hal ini dikarenakan mengurus IMB sebagai salah satu perizinan yang sangat rumit. Selain syarat administrasi yang kompleks, keterkaitan dengan banyak SKPD (misal tata ruang, kelayakan teknis bangunan dan sebagainya) membuat IMB seolah menjadi perizinan yang pasti membutuhkan waktu yang lama dan biaya

pengurusan yang besar. Setiap IMB yang dikeluarkan selama ini juga belum terintegrasi dengan Geografic Information System (GIS) sehingga sulit mengontrol apakah lokasi bangunan sudah sesuai secara tata ruang.

Masalah lain yang juga terjadi di kota-kota besar, IMB sering menjadi hal yang dikeluhkan masyarakat. Keluhan tersebut muncul karena IMB kerap dijadikan sumber "penghasilan" tambahan oleh oknum-oknum tertentu. Terlebih apabila sang klien adalah suatu badan usaha, maka tarif yang dibebankan bisa sangat tinggi. Seperti yang terjadi di Kota Semarang belum lama ini, ditangkapnya seorang oknum pegawai penjaga loket yang menarik pungli IMB sebesar Rp 1 miliar kepada sebuah perusahaan pengembang. Apabila masalah tersebut tidak diatasi dikhawatirkan akan menjadi label buruk bagi pemerintah.

Orlandina (2015) yang mengungkapkan bahwa dalam pembuatan IMB retribusi yang dibebankan dirasakan terlalu tinggi, jangka waktu penyelesaiannya tidak tepat waktu, birokrasi terlalu berbelit-belit, kemudian tidak sesuai dengan SOP, dan banyak terdapat pungutan liar. Keluhan atau permasalahan sebagaimana diurai di atas, Sebelum penelitian ini, telah banyak penelitian-penelitian yang juga membahas tentang IMB. Penelitian-penelitian tersebut sebagian besar membahas tentang penerapan, standar operasional dan prosedur (SOP) pembuatan IMB, serta implementasi regulasi yang mengatur IMB. Pembahasan tentang penerapan IMB dibahas di Pematang Siantar dan Sleman, oleh Sembiring (2015) dan Utami (2013).

Berbeda fokus dari kedua temuan di atas, pembahasan mengenai SOP IMB yang dilakukan di Tana Toraja dan Makassar, oleh Kameswari (2012) dan Amalia (2015) menemukan proses pembuatan IMB sudah berjalan cukup baik dan akuntabel. Dibuktikan dengan semangat kerja, loyalitas kelompok kerja, daya tanggap petugas, dan hubungan antara pimpinan dan bawahan telah terbangun dengan baik. Hal itu membuktikan pelayanan IMB sudah berjalan cukup efektif. Namun, efisiensi pelayanan dan jumlah sarana prasarana masih perlu peningkatan. Mengingat, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan izin masih relatif lama dan jangkauan pengawasan hanya

pada daerah pusat saja.

Sementara itu dari sudut pandang implementasi, Erfa dan Meilani (2014) dan Irawan (2015) yang melakukan penelitian di Pekanbaru dan Malinau menemukan implementasi kebijakan IMB belum berjalan baik dan optimal. Hal ini terlihat dari sanksi yang diberikan belum maksimal dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mau mengurus IMB

Hal inilah yang kemudian menjadikan awal ketertarikan penulis untuk membuat inovasi sebagai gagasan proyek perubahan agar minat masyarakat dan sistem inovasi yang dilakukan agar mempercepat dalam proses Ijin Mendirikan Bangunan di kota Semarang dan Sragen.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode diskriptif adalah suatu cara untuk mendeskripsikan tentang bagaimana inovasi yang digunakan dengan melakukan wawancara terhadap berbagai pihak atau responden yang memiliki kepentingan untuk dapat merealisasikan inovasi perizinan mendirikan bangunan agar tercapainya proses perizinan yang jelas, tidak ribet dan lebih cepat, ada beberapa narasumber atau responden yang menjadi objek wawancara, pada dua kota, yaitu Semarang dan Kota Sragen, narasumber tersebut meliputi masyarakat kota Semarang, masyarakat kota Sragen, Pemerintah daerah kota Semarang, Pemerintah daerah kota Sragen, Pelaku usaha yang berencana mendirikan bangunan dari kota Semarang dan kota Sragen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi Sistem Perizinan kota Semarang

Hasil dari data deskriptif dalam penelitian dengan dilakukan wawancara beberapa narasumber yang terlibat langsung didapatkan hasil wawancara bahwa pihak dari dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Semarang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang SOTK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu (Perda, kota Semarang).

Dikarenakan kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat proses pembangunan pihak pemerintah daerah merujuk pada peraturan daerah kabupaten semarang nomor 19 tahun 2008 maka, dibentuklah sistem PRIMBON (Proses Ijin Mendirikan Bangunan dengan Telepon) dengan bermodalkan telepon inovasi PRIMBON ini menghubungkan kebutuhan masyarakat agar tidak perlu mengantri di dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dan juga masyarakat akan didatangi oleh perwakilan dari dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan ke rumah masyarakat yang telah menelepon kedinasan.



Gambar 1. Poster Penyuluhan inovasi Primbon di kota Semarang

(source: <http://dpmpptsp.semarangkab.go.id/primbon.html>)

Dari gambar 1 terlihat bagaimana upaya pemerintah daerah untuk mengenalkan sistem inovasi proses izin mendirikan bangunan menggunakan telepon kepada masyarakat umum. Terlihat dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk yang

cukup mudah dipahami bagi masyarakat umum. Hal ini termasuk komitmen pemerintah untuk mempercepat proses perizinan yang terkenal berbelit. Dengan sering-sering mengenalkan inovasi proses izin mendirikan bangunan menggunakan telepon, diharapkan masyarakat umum khususnya para pengusaha yang ingin membangun bangunan untuk berinvestasi dapat lebih mudah dan cepat dari sistem perizinan sebelumnya.

B. Inovasi Sistem Perizinan Bangunan Kota Sragen

Di kota sragen, mengacu pada peraturan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, maka pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang-undang tersebut, diharapkan pemerintah mampu melayani setiap warga Negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik, memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Di sisi lain, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah merambah pada berbagai bidang kehidupan dan tidak dapat dipungkiri bahwa Telematika dapat membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja dari suatu organisasi.

Dengan ini maka pemerintah daerah Sragen berupaya untuk memperdayakan telematika adalah melalui percepatan pengembangan e-government. Implementasinya adalah membangun pelayanan perijinan yang terpadu. Pemerintah Kabupaten Sragen telah melakukan perubahan mendasar pada bidang pelayanan, yaitu melakukan proses transformasi menuju pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi, atau mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Ijin Mendirikan Bangunan (SIM-IMB) berbasis GIS. Hal ini dikarenakan Pengembangan Aplikasi SIM-IMB berbasis GIS merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan, serta diarahkan untuk mencapai pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas tanpa dibatasi sekat ruang dan

waktu. Tujuan akhirnya adalah Program Aplikasi SIM-IMB berbasis GIS ini diharapkan mampu mengakomodir perencanaan pelayanan IMB, hakekat dan sifat Pelayanan Prima (Excellent service). Sehingga mendorong terwujudnya pelayanan perizinan yang terpadu atau menuju layanan "One Stop Service".

Untuk menunjang kegiatan tersebut perlu suatu aplikasi IMB yang memudahkan petugas IMB pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam melakukan pendataan pemohon IMB baik dalam melakukan rekapitulasi pemohon IMB per kecamatan atau per desa, kesesuaian dengan tata ruang, dan kesesuaian gambar teknis. Aplikasi tersebut dapat dilakukan secara online hal ini untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendaftarkan Izin Mendaftarkan bangunan daripada dengan cara lama terkesan rumit dan membutuhkan waktu yang lama karena harus mengikuti prosedur. Dengan inovasi ini data dapat terinput langsung ke sistem sehingga pegawai dari kedinasan yang menangani perizinan dapat langsung melihat dan menindak lanjuti dokumen-dokumen yang diberikan dari masyarakat yang ingin mengurus Izin Mendirikan Bangunan.

Sistem aplikasi SIM-IMB berbasis GIS ini telah dilakukan evaluasi secara mendalam dari pihak internal dan akhirnya dikembangkan untuk mengakomodasi semua sistem perizinan di satu aplikasi, hal ini agar dapat menjadi one gate system, yang mana dapat memenuhi keperluan masyarakat tentang semua hal yang berhubungan dengan perizinan di seluruh kabupaten Sragen

Gambar 2. Tampilan Si Pioneer Aplikasi One Gate System Untuk Mengurus Perizinan

(source: <http://si-pioneer.sragenkab.go.id/status-izin.php>)

Berdasarkan gambar 2. Terlihat bahwa aplikasi online tersebut terdapat lima item yang harus di isi, pertama ada nama, nama disini sebagai nama calon pengurus perizinan, kedua ada kode pendaftaran adalah urutan

pendaftaran masyarakat, kemudian ada alamat, alamat ini di isi lokasi pendaftar dimana, kemudian ada jenis perizinan, jenis perizinan ini terdapat macam2 jenis perizinan yang dibutuhkan pendaftar, pendaftar hanya tinggal memilih perizinan seperti apa yang dibutuhkan, di opsional ada semua, dan yang terakhir ada status pendaftar, di opsional ini pendaftar diberi lima opsional yaitu, semua, pemeriksaan berkas, proses perizinan, pemeriksaan lapangan, dan selesai. Tiap opsional punya fungsi masing-masing, sesuai tahapan pendaftar yang diajukan. Dari lima item diatas sudah mewakili informasi yang dibutuhkan pegawai. Sehingga proses pendaftaran bisa lebih cepat.

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Inovasi di Kota Semarang dan Kabupaten Sragen

Hasil wawancara dengan 20 masyarakat sebagai calon pendaftar perizinan dari masing-masing kota Semarang dan kabupaten Sragen, terlihat bahwa 80% dari total keseluruhan narasumber ketika di wawancarai merasa terbantu dan lebih mudah dalam mengurus perizinan Mendirikan Bangunan, hal ini dikarenakan kedua inovasi tersebut memberikan dampak percepatan pengurusan dari masing-masing daerah, seperti inovasi yang ada di kota Semarang masyarakat yang ingin mengurus perizinan merasa special hal ini juga pengurus perizinan hanya menggunakan telepon untuk meminta perizinan Mendirikan Bangunan dan tim dari kedinasan akan datang ke rumah masyarakat yang telah menelepon untuk mengurus Perizinan Mendirikan Bangunan untuk mengurus berkasnya, tanpa harus mengantri panjang di kantor pengurusan. Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Sragen terhadap inovasi pengurusan perizinan mendirikan bangunan online, inovasi tersebut dikatakan praktis oleh masyarakat, dengan adanya inovasi seperti ini masyarakat dapat menghemat waktu untuk masalah perizinan bisa sampai astu minggu sampai jadi. Ini jadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat, untuk dapat segera melakukan tahap pembangunan.

D. Strategi Pemerintah Daerah Kota Semarang dan Kabupaten Sragen Agar Inovasi Dikenal Masyarakat

Pemerintah daerah kota Semarang dan kabupaten Sragen melakukan pengenalan inovasi Proses Perizinan Mendirikan Bangunan dengan Telepon dan sistem Informasi Mendirikan Bangunan dengan memberikan penyuluhan ke pendaftar yang datang ke kantor untuk dapat melakukan pengalihan proses Perizinan dengan mekanisme tersebut, serta membuat banner-banner di berbagai sudut kota Semarang dan kabupaten Sragen. Hal ini untuk dapat menjangkau masyarakat umum lebih luas agar dapat mengetahui untuk proses Perizinan Mendirikan Bangunan bisa lebih cepat dari sistem sebelumnya.

Pemerintah juga melakukan pengiklanan di media sosial karena di jaman sekarang mengiklankan menggunakan media sosial lebih mudah tepat sasaran karena kebiasaan masyarakat yang tidak lepas dari gadget.

Cara-cara tersebut terbukti efektif untuk mengenalkan inovasi mereka ke masyarakat umum hal ini tidak lepas dari semua pihak baik kedinasan maupun tim support untuk mensukseskan mengenalkan inovasi tersebut ke masyarakat umum.

E. Keuntungan Penggunaan Sistem inovasi Proses Perizinan Mendirikan Bangunan dengan Telepon dan sistem Informasi Mendirikan Bangunan

Dengan adanya Sistem inovasi Proses Perizinan Mendirikan Bangunan dengan Telepon dan sistem Informasi Mendirikan Bangunan terdapat beberapa keuntungan.

Pertama, keuntungan dalam bidang biaya dan waktu, hal ini dikarenakan inovasi dalam IMB yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Semarang melalui program PRIMBON telah memangkas waktu pembuatan IMB menjadi hanya 7 hari kerja dari yang semula 14 sampai 28 hari kerja. Kecepatan pelayanan faktor yang sangat dekat dengan kepuasan penerima layanan (Pratama, 2013). Karena pada umumnya kecepatan layanan menjadi fitur eksklusif yang bisa didapatkan dengan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Namun pada inovasi IMB di Kota Semarang masyarakat bisa mendapatkan layanan yang cepat tanpa perlu mengeluarkan biaya

ekstra. Biaya pengurusan juga menjadi lebih rendah sejak diterapkannya layanan online. Penurunan biaya ini karena pemohon hanya perlu menyerahkan persyaratan pada tahap awal dan berikutnya telah tersimpan di data base dinas. Faktor efisiensi waktu ini sesuai dengan pengertian inovasi yang dikemukakan oleh Mulgan dan Albury dalam Khairul Muluk (2008), Inovasi merupakan kreasi dari proses, produk pelayanan dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil dari efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil. Apalagi dengan adanya program IMB Jemput Bola, pembuatan IMB menjadi lebih efisien. Karena masyarakat hanya perlu pergi ke titik layanan IMB Jemput Bola berada kemudian membuatnya di tempat tersebut. Sehingga masyarakat sekitar bisa sangat menghemat waktu dan biaya.

Kedua, Ketepatan waktu Program PRIMBON merupakan salah satu program yang dibuat untuk meningkatkan kualitas layanan IMB Pemutihan dan menarik minat masyarakat untuk segera membuat IMB. Dalam pelaksanaannya program ini bisa diwujudkan tepat waktu sesuai dengan namanya. Namun ketepatan tersebut dapat dicapai dengan catatan, berkas permohonan dan persyaratan yang dibutuhkan dapat langsung diproses dan tidak bermasalah. Hal tersebut bisa mempengaruhi ketepatan waktu dari program tersebut. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat yang ingin membuat IMB supaya mengecek kembali kelengkapan berkas dan persyaratan.

Ketiga, Melalui inovasi juga, masyarakat semakin dimudahkan dengan adanya beberapa perubahan pada persyaratan pembuatan IMB. Untuk IMB Pemutihan sendiri persyaratan yang ditentukan sangat fleksibel dan mempermudah pemohon. Seperti sketsa bangunan yang disyaratkan tidak memerlukan software khusus melainkan gambar tangan saja. Pemohon juga bisa bertanya kepada petugas loket apabila mengalami kesulitan dalam menggambar. Inovasi tersebut sangat memudahkan masyarakat dibanding harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa jasa penggambar apabila jasa itu diperlukan.

F. Faktor Penghambat Inovasi Penggunaan Sistem inovasi Proses Perizinan Mendirikan Bangunan dengan Telepon dan sistem Informasi Mendirikan Bangunan

Pertama, Layanan yang dibutuhkan untuk Sistem Online di Kabupaten Sragen membutuhkan kondisi jaringan yang stabil untuk mendukung proses pembuatan IMB. Bahkan, mulai dari proses registrasi sampai dengan cek status perizinan sudah menerapkan sistem online tersebut. Hal ini tentu saja merupakan kemajuan yang sangat positif dalam perizinan IMB di Kabupaten Sragen. Namun penerapan online tidak dapat dipastikan selalu berjalan mulus. Ada kalanya server mengalami gangguan yang menyebabkan koneksi internet terputus. Apabila hal tersebut terjadi tentu saja akan mengganggu proses pembuatan IMB yang sedang berlangsung.

Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan IMB adalah izin yang mengatur bagaimana sebuah bangunan seharusnya berdiri dari sisi teknis sekaligus administrasi sesuai Perda Bangunan Gedung. Untuk melaksanakannya diperlukan tenaga yang memiliki keilmuan dalam teknis bangunan. Tim yang dibuat untuk melaksanakan inovasi jemput bola seharusnya juga memiliki kompetensi serupa. Tetapi dengan pemusatan tugas seperti di atas terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaan inovasi IMB akan bergantung pada tim yang bertugas. Apabila terjadi demikian saat ada salah satu dari tim tersebut yang berhalangan proses pembuatan IMB akan berjalan tidak maksimal. Tentunya hal tersebut akan kembali berakibat pada ketidakpuasan masyarakat.

Ketiga, Sarana Pendukung untuk menerapkan kedua inovasi ini inovasi IMB Pemutihan dengan metode telepon dan sistem online dan memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang mengurus perizinan Kota Semarang dan kabupaten Sragen telah membentuk tim yang bertugas pada titik-titik dimana pemilik IMB-nya masih kurang. Pembentukan tim ini didukung dengan sarana penunjang operasional selama mereka melakukan pelayanan IMB jemput bola dan sistem online.

Namun untuk saat ini sarana dan prasarana yang ada hanya satu mobil operasional dan satu set komputer untuk membuat IMB. Satu perangkat tersebut masih dirasa kurang karena hanya mampu menjangkau satu titik dalam satu hari. Belum lagi jika mobil atau komputernya bermasalah

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Inovasi yang dilakukan di kota Semarang dan kabupaten Sragen telah dilakukan dengan baik, kesimpulan ini berdasar pada perizinan dan observasi yang dilakukan penulis. Dari observasi dan pengamatan tersebut penulis lalu menguraikan prosedur pembuatan, kemudian berbagai inovasi yang dilakukan dinas, serta keuntungan inovasi dan faktor yang menghambat pelaksanaan inovasi tersebut. Diharapkan dengan mengidentifikasi hal tersebut di atas turut meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan perizinan IMB di Kota Semarang dan kabupaten Sragen.

Saran untuk pemerintah daerah kota Semarang dan kabupaten Sragen agar selalu melakukan evaluasi berjangka, hal ini bertujuan agar inovasi tersebut dapat berfungsi dengan semestinya sehingga dapat tercapai dalam mempercepat proses perizinan mendirikan bangunan, kemudian untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan di kota-kota yang terpelosok dengan sistem yang kurang memadai, agar tau masalah apa yang menghambat perizinan disana

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan penulis kepada DPMPTSP Kota Semarang, DPMPTSP kabupaten Gresik, kepala tata ruang kota Semarang, kepala tata ruang kabupaten Sragen, Masyarakat dari kedua kota yang akan mengurus IMB, pembuat sistem Aplikasi, dan semua pihak yang terlibat tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan agar artikel ini dapat menjadi lebih baik

V. DAFTAR PUSTAKA

Andi Irawan. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan

- Bangunan di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Semarang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Sragen
Erfa, R. E. M., & Meilani, N. L. (2014). Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(3), 293-298.
Khairul Muluk. (2008). *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia.
Mareci Susi Afrisca Sembiring. (2015). Efektivitas Advis Planning dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Pematangsiantar. *E-Journal UAJY*.
Norma Vita Utami. (2013). Pelayanan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sleman (Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Nurul Amalia. (2015). Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar.
Rizki Pratama. (2013). Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Nilai Tambah (Value Added) Inovasi Pelayanan Perizinan Bagi Masyarakat Di Kota Kediri). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(2)
Septi Orlandina. (2015). Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak. *PubliKA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(3).



***Korespondensi**

Email : adisuhendra.pm@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INOVASI PERIKANAN

**(STUDI PENELITIAN PADA KABUPATEN BANGKA
TENGAH, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, DAN
KABUPATEN BANGGAI)**

Adi Suhendra

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri |
Jl. Kramat Raya No.132, RT.1/RW.9, Kenari, Kec. Senen, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430

Disetujui: 30 Januari 2021

Abstract

The fisheries sector has a role and potential as the main driver of Indonesia's national economy. Innovation is the key to success in increasing competitiveness (Barney, 2002; Molina Castillo and Munuera-Aleman 2009; Shapiro, 2002; Rogers, 2003). This study aims to analyze regional innovation in fisheries as a strategy for quality change implemented in three districts, namely Central Bangka Regency, East Belitung Regency and Banggai Regency. In this study, the authors used qualitative research methods. The population in this study are districts that have made innovations in their regions, while the samples in this study are innovations carried out by Central Bangka Regency, East Belitung Regency, and Banggai Regency which have objectives in the field of fisheries as a strategy for quality change. The result of this research is that POKARI's innovation has had a real positive impact on the sustainability of fish farming. The result of this innovation is in the form of artificial feed, both in the form of floating (floating feed) and sinking (sinking feed). With the Profit and Safe with Mangrove (UMANG) program in the coastal village of East Belitung Regency, it can be seen that this program has made a breakthrough in increasing the knowledge and skills of coastal communities, especially fishermen's wives who previously did not have productive activities to help the family economy become productive by utilizing potential resources. And with the Banggai Exporting innovation carried out by Banggai Regency, the implementation of the first export of fishery products carried out in an integrated manner between sectors (fisheries, trade, transportation, labor, and the private sector) is an important momentum to increase the quality and empowerment of fishery production in Banggai Regency. competitiveness so that the fishery exports of Banggai Regency will continue to increase.

Keywords: Innovation, Fisheries, Development, Strategy, Local Government

Abstrak

Sektor perikanan memiliki peran dan potensi sebagai penggerak utama perekonomian nasional Indonesia. Inovasi adalah kunci sukses untuk meningkatkan daya saing (Barney, 2002; MolinaCastillo dan Munuera-Aleman 2009; Shapiro, 2002; Rogers, 2003). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi daerah dalam bidang perikanan sebagai strategi untuk perubahan berkualitas yang dilakukan di tiga kabupaten, yaitu pada Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten

Belitung Timur, dan Kabupaten Banggai. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten yang telah melakukan inovasi di daerahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Banggai yang memiliki tujuan dalam bidang perikanan sebagai strategi untuk perubahan yang berkualitas.

Hasil dari penelitian ini yaitu inovasi POKARI telah nyata memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha budidaya ikan. Hasil inovasi tersebut berupa pakan buatan, baik dalam bentuk apung (floating feed) maupun tenggelam (sinking feed). Dengan adanya program Untung dan Aman Bersama Mangrove (UMANG) di desa pesisir Kabupaten Belitung Timur, dapat dilihat bahwa program ini telah membuat terobosan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir khususnya istri-istri nelayan yang sebelumnya tidak memiliki kegiatan yang produktif untuk membantu perekonomian keluarga menjadi produktif dengan memanfaatkan sumberdaya potensial. Serta dengan adanya inovasi Banggai Mengekspor yang dilakukan oleh Kabupaten Banggai adalah terlaksananya kegiatan ekspor perdana produk perikanan yang dilakukan secara terintegratif antar sektor (perikanan, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, dan swasta) merupakan momentum penting untuk peningkatan produksi perikanan Kabupaten Banggai yang berkualitas dan berdaya saing sehingga ekspor perikanan Kabupaten Banggai akan terus meningkat.

Kata Kunci : Inovasi, Perikanan, Perkembangan, Strategi, Pemerintahan Daerah

I. PENDAHULUAN

Sektor perikanan memiliki peran dan potensi sebagai penggerak utama perekonomian nasional Indonesia. Inovasi adalah kunci sukses untuk meningkatkan daya saing (Barney, 2002; MolinaCastillo dan Munuera-Aleman 2009; Shapiro, 2002; Rogers, 2003). Pengembangan industri di Indonesia masih banyak keterbatasan dalam merancang dan menciptakan inovasi yang berkelanjutan (Dhanani, 2000). Kemajuan tidak dapat terjadi secara alami, dimana keunggulan memiliki

kekayaan sumber daya memerlukan penangan lebih lanjut. Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya alam merupakan persyaratan untuk kemajuan ekonomi.

Pengertian industri secara luas mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. (Dewantoro, 2011; Utoyo, 2011; Talib, 2018;) Secara umum, industrialisasi adalah pengembangan ke arah produksi skala besar dengan konsekuensi perubahan, misalnya dari tenaga uap ke listrik, dari manual ke mekanisasi, dari tenaga manusia ke komputer/robot dan lain-lain untuk efisiensi dan mereduksi biaya produksi. Namun demikian, industrialisasi yang dimaksudkan untuk memberikan efek positif terhadap ekonomi dan sosial, hampir selalu diikuti dengan dampak negatif terhadap sumberdaya, kerusakan lingkungan, bahkan ancaman terhadap bahaya kesehatan karena limbah dan pencemaran. Hal ini terjadi pada perkembangan industri di Eropa pada awal abad ke 19, saat terjadi perubahan dari masyarakat pertanian di pedesaan menjadi masyarakat industri di perkotaan, yang mengakibatkan meluasnya kerusakan sosial ekonomi, pengangguran (bagi yang tidak terdidik), pencemaran, dan peningkatan bahaya kesehatan (Anon., 1999 dalam Purnomo, 2011).

Menurut Satria (2002), perubahan teknologi perikanan secara antropologis sebagai suatu perubahan kebudayaan. Perubahan teknologi dapat terjadi melalui adopsi atau inovasi. Dalam suatu proses inovasi, penemuan baru seorang individu berupa alat dalam masyarakat disebut discovery, jika penemuan itu diakui dan diterima masyarakat, baru disebut invention, antara discovery dan invention membutuhkan waktu lama, karena masyarakat akan memastikan dulu kemanfaatan suatu temuan teknologi baru tersebut. (Nurhayati, 2018)

Pemerintah Indonesia, yang adalah hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah menyatakan ambisi kebijakan industrialisasi untuk menjadi negara produsen perikanan terbesar di dunia. Industrialisasi bidang kelautan dan perikanan dipandang sebagai bagaian yang diperlukan dengan terus meningkatkan kemampuan lebih efektif (CBI, 2012). Tantangan pengembangan industri

perikanan terkait dengan sektor hulu dan hilir dimulai dari produksi hingga pemasaran. (Yusuf, 2017)

Biaya pakan ikan yang tinggi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kalangan pembudidaya ikan di Kabupaten Bangka Tengah. Tingginya harga pakan ikan komersil di Kabupaten Bangka Tengah mencapai Rp. 9.000 sd. Rp. 13.000 /kg telah menyebabkan biaya operasional usaha budidaya ikan semakin meningkat, sehingga pembudidaya ikan mengalami kerugian. Imbasnya, usaha tersebut tutup dan gulung tikar. Banyak kolam ikan di masyarakat yang mangkrak dan dibiarkan tidak terkelola. Untuk biaya produksi, pemberian pakan pabrikan setidaknya memangkas sekitar 80% dari total biaya produksi itu sendiri, hal ini membuat para pembudidaya ikan kewalahan dalam menyiasati operasional pakan ikan. Hal ini mendorong masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah untuk melakukan inovasi bernama POKARI (Produksi Pakan Ikan Mandiri).

Tak hanya di Kabupaten Bangka Tengah saja, Kabupaten Belitung Timur merupakan Kabupaten kepulauan yang mempunyai luas daratan sebesar 2.506,91 km², sedangkan luas wilayah laut sebesar 15.461,03 km² dengan panjang garis pantai 430 km dan memiliki 141 pulau-pulau kecil. Wilayah administratif Kabupaten Belitung Timur terdiri atas 7 kecamatan yaitu Kecamatan Manggar, Damar, Kelapa Kampit, Renggiang, Gantung, Simpang Pesak dan Dendang. Enam dari tujuh kecamatan tersebut merupakan kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Manggar, Damar, Kelapa Kampit, Gantung, Simpang Pesak dan Dendang dengan 26 Desa Pesisir. Kondisi tersebut membuat Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi yang sangat besar disektor kelautan, perikanan dan pesisir khususnya ekosistem mangrove yang memiliki luas sebesar 19.418,1 ha. Besarnya potensi ekosistem mangrove di desa pesisir Kabupaten Belitung Timur belum dimanfaatkan sama sekali oleh masyarakat pesisir. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat pesisir sebenarnya telah membentuk kelompok binaan yang mengolah ikan menjadi beberapa produk seperti kerupuk, bakso dan empek-empek. Namun bahan baku ikan segar untuk membuat produk tersebut seperti ikan tenggiri masih tergantung musiman. Hal ini pula mendorong masyarakat Kabupaten

Belitung Timur untuk melakukan inovasi bernama Inovasi UMANG (Untung dan Aman Bersama Mangrove).

Kabupaten Banggai pun tak kalah bagus, dimana kabupaten Banggai ini memiliki sebuah inovasi bernama Inovasi Banggai Mengekspor. Tujuan adanya inovasi Banggai Mengekspor yang dilakukan oleh Kabupaten Banggai adalah terlaksananya kegiatan ekspor perdana produk perikanan yang dilakukan secara terintegratif antar sektor (perikanan, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, dan swasta) merupakan momentum penting untuk peningkatan produksi perikanan Kabupaten Banggai yang berkualitas dan berdaya saing sehingga ekspor perikanan Kabupaten Banggai akan terus meningkat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi daerah dalam bidang perikanan sebagai strategi untuk perubahan berkualitas yang dilakukan di tiga kabupaten, yaitu pada Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Banggai.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi (self-reflection) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian lain yang dibuat sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten yang telah melakukan inovasi di daerahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Banggai yang memiliki tujuan

dalam bidang perikanan sebagai strategi untuk perubahan yang berkualitas.

III. HASIL PENELITIAN

A. Inovasi Pokari (Produksi Pakan Ikan Mandiri) Pada Kabupaten Bangka Tengah

Biaya pakan ikan yang tinggi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kalangan pembudidaya ikan di Kabupaten Bangka Tengah. Tingginya harga pakan ikan komersil di Kabupaten Bangka Tengah mencapai Rp. 9.000 sd. Rp. 13.000 /kg telah menyebabkan biaya operasional usaha budidaya ikan semakin meningkat, sehingga pembudidaya ikan mengalami kerugian. Imbasnya, usaha tersebut tutup dan gulung tikar. Banyak kolam ikan di masyarakat yang mangkrak dan dibiarkan tidak terkelola. Untuk biaya produksi, pemberian pakan pabrikan setidaknya memangkas sekitar 80% dari total biaya produksi itu sendiri, hal ini membuat para pembudidaya ikan kewalahan dalam menyiasati operasional pakan ikan. Dalam kegiatan usaha budidaya, tidak sedikit dari para pembudidaya yang beralih ke pakan alternatif demi menutupi biaya pakan yang semakin tinggi, misalnya pakan pabrikan yang diganti ke pakan alternatif seperti ikan kering, ikan rucah, usus ayam, serta limbah sisa makanan. Namun pemberian pakan seperti ini tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan, mengingat pakan alternatif seperti itu akan berdampak pada menurunnya kualitas dari ikan itu sendiri karena tidak diketahui secara pasti berapa kadar nutrisi dalam pakan alternatif tersebut, sehingga tidak diketahui secara pasti dampak terhadap pertumbuhan ikan dan berdampak kepada pencemaran lingkungan perairan budidaya.

Kegiatan inovasi POKARI bermula dari pengaduan dan laporan pelaku usaha perikanan (pembudidaya ikan) di Kabupaten Bangka Tengah yang mengeluhkan permasalahan tentang tingginya biaya pakan ikan. Keluhan ini disampaikan oleh para pembudidaya ikan kepada para penyuluh perikanan di hampir tiap masing-masing wilayah binaan di Kabupaten Bangka Tengah. Tidak hanya biaya pakan yang menjadi kendala utama, namun kendala modal pun turut menjadi masalah dalam inisiatif ini, mengingat sebagian pelaku usaha (pembudidaya ikan) di

Kabupaten Bangka Tengah merupakan masyarakat dengan status ekonomi menengah ke bawah, sehingga tidak sanggup membeli pakan ikan komersil.

Keluhan dan aspirasi masyarakat pembudidaya ikan tersebut selanjutnya disampaikan kepada instansi teknis yakni Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, dan selanjutnya menjadi pekerjaan rumah bagi instansi tersebut untuk mencari solusinya. Dari beberapa masalah dan kendala tersebut, maka Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah berinisiatif mendorong Kelompok Pembudidaya Ikan (pokdakan) untuk membuat pakan buatan sendiri. Pembuatan pakan mandiri tersebut pertama kali dilakukan pada Tahun 2014 oleh kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) Bina Lestari Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah. Pembuatan pakan ikan tersebut masih bersifat uji coba dan menggunakan mesin sederhana.

Beberapa permasalahan yang dapat dirangkum dari kegiatan usaha budidaya air tawar di Kabupaten Bangka Tengah terkait masalah pakan yaitu : 1. Ketergantungan dan tingginya harga pakan ikan komersil buatan pabrik. 2. Potensi bahan baku dan sumberdaya ikan lokal yang melimpah, namun belum termanfaatkan secara optimal. 3. Minimnya pengetahuan, teknologi dan keterampilan kelompok pembudidaya ikan tentang teknik pembuatan pakan ikan yang baik dan benar. 4. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan sehingga kapasitas dan kemampuan para pembudidaya ikan untuk membuat pakan ikan masih rendah. Beberapa kondisi inilah yang melatarbelakangi hadirnya Inovasi Produksi Pakan Mandiri (POKARI) di Kabupaten Bangka Tengah sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha budidaya perikanan di kalangan masyarakat pembudidaya ikan.

Program Pakan Mandiri di Kabupaten Bangka Tengah telah memberikan inovasi dan terobosan baru dalam pengembangan sumberdaya dan teknologi di Kabupaten Bangka Tengah. Inovasi POKARI bertujuan agar pembudidaya ikan mampu membuat pakan ikan mandiri berkualitas baik, berbiaya murah, memenuhi syarat kecukupan nutrisi ikan, mudah dilakukan dan ramah lingkungan. Hasil akhir inovasi tersebut adalah meningkatnya efisiensi usaha dan

keberlanjutan usaha budidaya ikan yang terjaga dengan baik.

Inovasi POKARI memiliki pengaruh signifikan dan manfaat bagi para pembudidaya ikan di Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut : (1). Manfaat pengembangan usaha budidaya ikan (nilai ekonomi) Inovasi POKARI terbukti efektif dalam mengurangi ketergantungan pakan pabrikan (pakan komersil), meningkatkan daya saing melalui peningkatan mutu pakan, terpenuhinya kebutuhan pakan ikan bagi pokdakan secara mandiri, dan mengurangi biaya produksi hingga 30-50%. (2). Manfaat publik (nilai sosial) Inovasi POKARI merupakan salah satu referensi atau percontohan dalam pengembangan teknologi perikanan bagi Pokdakan lain di Kabupaten Bangka Tengah pada khususnya dan Provinsi Kep. Bangka Belitung pada umumnya. Selain itu, inovasi tersebut mudah diterapkan/direplikasi oleh pembudidaya ikan lainnya di Kabupaten Bangka Tengah maupun pembudidaya ikan di kabupaten lainnya. Perlu disampaikan bahwa beberapa kabupaten / kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan studi banding ke Kabupaten Bangka Tengah untuk mempelajari inovasi pakan mandiri tersebut, dan menjadi contoh / referensi. Seperti Kabupaten Bengkulu Selatan (2017), Kabupaten Bandung Barat (2017), Kabupaten Bangka (2018) dan Kota Pangkalpinang (2018). (3). Manfaat lingkungan (nilai ekologi) Inovasi POKARI mampu memanfaatkan sumber daya ikan lokal yang tersedia di perairan Kepulauan Bangka Belitung menjadi bahan baku dalam pembuatan pakan ikan. Selain itu inovasi POKARI juga menggunakan limbah buangan hasil olahan ikan seperti kulit ikan/udang dan kepala udang sebagai bahan baku pakan mengandung protein hewani, sehingga limbah lingkungan menjadi berkurang (zero waste). Inovasi POKARI Kabupaten Bangka Tengah diyakini memiliki keberlanjutan dan impact mengikuti trend usaha budidaya perikanan. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan usaha budidaya ikan sebagai solusi ekonomi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung era pasca timah. Keberlanjutan inovasi pakan mandiri diyakini mampu bersaing dan berkompetisi dengan pakan komersil yang dihasilkan oleh pabrik.

Inovasi POKARI telah nyata memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha budidaya ikan. Hasil inovasi tersebut berupa pakan buatan, baik dalam bentuk apung (floating feed) maupun tenggelam (sinking feed). Berdasarkan hasil kajian lapangan yang dilakukan oleh salah satu kelompok pengelola pakan mandiri yaitu Pokdakan Bina Lestari di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpangkatis, bahwa penggunaan pakan ikan mandiri untuk budidaya ikan patin mampu menghasilkan laju pertumbuhan ikan yang baik dan FCR (konversi pakan) mencapai 1:1,2. Nilai FCR tersebut artinya untuk menghasilkan 1 kg daging ikan patin dapat menggunakan 1,2 kg pakan ikan pakan mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas dari pakan mandiri tersebut sama baiknya dengan pakan komersil buatan pabrik. Secara singkat, inovasi POKARI Kabupaten Bangka Tengah memiliki hasil dan keunggulan sebagai berikut : (1). Pakan mandiri yang dihasilkan berkualitas baik dan mencukupi kebutuhan nutrisi ikan. Dengan bahan baku ikan lokal, maka kandungan protein cukup tinggi mencapai 28-32%. (2). Pakan mandiri dapat dibuat, diterapkan dan dihasilkan oleh pembudidaya ikan, meskipun dengan teknik yang sederhana. (3). Biaya pakan ikan mandiri lebih murah, yakni Rp. 4.500, 00 sd Rp. 6.000, 00/kg. Kondisi tersebut berbanding jauh dengan pakan ikan komersil buatan pabrik yang mencapai harga Rp. 9.000, 00 sd Rp. 13.000, 00/kg. Bila dihitung lebih lanjut, inovasi pakan mandiri mampu meningkatkan efisiensi usaha mencapai 70-80%. (4). Memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia di lingkungan sekitar. Beberapa jenis ikan rucah yang dianggap sampah dan limbah (waste) dapat digunakan sebagai bahan baku pakan mandiri. Contohnya : kepala udang dan ikan rucah.

B. Inovasi UMANG (Untung Dan Aman Bersama Mangrove) Pada Kabupaten Belitung Timur

Kabupaten Belitung Timur merupakan Kabupaten kepulauan yang mempunyai luas daratan sebesar 2.506,91 km², sedangkan luas wilayah laut sebesar 15.461,03 km² dengan panjang garis pantai 430 km dan memiliki 141 pulau-pulau kecil. Wilayah administratif Kabupaten Belitung Timur terdiri atas 7 kecamatan yaitu Kecamatan Manggar, Damar,

Kelapa Kampit, Renggiang, Gantung, Simpang Pesak dan Dendang. Enam dari tujuh kecamatan tersebut merupakan kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Manggar, Damar, Kelapa Kampit, Gantung, Simpang Pesak dan Dendang dengan 26 Desa Pesisir. Kondisi tersebut membuat Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi yang sangat besar disektor kelautan, perikanan dan pesisir khususnya ekosistem mangrove yang memiliki luas sebesar 19.418,1 ha.

Besarnya potensi ekosistem mangrove di desa pesisir Kabupaten Belitung Timur belum dimanfaatkan sama sekali oleh masyarakat pesisir. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat pesisir sebenarnya telah membentuk kelompok binaan yang mengolah ikan menjadi beberapa produk seperti kerupuk, bakso dan empek-empek. Namun bahan baku ikan segar untuk membuat produk tersebut seperti ikan tenggiri masih tergantung musiman. pada musim barat dengan kondisi gelombang tinggi mengakibatkan nelayan tidak banyak yang bisa melaut sehingga ketersediaan ikan di pasar sedikit, pasokan ikan untuk bahan baku pengolahan mengalami penurunan drastis sehingga mempengaruhi produksi berbagai jenis olahan ikan (produksi menjadi menurun). Untuk itu perlu bahan alternatif yang ada disekitar lingkungan desa pesisir yang bisa menjadi sumber ekonomi baru yaitu dengan memanfaatkan dan mengolah mangrove menjadi produk kreatif seperti batik mangrove dan olahan makanan/jajanan mangrove sehingga masyarakat pesisir dapat memperoleh penghasilan tambahan pada saat musim paceklik (Musim Barat).

Sejak beberapa tahun terakhir setelah dievaluasi dapat disimpulkan berbagai faktor permasalahan didesa pesisir yang dapat diuraikan sebagai berikut: kurangnya wawasan dan kreatifitas masyarakat didesa pesisir terutama untuk Ibu-Ibu (istri para nelayan) untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam membantu suami mereka yang berprofesi sebagai nelayan dengan waktu efektif melaut sekitar 7-8 bulan dalam 1 tahun, kurangnya inovasi dan kreasi untuk memanfaatkan bahan-bahan yang tidak memiliki nilai ekonomis untuk menghasilkan produk baru yang ekonomis dan memiliki daya tarik yang sangat tinggi, kurangnya ilmu kewirausahaan dan pemasaran produk yang

telah dihasilkan, serta kurangnya pengetahuan mengenai pelestarian ekosistem mangrove dengan pemanfaatan berkelanjutan di lingkungan pesisir.

Mengingat permasalahan yang dihadapi didesa pesisir sebagai pemanfaat potensi sumberdaya pesisir yang begitu beragam dan kompleks, salah satunya dalam bidang ekonomi dan pelestarian ekosistem mangrove di desa pesisir. Peluang wirausaha kreatif dan inovasi yang berbasis konservatif menjadi suatu program perubahan yang sangat penting dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu dilakukan suatu program untuk mendukung wirausaha kreatif dan inovasi berbasis konservatif melalui kegiatan "Untung dan Aman bersama Mangrove" di desa pesisir Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat pesisir Indonesia khususnya di desa pesisir Kabupaten Belitung Timur, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan tambahan selain dari hasil melaut dengan tetap menjaga lingkungan (ekosistem mangrove) yang merupakan ekosistem penting di wilayah pesisir agar tetap lestari.

Manfaat utama yang dihasilkan yaitu (1). Masyarakat pesisir memiliki pengetahuan terkait peranan penting ekosistem mangrove di wilayah pesisir. (2). Masyarakat pesisir khususnya istri-istri nelayan mengetahui bahwa, selain ekosistem mangrove berperan penting dalam kehidupan, ternyata buahnya bisa dimanfaatkan untuk dijadikan produk-produk ekonomis seperti batik, dan berbagai olahan pangan. (3). Meningkatkan pemberdayaan perempuan yang hidup di wilayah pesisir guna meningkatkan perekonomian mereka. (4). Terbentuknya kelompok/komunitas dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak memiliki nilai ekonomis menjadi memiliki nilai ekonomis sebagai alternatif penghasilan tambahan. (5). Menciptakan produk unggulan desa yang khas dan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang tidak bernilai menjadi produk-produk yang bernilai ekonomis yang dapat mendukung sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.

Dengan adanya program Untung dan Aman Bersama Mangrove (UMANG) di desa pesisir Kabupaten Belitung Timur, khususnya di Desa Mekar Jaya dan Desa Buding dapat dilihat bahwa program ini telah membuat terobosan dalam meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan masyarakat pesisir khususnya istri-istri nelayan yang sebelumnya tidak memiliki kegiatan yang produktif untuk membantu perekonomian keluarga menjadi produktif dengan memanfaatkan sumberdaya potensial yaitu mangrove yang tidak memiliki nilai ekonomis sebelumnya menjadi produk-produk bernilai ekonomis sebagai produk unggulan yang menjadi ciri khas daerah mereka. Dengan program ini masyarakat pesisir juga tahu bahwa ekosistem mangrove perlu dijaga kelestariannya karena selain memiliki fungsi ekologis, mangrove juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk unggulan sehingga hal ini bisa menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan yang berkelanjutan berbasis konservatif.

C. Inovasi Banggai Mengekspor Pada Kabupaten Banggai

Sebagai daerah yang memiliki sebagian besar wilayah pesisir menjadikan Kabupaten Banggai memiliki potensi kelautan yang cukup banyak hal ini dapat dilihat dari banyaknya jenis perikanan yang ada di kabupaten banggai dengan permasalahan masih rendahnya nilai ekspor hasil perikanan kabupaten banggai, masih kurangnya daya saing hasil perikanan kabupaten banggai, masih kurangnya kesejahteraan para nelayan utamanya persoalan harga hasil produk perikanan, serta masih kurangnya jalur pemasaran untuk produk hasil perikanan kabupaten banggai.

Tujuan adanya inovasi Banggai Mengekspor yang dilakukan oleh Kabupaten Banggai adalah terlaksananya kegiatan ekspor perdana produk perikanan yang dilakukan secara terintegratif antar sektor (perikanan, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, dan swasta) merupakan momentum penting untuk peningkatan produksi perikanan Kabupaten Banggai yang berkualitas dan berdaya saing sehingga ekspor perikanan Kabupaten Banggai akan terus meningkat. Serta manfaat yang dirasakan yaitu adanya Peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten banggai dan menjadi daerah ke 4 dikawasan timur indonesia sebagai pintu ekspor hasil perikanan.

Hasil dari dilaksanakannya inovasi ini yaitu Pemerintah Kabupaten Banggai resmi mengekspor perdana hasil laut Kerapu Hidup (Live Grouper) melalui jalur transportasi udara

Bandara Syukuran Aminuddin Amir ke Hongkong pada tanggal 14 Februari 2017 sebanyak 45 Kilo. Setelah sukses dengan ekspor komoditi perikanan melalui bandara, Pemerintah Kabupaten Banggai melakukan ekspor perdana lagi hasil laut melalui Pelabuhan Luwuk ke Hongkong pada tanggal 14 Maret 2017 dengan eksportir Indotropic Fishery dengan produk ekspor Fillet Ikan Kakap, Suntung Batu, Suntung Bunga, dan Gurita sebanyak 11 ton. Semangat mengekspor terus berlanjut dengan Launcing ekspor perdana melalui Pelabuhan Tangkiang ke Los Angles pada tanggal 29 Maret 2017 dengan eksportir Banggai Indo Gemilang (BIG) dengan produk ekspor Octopus Ball sebanyak 17,8 ton.

D. Elemen-Elemen Pokok Dalam Proses Difusi Inovasi

Proses difusi inovasi terdapat empat elemen pokok, yaitu: (1). Inovasi merupakan gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang, dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu dan kelompok yang menerimanya; (2). Saluran komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima pesan, dalam memilih saluran komunikasi, sumber perlu memperhatikan hal hal sebagai berikut yaitu: tujuan diadakannya komunikasi dan karakteristik penerima komunikasi. Jika sasaran komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal; (3). Jangka waktu merupakan proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan ini sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan keputusan inovasi, keinovatifan seseorang, relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan kecepatan pengadopsian inovasi; (4). Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama

untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama, (Rogers, 2003).

Terdapat lima tahapan dalam proses adopsi inovasi yaitu tahap kesadaran, minat, penilaian, percobaan dan penerimaan. Berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses adopsi dari tahapan di atas, terdapat lima golongan yaitu golongan pelopor atau sering disebut dengan inovator, golongan pengetrap awal disebut dengan early adopter, golongan pengetrap awal dalam jumlah yang banyak disebut eraly majority, pengetrap akhir disebut dengan late majority dan golongan penolak disebut dengan laggard. (Nurhayati, 2018)

IV. KESIMPULAN

Pengembangan industri di Indonesia masih banyak keterbatasan dalam merancang dan menciptakan inovasi yang berkelanjutan (Dhanani, 2000). Inovasi POKARI telah nyata memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha budidaya ikan. Hasil inovasi tersebut berupa pakan buatan, baik dalam bentuk apung (floating feed) maupun tenggelam (sinking feed). Berdasarkan hasil kajian lapangan yang dilakukan oleh salah satu kelompok pengelola pakan mandiri yaitu Pokdakan Bina Lestari di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpangkatis, bahwa penggunaan pakan ikan mandiri untuk budidaya ikan patin mampu menghasilkan laju pertumbuhan ikan yang baik dan FCR (konversi pakan) mencapai 1:1,2. Nilai FCR tersebut artinya untuk menghasilkan 1 kg daging ikan patin dapat menggunakan 1,2 kg pakan ikan pakan mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas dari pakan mandiri tersebut sama baiknya dengan pakan komersil buatan pabrik.

Dengan adanya program Untung dan Aman Bersama Mangrove (UMANG) di desa pesisir Kabupaten Belitung Timur, khususnya di Desa Mekar Jaya dan Desa Buding dapat dilihat bahwa program ini telah membuat terobosan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir khususnya istri-istri nelayan yang sebelumnya tidak memiliki kegiatan yang produktif untuk membantu perekonomian keluarga menjadi produktif dengan memanfaatkan sumberdaya potensial yaitu mangrove yang tidak memiliki nilai ekonomis sebelumnya menjadi produk-produk bernilai ekonomis sebagai produk

unggulan yang menjadi ciri khas daerah mereka.

Tujuan adanya inovasi Banggai Mengekspor yang dilakukan oleh Kabupaten Banggai adalah terlaksananya kegiatan ekspor perdana produk perikanan yang dilakukan secara terintegratif antar sektor (perikanan, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, dan swasta) merupakan momentum penting untuk peningkatan produksi perikanan Kabupaten Banggai yang berkualitas dan berdaya saing sehingga ekspor perikanan Kabupaten Banggai akan terus meningkat. Serta manfaat yang dirasakan yaitu adanya Peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten banggai dan menjadi daerah ke 4 dikawasan timur indonesia sebagai pintu ekspor hasil perikanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, sehingga penelitian dapat selesai dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya.
- Talib, A. (2018). Peluang dan tantangan industri teknologi pengolahan hasil perikanan dalam mendukung terwujudnya lumbung ikan nasional (LIN) di Maluku Utara. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 11(1), 19-27.
- Poernomo, A., & Heruwati, E. S. (2011). *Industrialisasi Perikanan: Suatu Tantangan Untuk Perubahan*.
- Nurhayati, A., & Herawati, T. (2018). Analisis Faktor Adopsi Inovasi Perikanan Budidaya Karamba Jaring Apung di Waduk Cirata Analysis of Innovation Adoption Factors of Floating Net Cage Aquaculture in Cirata Reservoir. *Jurnal Penyuluhan*, 14(2).
- Satria, A. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Nurhayati, A. 2013. *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pengelolaan Perikanan Budidaya Air Tawar Melalui Sistem Karamba Jaring Apung*. Proseding Semnaskam UGM 2013.

- Yusuf, M. (2017). Strategi Inovasi, Pengembangan Produk dan Orientasi Pasar pada Industri Perikanan: Sebuah Road Map dan Desain Penelitian. In Prosiding Seminar Nasional & Internasional (Vol. 1, No. 1).
- Barney, J.B. (2002) Gaining and sustaining competitive advantage, 2 nd edition, Prentice-Hall, New Jersey.
- Molina-Castillo, F-J and MUNUERA-ALEMAN J-L. (2009) The joint impact of quality and innovativeness on short-term new product performance. *Industrial Marketing Management*, 38(8), pp. 984–993.
- Shapiro, S.M. (2002) Innovation: A blue print for surviving and thriving in age of change. New York: Donnelly and Sons Company.
- Rogers, E.T. (2003) Diffusion of Innovations, 5th edition. New York: Free Press.
- Dhanani, S. (2000) Indonesia: Strategy for Manufacturing Competitiveness. Vol. II. Main report United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) UNDP, Jakarta, Indonesia.
- CBI (2012) The Indonesian seafood sector: A value chain analysis. CBI Report, Wageningen.
- Dewantoro, B. 2011. http://bagusdewan.blogspot.com/2011/04/definisi_industri.html. Diakses pada tanggal 2 Januari 2011.
- Utoyo, B. 2011. Pengertian dan Definisi Industri. [http:// carapedia.com/pertian/definisi_info2063.html](http://carapedia.com/pertian/definisi_info2063.html). Diakses pada tanggal 2 Januari 2011.



***Korespondensi**

Email¹ : riksapraba@gmail.com

Email² : ranty.purnama@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

INOVASI TEKNOLOGI DALAM DALAM PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK PERKOTAAN

**(Studi Inovasi Daerah di Kota Bekasi dan Kabupaten
Gresik)**

**Muhammad Riksa Praba Haskara^{1*}, Ranty
Purnamasari^{2*}**

^{1,2} Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi | Jl. Jend. Ahmad Yani No.1,
RT.001/RW.005, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat
17144

Disetujui: 30 Januari 2021

Abstract

Innovation is seen as a necessity because it can solve the problem of bureaucratic pathology, improve the quality of public services, maximize the potential of the apparatus, and restore public trust. Innovation is also influenced by the rapid development of information technology. This study aims to analyze the innovations carried out by Kota Bekasi and Kabupaten Gresik which have a purposeto realize an idea or creative thinking, which is related to technology as a breakthrough to facilitate performance. This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research that aims to find out more deeply the facts about innovation. The population in this study are cities that have made innovations related to public services, while the samples in this study are innovations made by Bekasi City and Gresik City. This research shows that Kota Bekasi and Kabupaten Gresik succeeded in creating innovations in the field of public services, where in these two cities have created an idea or creative thinking, which is related to technology as a breakthrough to facilitate performance. The results of the innovation of the SIAP PPDB Online Service in Bekasi City, including Without Installation & Cloud-Based, Multi Platform & Multi Access, Responsive Design, Multi Registration Flow Model, Multi Line Selection, Real Time Process, so it can manage prospective student data automatically. and immediately every time starting from the registration process, selection to announcement of results. Meanwhile, the results of the e-Planning Application in Gresik Regency have the objective of implementing planning using Web-based information technology that is integrated and user friendly, aligning / integrating medium-term strategic planning into annual planning, mapping program proposals and activities from DPRD, Leadership Elements. and planning documents that have been determined, compiling a budget work plan quickly and accurately, and integrating planning, budget execution, through to monitoring and evaluation.

Keywords: Innovation, Urban, Creative Ideas, Government, Technology

Abstrak

Inovasi dipandang sebagai kebutuhan karena dapat mengatasi masalah patologi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi aparatur, serta mengembalikan kepercayaan publik. Inovasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan

Kabupaten Gresik yang memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu ide atau pemikiran kreatif, yang berkaitan dengan teknologi sebagai terobosan untuk mempermudah kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam fakta-fakta mengenai inovasi. Populasi dalam penelitian ini adalah kota yang pernah melakukan inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kabupaten Gresik. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi dan Kabupaten Gresik berhasil untuk menciptakan inovasi pada bidang pelayanan publik, dimana pada kedua kota ini telah menciptakan suatu ide atau pemikiran kreatif, yang berkaitan dengan teknologi sebagai terobosan untuk mempermudah kinerja. Hasil dari adanya inovasi Layanan SIAP PPDB Online di Kota Bekasi, yaitu diantaranya Tanpa Instalasi & Berbasis Cloud, Multi Platform & Multi Akses, Responsive Design, Multi Model Alur Pendaftaran, Multi Jalur Seleksi, Real Time Process, sehingga dapat mengelola data calon siswa secara otomatis dan langsung setiap waktu mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil. Sedangkan, hasil dari adanya Aplikasi e-Planning di Kabupaten Gresik mempunyai tujuan untuk menerapkan perencanaan menggunakan teknologi informasi berbasis Web yang terintegrasi dan user friendly, menyelaraskan/mengintegrasikan perencanaan strategis jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan, memetakan usulan program dan kegiatan dari DPRD, Unsur Pimpinan dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, menyusun rencana kerja anggaran dengan cepat dan tepat, serta mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan anggaran, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci : Inovasi, Perkotaan, Ide Kreatif, Pemerintah, Teknologi

I. PENDAHULUAN

Lima huruf yang dirangkai menjadi satu kata, yang sering diketemukan dalam khasanah Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berpendekatan New Public Management, adalah inovasi. Sejak kepercayaan terhadap

organisasi publik melemah drastis gara-gara inefisiensi organisasi publik yang terus menurun tajam dan terjadinya krisis multi aspek yang berkepanjangan serta fenomena globalisasi yang terus berkecamuk dan mewabah, inovasi menjadi kunci utama dalam pemecahan masalah. Semakin kompleksnya masyarakat, baik kualitatif maupun kuantitatif, memaksa birokrasi pemerintah memasuki ke hampir seluruh lini kehidupan masyarakat. Ini berarti, walaupun ada kecenderungan semakin menguatnya partai politik dan legislatif, peran birokrasi semakin penting. Justru kondisi ini yang memungkinkan bahkan mengharuskan peran birokrasi semakin mengedepan (*bureaucratic heavy*). Dimana, keberadaan birokrasi dalam masyarakat harus selalu dalam koridor menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan zamannya. (Noor, 2013: 1) Tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif. (Cordella & Tempini, 2015; Kettl, 2015) Dalam rangka itulah, maka negara membangun suatu sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. (Yusriadi & Misnawati, 2017: 100)

Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah modernisasi manajemen kepegawaian, restrukturisasi, downsizing dan rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi, rekayasa proses administrasi pemerintahan, anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif, serta hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. (Prasojo & Kurniawan, 2008: 2)

Salah satu cara mengatasi masalah birokrasi adalah dengan "inovasi". (Andhika, 2017: 50). Pasalnya, inovasi dipandang sebagai kebutuhan karena dapat mengatasi masalah patologi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi aparatur, serta mengembalikan kepercayaan publik. Inovasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat. (Sofianto, 2019: 100) Pendapat yang dikemukakan oleh (Banerjee, B., & Ceri, 2015; Černe et al., 2013) menyatakan bahwa menumbuhkan budaya inovasi dan memunculkan ide-ide kreatif yang dilakukan

oleh pimpinan dapat menjadi motivasi aparatur birokrasi untuk mulai berpikir tentang ide-ide baru. Berbagai pandangan seperti (Crivits et al., 2014; Uslu, 2015) menguraikan, inovasi pada pemerintah bertujuan hanya untuk menyelesaikan masalah birokrasi (patologi birokrasi). Inovasi pada bidang pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu ide atau pemikiran kreatif, yang berkaitan dengan teknologi sebagai terobosan untuk mempermudah kinerja. (Basuki, Yayuk, Rulinawaty Kasmad, 2018: 210)

Seperti halnya inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi yaitu Layanan SIAP PPDB Online yang bertujuan untuk mendukung implementasi PPDB sesuai Permendikbud No. 44 Tahun 2019 dengan tetap mengedepankan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten terkait zonasi domisili dengan sekolah yang feksibel dan terukur.

Terdapat juga inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Gresik bernama Inovasi Aplikasi e-Planning Terintegrasi Maksimal, dimana ide tersebut muncul dilatar belakangi oleh permasalahan dari kondisi perencanaan dan penganggaran saat ini adalah sering adanya ketidaksinkronan antara perencanaan yang telah dibuat dan disepakati dengan penganggarnya. Hal ini karena dalam penyusunan anggaran sering ada intervensi dari pihak yang mempunyai kepentingan, sehingga mengakibatkan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah tidak tercapai.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk mewujudkan suatu ide atau pemikiran kreatif, yang berkaitan dengan teknologi sebagai terobosan untuk mempermudah kinerja.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam fakta-fakta mengenai inovasi. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti

secara mendalam. (Gunawan, 2013: 3) Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif. (Tahir, 2017: 18) Sedangkan dasar penelitiannya adalah survey yakni tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai inovasi yang dilakukan oleh dua kota di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah kota yang pernah melakukan inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk mewujudkan suatu ide atau pemikiran kreatif, yang berkaitan dengan teknologi sebagai terobosan untuk mempermudah kinerja.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi Layanan SIAP PPDB Online pada Kota Bekasi

Layanan SIAP PPDB Online adalah sebuah Sistem Layanan yang dirancang untuk memfasilitasi otomasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata melalui Internet. Layanan ini disediakan menggunakan Teknologi Web dan Cloud Computing (Komputasi Awan) yang dapat membantu sekolah dalam melaksanakan Layanan PPDB dengan lebih mudah, cepat, transparan, akurat dan akuntabel secara Online di Internet.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan secara Online bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Selain itu PPDB juga menjadi upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan, sehingga tidak terdapat lagi beberapa sekolah yang sangat diminati oleh pendaftar, sedangkan di beberapa sekolah lainnya kurang peminat.

Di beberapa kasus, siswa yang berdomisili di sekitar sekolah tetapi tidak diterima masuk ke sekolah yang diminati dan harus mendaftar

ke sekolah lain yang lebih jauh tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam hal ini mencoba menyelesaikan yang tertuang dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

PPDB Online hadir untuk mendukung implementasi PPDB sesuai Permendikbud No. 44 Tahun 2019 dengan tetap mengedepankan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten terkait zonasi domisili dengan sekolah yang feksibel dan terukur.

Manfaat yang diperoleh bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah yaitu diantaranya efisiensi pembiayaan dan mengurangi resiko terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), meningkatkan reputasi sekolah, memberikan akses yang luas kepada masyarakat, serta tersedianya sebuah basis data terintegrasi bagi pihak Dinas Pendidikan maupun Sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru. Sedangkan manfaat yang diperoleh bagi Siswa dan Orang Tua Siswa, yaitu diantaranya mempermudah untuk melakukan pendaftaran siswa baru, mempermudah akses informasi penerimaan siswa baru, pendaftaran menjadi lebih tertib dan mudah dipantau, serta fasilitas dan pelayanan memuaskan dari pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan.



Sumber: SIAP PPDB Online | Kota Bekasi (siap-ppdb.com)

Hasil dari adanya inovasi Layanan SIAP PPDB Online di Kota Bekasi, yaitu diantaranya yaitu tanpa instalasi & berbasis cloud, dimana layanan ini tidak perlu instal software aplikasi tertentu, tidak perlu pengadaan hardware server tertentu, cukup akses layanan basis web dan cloud dengan koneksi internet saja. Selain itu, aplikasi ini juga multi platform & multi akses, sehingga dapat diakses melalui dekstop, laptop, tablet maupun mobile phone baik

dengan layanan internet, SMS dan aplikasi android. Responsive Design, tampilan dapat menyesuaikan perangkat yang digunakan sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses layanan PPDB online. Lalu, bersifat multi model alur pendaftaran, mengakomodir pendaftaran online secara mandiri dan/atau datang langsung ke sekolah, dan lain-lain. Aplikasi ini pun multi jalur seleksi, dimana dapat mengakomodir implementasi PPDB Online berbagai Jalur. Menyesuaikan kondisi daerahnya. Sesuai aturan Permendikbud (Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, Jalur Afrmasi, Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali. Dan juga real time process, dalam mengelola data calon siswa secara otomatis dan langsung setiap waktu mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil.

B. Inovasi Aplikasi e-Planning Terintegrasi Maksimal pada Kabupaten Gresik

Pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengendalian. Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan perencanaan program dan kegiatan tahunan daerah yang disesuaikan dengan siklus anggaran dan merupakan suatu kegiatan menyeluruh melalui pendekatan top down approach maupun bottom up approach. Permasalahan dari kondisi perencanaan dan penganggaran saat ini adalah sering adanya ketidaksinkronan antara perencanaan yang telah dibuat dan disepakati dengan penganggarnya. Hal ini karena dalam penyusunan anggaran sering ada intervensi dari pihak yang mempunyai kepentingan, sehingga mengakibatkan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah tidak tercapai.

Hal penting lainnya adalah didalam penentuan kebijakan pembangunan daerah, pendekatan bottom up approach melalui penggalian aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan sangat penting dan harus dilakukan. Penggalian aspirasi masyarakat dapat dilakukan melalui tiga jalur yaitu Jalur Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimana masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung

sesuai dengan tingkatannya, Jalur Politik atau melalui partai politik yang dilakukan oleh anggota dewan dalam masa reses, dan Jalur birokrasi yang dapat langsung disampaikan melalui SKPD maupun kepala daerah.

Musrenbang sebagai jalur utama didalam menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat didalam penentuan perencanaan pembangunan. Melalui musrenbang, mayoritas aspirasi masyarakat disalurkan sebagai masukan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya. Permasalahan yang saat ini muncul adalah, walaupun sebagai jalur utama aspirasi masyarakat, aspirasi yang disampaikan dijalur ini juga dapat dikatakan sebagai jalur yang paling lemah pada proses perumusan agenda dan usulan kegiatan.

Salah satu hal yang menyebabkan aspirasi masyarakat pada musrenbang lemah adalah karena pemerintah memandang bahwa masyarakat sipil tidak mempunyai informasi yang cukup tentang Visi, Misi dan tujuan pemerintah daerah yang hendak dicapai. Hal tersebut menyebabkan usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sesuai dengan program-program pemerintah. Permasalahan kedua terkait musrenbang adalah, ketika musrenbang masih dilaksanakan secara manual (sebelum menggunakan e-Planning) seringkali Pemerintah daerah (dalam hal ini Bappeda kabupaten Gresik) kesulitan dalam memilah-milah dan memasukkan usulan masyarakat ke dalam kebijakan, program dan kegiatan perencanaan pembangunan. Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara umum adalah jumlah usulan Musrenbangdes sangat banyak & beragam jenisnya, aplikasi sebelumnya (untuk Musrenbang Desa sampai Musrenbang Kecamatan) & RKPD Online, di mana kedua aplikasi tersebut belum terkoneksi, sehingga usulan desa diadopsi secara manual ke dalam Draft Renja OPD, RKPD Online belum terkoneksi ke KUAPP AS & RAPBD sehingga perlu entry manual pada saat penyusunan RKA, serta konsistensi antara Perencanaan & Penganggaran belum dapat dijamin 100%.

Perencanaan dan penganggaran terintegrasi adalah perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan. Melalui e-Planning rangkaian proses

perencanaan pembangunan dilalui dalam tahapan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan berkualitas serta dapat dikontrol oleh masyarakat. Tahapan tersebut adalah Perencanaan Jangka Menengah, Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, RKPD-PPAS, dan RKPD-PPAS Perubahan.

Apa yang dilakukan e-Planning di Kabupaten Gresik seperti dalam mengatasi permasalahan di atas sesuai dengan Program Kedua pada Sembilan Program (Nawa Cita) Jokowi-JK yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi. Selain itu, system e-Planning Kabupaten Gresik yang terintegrasi dengan e-Budgeting merupakan upaya untuk menjalankan Program Keempat pada Sembilan Program (Nawa Cita) Jokowi-JK yaitu melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.



Sumber: ...ePlanning... (gresikkab.go.id)

Aplikasi e-Planning mempunyai tujuan sebagai berikut, diantaranya yaitu menerapkan perencanaan menggunakan teknologi informasi berbasis Web yang terintegrasi dan user friendly, menyelaraskan/ mengintegrasikan perencanaan strategis jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan, memetakan usulan program dan kegiatan dari DPRD, Unsur Pimpinan dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, menyusun rencana kerja anggaran dengan cepat dan tepat, serta mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan anggaran, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Manfaat utama dengan adanya aplikasi e-Planning diantaranya yaitu terjaminnya konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD / Renja SKPD dengan penganggaran (RAPBD). Pada Tahun

2016, kegiatan APBD yang tidak sinkron dengan RKPD sebanyak 105 kegiatan dan 5 program. Selain itu, pada tahun 2016, program di RKPD yang tidak sinkron dengan RPJMD sebanyak 81 program. Lalu pada tahun 2017, karena sudah menggunakan e-Planning terintegrasi maka konsistensi antara RPJMD-RKPD dan APBD dapat tercapai 100%. Selain itu, efisiensi waktu dan meminimalkan kesalahan perekapan data. Pada Tahun 2016, dimana belum menggunakan e-Planning, pelaporan dan perekapan data dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu satu minggu penuh dan mengharuskan staf Bappeda lembur di luar jam kerja untuk menyelesaikan terutama untuk persiapan bahan Musrenbang Kabupaten. Sebelum menggunakan e-Planning pelaporan dilakukan secara manual menggunakan Form Excel yang mana pelaksanaannya lebih sulit dan memungkinkan terdapat kesalahan perekapan. Setelah adanya e-Planning terintegrasi pada tahun 2017 pelaporan di setiap tahapan dapat dilakukan secara langsung sesuai kebutuhan atau form yang telah ditetapkan dalam format .pdf, .xls, dan .doc sehingga hanya membutuhkan waktu dua hari kerja tanpa lembur. Perekapan secara langsung dengan menggunakan sistem look up data, meminimalkan terjadinya kesalahan entri data dan konsistensi dapat tercapai.

Sebelum adanya e-Planning sebagai aplikasi perencanaan berbasis online terintegrasi, Bappeda Kabupaten Gresik sebagai institusi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara perencanaan daerah telah melalui tahap-tahap menuju perbaikan. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut yaitu pertama, sebelum tahun 2014, proses perencanaan daerah mulai musrenbang hingga terbentuk KUA-PPAS masih dilakukan secara manual tanpa alat bantu aplikasi. Pada tahap ini ditemukan berbagai macam masalah yaitu antara lain yaitu waktu penyelenggaraan pada setiap tahap perencanaan seringkali tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan, banyak usulan desa maupun kecamatan yang tidak terekam dengan baik, bahkan seringkali berubah-ubah akibat kepentingan tertentu, Verifikator bappeda kesulitan dalam memilah usulan yang ada. Kedua, tahun 2015, Bappeda telah mempunyai aplikasi perencanaan yang mengakomodasi proses musrenbang tingkat

desa dan kecamatan yang bernama e-musrenbang. Aplikasi ini mempunyai permasalahan utama yaitu platform aplikasi berbeda dengan aplikasi yang digunakan Bagian Penganggaran/Keuangan Daerah sehingga memerlukan dua kali kerja. Selain itu, output pada aplikasi ini hanya sampai pada usulan Musrenbang Desa/kelurahan dan Kecamatan, tahapan selanjutnya masih belum terakomodasi. Ketiga, tahun 2016, Bappeda telah membangun aplikasi RKPD Online, di mana aplikasi ini telah memfasilitasi tahapan perencanaan mulai dari Forum SKPD (Renja SKPD) sampai RKPD. Belum mampunya aplikasi ini untuk sampai pada tahap KUA-PPAS menjadikan output RKPD Online masih belum bisa terintegrasi dengan aplikasi penganggaran daerah. Keempat, Tahun 2017, aplikasi e-Planning dikembangkan, menggabungkan e-musrenbang dan RKPD Online menjadi satu aplikasi, dengan output RKPD, KU-PPAS yang terintegrasi dg penganggaran (SIPKD). Pada saat ini juga sudah ada tambahan menu Pokir namun belum terintegrasi ke dalam RKPD. Kelima, tahun 2018, aplikasi e-Planning Terintegrasi Maksimal dikembangkan untuk mengakomodasi renbang Kab Gresik untuk tahun anggaran 2019 terintegrasi dengan aplikasi Penganggaran (SIPKD). Pokir sudah dapat diintegrasikan dengan RKPD. BTL sudah bisa diverifikasi oleh SKPD yang bertanggungjawab.

Setelah menggunakan e-Planning Terintegrasi Maksimal yang mulai digunakan pada tahun 2018 untuk menyusun RKPD tahun 2019 terdapat perbaikan-perbaikan pelaksanaan perencanaan daerah sebagai berikut yaitu pertama, penyusunan Renstra SKPD konsisten dengan Program, capaian program, dan indikator kinerja RPJMD. Kedua, usulan musrenbang Desa/Kelurahan lebih mudah karena sudah dilakukan mapping kegiatan dan dapat langsung dipisahkan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta dapat memisahkan Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial. Ketiga, usulan musrenbang Kecamatan dapat secara langsung mengambil data (mengakomodir) dari usulan musrenbang desa dengan melakukan transfer kegiatan. Keempat, rancangan awal SKPD dapat secara langsung transfer data dari tahapan renstra yang kemudian disesuaikan isian yang diperlukan yaitu tolak ukur, target

kinerja tahun (n) dan target kinerja tahun (n+1). Pagu pada Rancangan awal kemudian disesuaikan dengan Surat Edaran Bupati Gresik No. 90/119/437.71/2018 tentang Pedmoman Prioritas Sasaran Pembangunan Tahun 2019. Kelima, Forum SKPD dilakukan secara langsung dengan transfer tahapan rancangan awal dengan penyesuaian pagu kegiatan/program hasil rapat Forum SKPD yang telah disepakati. Hasil tahap forum SKPD kemudian ditransfer menjadi bahan musrenbang kabupaten dan kemudian menjadi rancangan RKPD untuk kemudian ditetapkan. Keenam, Pokok-Pokok Pikiran Dewan (Pokir) pada e-Planning Terintegrasi Maksimal di Kabupaten Gresik pada tahun 2018 sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana saat ini usulan pokir diharuskan mengambil data yang telah tersedia di database e-Planning yang merupakan usulan musrenbang desa. Bagi usulan pokir yang tidak mengambil usulan musrenbang desa harus dilengkapi dengan berita acara yang melibatkan Kepala Desa, Camat, dan SKPD terkait. Usulan pokir kemudian diverifikasi SKPD untuk menentukan layak tidaknya usulan juga melalui aplikasi e-Planning. Usulan pokir diharapkan benar-benar atas kepentingan desa yang bersangkutan tidak hanya karena kepentingan politik semata.

C. Prinsip dan Strategi Utama dalam Berinovasi

Prinsip dan strategi utama untuk inovasi dalam pemerintahan adalah meliputi Mengintegrasikan layanan, desentralisasi pemberian layanan, memanfaatkan kemitraan, melibatkan warga Negara, serta memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ciri kelima memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan keniscayaan seiring dengan perkembangan global, dengan apa yang disebut era disruption. (Sururi, 2017: 9)

Kemudian Wijayanti (2012) dalam penelitiannya tentang implementasi inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan menyimpulkan bahwa keberhasilan inovasi kebijakan tercipta karena berbagai faktor yaitu inisiatif dan komitmen Walikota, perubahan mindset sehingga terbangun kepercayaan dalam pengelolaan PKL, reformasi birokrasi yang diikuti penyusunan dokumen pendukung, mekanisme implementasi yang berkesinambungan dan terintegrasi, serta

pangkas anggaran dan fokus untuk pemanfaatan yang berdampak terutama kesejahteraan. (Wijayanti, 2012: 1)

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi dan Kabupaten Gresik berhasil untuk menciptakan inovasi pada bidang pelayanan publik, dimana pada kedua kota ini telah menciptakan suatu ide atau pemikiran kreatif, yang berkaitan dengan teknologi sebagai terobosan untuk mempermudah kinerja.

Hasil dari adanya inovasi Layanan SIAP PPDB Online di Kota Bekasi, yaitu diantaranya Tanpa Instalasi & Berbasis Cloud, Multi Platform & Multi Akses, Responsive Design, Multi Model Alur Pendaftaran, Multi Jalur Seleksi, Real Time Process, sehingga dapat mengelola data calon siswa secara otomatis dan langsung setiap waktu mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil.

Sedangkan, dengan adanya Aplikasi e-Planning di Kabupaten Gresik mempunyai tujuan untuk menerapkan perencanaan menggunakan teknologi informasi berbasis Web yang terintegrasi dan user friendly, menyelaraskan/ mengintegrasikan perencanaan strategis jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan, memetakan usulan program dan kegiatan dari DPRD, Unsur Pimpinan dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, menyusun rencana kerja anggaran dengan cepat dan tepat, serta mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan anggaran, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, sehingga penelitian dapat selesai dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

V. DAFTAR PUSTAKA

Andhika, L. R. (2017). Budaya Inovasi Aspek Yang Terlupakan Dalam Inovasi Kepegawaian. *Civil Service Journal*, 11(1), 49-61. Diambil dari <http://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/37>

- Banerjee, B., & Ceri, S. (2015). *Creating innovation leaders: A global perspective*. Springer.
- Basuki, Yayuk, Rulinawaty Kasmad, and N. N. (2018). Tipologi Inovasi Sektor Publik (Program Si-Cakep) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. *Jurnal Matra Pembaruan*, 1(Inovasi kebijakan), 75–84. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.297-216>
- Černe, M., Jaklič, M., & Škerlavaj, M. (2013). Authentic leadership, creativity, and innovation: A multilevel perspective. *Leadership*, 9(1), 63–85. <https://doi.org/10.1177/1742715012455130>
- Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. *Government Information Quarterly*, 32(3), 279–286. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.03.005>
- Crivits, M., De Krom, M. P. M. M., Dessen, J., & Block, T. (2014). Why innovation is not always good: Innovation discourses and political accountability. *Outlook on Agriculture*, 43(3), 147–155. <https://doi.org/10.5367/oa.2014.0174>
- Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. Pendidikan, 143. Diambil dari http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Kettl, D. F. (2015). *The transformation of governance: Public administration for the twenty-first century*.
- Noor, I. (2013). *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*, 1–15. Diambil dari <https://scholar.google.com/scholar?oi=bib&cluster=360656420083251686&btnI=1&hl=id>
- Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah. *Matra Pembaruan*, 3(2), 99–108. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.99-108>
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance, 12, 14–31. <https://doi.org/10.31227/osf.io/6djph>
- Tahir, H. (2017). Inovasi Program Kesehatan 24 Jam Dalam Mewujudkan Good Health Care Governance di Kabupaten Bantaeng Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 2(1), 13–22.
- Uslu, T. (2015). Innovation Culture and Strategic Human Resource Management in Public and Private Sector within the Framework of Employee Ownership. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 1463–1470. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.445>
- Wijayanti, L. (2012). Implementasi Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Surakarta: Relokasi PKL di Taman Monumen Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(2), 126. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i2.11565>
- Yusriadi, Y., & Misnawati, M. (2017). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 99. <https://doi.org/10.26858/jiap.v7i2.4954>



***Korespondensi**

Email : itariqshaquele@yahoo.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INOVATIF DALAM MENDUKUNG KEMAJUAN DAERAH PERKOTAAN

**(Studi Penelitian Pada Kota Bontang, Kota
Palembang, Dan Kota Makassar)**

Yulius Christian

Kementerian Dalam Negeri | Jl. Kramat Raya No.132, RT.1/RW.9,
Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10430

Disetujui: 30 Januari 2021

Abstract

The development of the world today has been moving so fast, technology has made the boundaries between information and human needs closer. This speed and accuracy is also needed in the process of government and citizen interaction, but unfortunately the high mobility of citizens is not matched by the accuracy and speed of the government in terms of services, especially services to the public. This study aims to analyze innovation as a way to empower people to play an active role in the progress of urban areas. This research uses a descriptive qualitative method that describes an objective state or certain event based on visible facts or as it should be, which is then accompanied by general conclusions based on these historical facts. The population in this study are cities that have made innovations in their regions, while the samples in this study are innovations carried out by Bontang City, Palembang City and Makassar City which aim to empower the community to play an active role in helping realize the progress of their region. The results of this research prove that innovation is the transformation of knowledge into new products, processes and services, the act of using something new. Where innovation is the successful exploitation of a new idea or in other words is the mobilization of knowledge, technological skills and experience to create new products, processes and services. Palembang City and Makassar City which aim to empower the community to play an active role in helping to realize the progress of their regions. The results of this research prove that innovation is the transformation of knowledge into new products, processes and services, the act of using something new. Where innovation is the successful exploitation of a new idea or in other words is the mobilization of knowledge, technological skills and experience to create new products, processes and services. Palembang City and Makassar City which aim to empower the community to play an active role in helping to realize the progress of their regions. The results of this research prove that innovation is the transformation of knowledge into new products, processes and services, the act of using something new. Where innovation is the successful exploitation of a new idea or in other words is the mobilization of knowledge, technological skills and experience to create new products, processes and services.

Keywords: Innovation, Urban Progress, Society, Government, Characteristics

Abstrak

Perkembangan dunia dewasa ini telah berjaan begitu cepat, teknologi telah membuat batasan antar informasi dan kebutuhan

manusia semakin dekat. Kecepatan dan ketepatan ini juga dibutuhkan dalam proses interaksi pemerintah dan warga Negara, namun sayangnya mobilitas warga Negara yang tinggi tidak diimbangi dengan ketepatan dan juga kecepatan pemerintah dalam hal pelayanan khususnya pelayanan kepada publik. penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis inovasi sebagai cara memberdayakan masyarakat agar berperan aktif dalam kemajuan daerah perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah kota yang telah melakukan inovasi di daerahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kota Bontang, Kota Palembang, dan Kota Makassar yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar berperan aktif dalam membantu mewujudkan kemajuan daerahnya. Hasil dari penelitian ini terbukti bahwasanya Inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Dimana inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru.

Kata Kunci : Inovasi, Kemajuan Perkotaan, Masyarakat, Pemerintah, Ciri Khas

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia dewasa ini telah berjaan begitu cepat, teknologi telah membuat batasan antar informasi dan kebutuhan manusia semakin dekat. Kecepatan dan ketepatan ini juga dibutuhkan dalam proses interaksi pemerintah dan warga Negara, namun sayangnya mobilitas warga Negara yang tinggi tidak diimbangi dengan ketepatan dan juga kecepatan pemerintah dalam hal pelayanan khususnya pelayanan kepada publik. Warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari negara (birokrasi). Warga

negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar suaranya, sekaligus dihargai nilai dan preferensinya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak untuk menilai, menolak dan menuntut siapapun yang secara politis bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan publik. Konsep ini disebut sebagai The New Public Service (NPS) yang dikembangkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt pada tahun 2003. (Cahyadi, 2016)

Kebijakan pelayanan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik Administrasi publik, sebagai salah satu unsur penting dalam administrasi publik. Kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia, karena melalui instrument ini segala aktivitas kehidupan bernegara, berpemerintah dan bermasyarakat dilakukan oleh birokrasi dalam pengabdianannya sebagai pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. (Kartini, 2020)

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani, Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. (Suryani, 2008; Dama, 2018; Setiamy, 2019). Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. (Setijanigrum, 2017). Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar-benar belum pernah ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui konsumen di pasar. (Rumengan, 2017). Kata inovasi dapat diartikan sebagai "proses" atau "hasil" pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau

memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti.

Menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012:132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Mitra pada buku tersebut dan pada halaman yang sama, bahwa inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. Namun, menurut Fontana (2009: 20), mengungkapkan bahwa inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan faktor fundamental dalam penentu perubahan ekonomi. (Rahman, 2019)

Menurut pendapat di atas banyak produk yang bisa diinovasi, bukan hanya dalam produk dalam jasa pun kita bisa menggunakan inovasi. Akan tetapi untuk menyusun strategi inovasi kita membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif karena dengan adanya kinerja yang baik dan kreatif dapat meningkatkan minat pembeli dalam membeli produk pada usaha mikro tersebut. (Setiamy, 2019)

Di era yang serba modern ini dimana kebutuhan informasi yang sudah tidak dapat ditunda lagi, manusia begitu haus akan informasi dan berita. Begitu juga di bidang kepegawaian yang membutuhkan pembaharuan informasi. Kebutuhan pelayanan kepegawaian yang cepat dan dinamis dalam memperoleh informasi adalah syarat mutlak untuk meraih pelayanan yang efektif dan efisien. Hal tersebut berimplikasi pada kebutuhan penggunaan teknologi yang semakin laju. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Bontang pada tahun 2011 adalah melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi kepegawaian. Hal tersebut mendorong Kota Bontang untuk menciptakan sebuah inovasi yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen Admisnitasi Kepegawaian (SIMAK).

Inovasi tentunya harus memiliki dampak positif terhadap lingkungannya. Seperti halnya di Kota Palembang. Palembang merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia, berdasarkan data BPS Kota Palembang jumlah penduduknya mencapai 1,6 juta jiwa, dengan penduduk yang masih berstatus pelajar hampir 20 persen atau sekitar 300.851 jiwa, sehingga dengan jumlah tersebut, pelajar sebagai generasi penerus bangsa akan memiliki peranan penting dan potensial dalam membangun bangsa ini, pelajar yang dimaksud terdiri dari semua jenjang pendidikan dari tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Latar belakang ini menjadi sebuah dorongan untuk Kota Palembang untuk menciptakan inovasi yang bernama Program Jam Ke Nol Dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) Berbasis Sekolah.

Dengan seiring perkembangan jaman, inovasi pun berkembang seperti dalam hal teknologi. Seperti halnya inovasi yang dilakukan oleh Kota Makassar. Tujuan dibentuknya Aplikasi Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ujung Tanah atau "ASSIPANA" yang dibentuk oleh Kota Makassar adalah : (1). Memudahkan masyarakat dalam proses pengaduan/keluhan terkait pelayanan di Kecamatan Ujung Tanah. (2). Menindaklanjuti pengaduan masyarakat Kecamatan Ujung Tanah secara cepat dan tepat. (3). Membantu organisasi dalam menyukseskan visi & misi yang Sombere, Inovatif, Amanah, dan Profesional (SIAP) sesuai dengan motto Kecamatan Ujung Tanah. (4). Mengeliminasi/meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang timbul. (5). Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu mewujudkan Kecamatan Ujung Tanah yang Sombere, Inovatif, Amanah, dan Profesional (SIAP).

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis inovasi sebagai cara memberdayakan masyarakat agar berperan aktif dalam kemajuan daerah perkotaan yang dilakukan pada tiga Kota Besar di Indonesia, yaitu Kota Bontang, Kota Palembang, dan Kota Makassar.

II. METODE PENELITIAN

Menurut (Creswell, 2011), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang

dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini seperti jurnal serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian guna memperoleh konsep-konsep yang relevan dengan kajian inovasi yang dilakukan di perkotaan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik sebagai data sekunder yang kemudian diolah dan dideskripsikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data. Kemudian dilakukan analisis data berdasarkan teori dan konsep kebijakan publik serta selanjutnya dilakukan proses intepretasi data. Populasi dalam penelitian ini adalah kota yang telah melakukan inovasi di daerahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kota Bontang, Kota Palembang, dan Kota Makassar yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar berperan aktif dalam membantu mewujudkan kemajuan daerahnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi Sistem Informasi Manajemen Admisnitasi Kepegawaian (Simak) Di Kota Bontang

Di era yang serba modern ini dimana kebutuhan informasi yang sudah tidak dapat ditunda lagi, manusia begitu haus akan informasi dan berita. Begitu juga di bidang kepegawaian yang membutuhkan pembaharuan informasi. Kebutuhan pelayanan kepegawaian yang cepat dan dinamis dalam memperoleh informasi adalah syarat mutlak untuk meraih pelayanan yang efektif dan efisien. Hal tersebut berimplikasi pada kebutuhan penggunaan teknologi yang

semakin laju. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Bontang pada tahun 2011 adalah melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi kepegawaian.

Pengembangan aplikasi merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk menambah nilai dan fungsi dari sebuah aplikasi itu sendiri. Fungsi tersebut yang nantinya menjawab dari berbagai permasalahan. Upaya ini akan menjadi penyempurna system yang telah dibangun karena nantinya akan berdampak pada terintegrasinya dua system yang sudah ada melalui Sinkronisasi data antara Sistem Aplikasi Database Tata Naskah (E-Takah) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)/ SIM ASN. Awalnya, untuk pemenuhan kebutuhan data dari SKPD yang melakukan permintaan data sesuai Format yang dibutuhkan dilakukan dengan cara tarik data dan diolah secara manual menggunakan software MS Excel. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan data maka dibangun dan dikembangkan aplikasi untuk efisiensi dan efektifitas pemenuhan data. Sedangkan untuk proses administrasi kepegawaian, misalkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat (Kenpa), apabila ada usulan dari SKPD akan diproses dengan kelengkapan arsipnya. Selain itu untuk maksud proses layanan percepatan maka dikembangkan lagi aplikasi berbasis web yang terintegrasi. Program ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk melaksanakan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, sosial dan pelayanan masyarakat dengan berdasar pada Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan keenambelas, membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Tujuan dari inovasi ini yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian secara efektif dan efisien. Selain itu, bertujuan juga sebagai media pengolahan data, pengolahan informasi, system manajemen dan proses kerja secara elektronik, pemeliharaan data dan validasi data. Manfaat Pengolahan data kepegawaian oleh pengelola tekinis kepegawaian menjadi lebih cepat dengan data yang lebih valid.

SIMAK memberikan pemenuhan kebutuhan data dari SKPD yang melakukan permintaan data sesuai Format yang dibutuhkan. Sedangkan untuk proses administrasi kepegawaian, misalkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat

(Kenpa), apabila ada usulan dari SKPD akan diproses dengan kelengkapan arsipnya. Selain itu untuk maksud proses layanan percepatan maka dikembangkan lagi aplikasi berbasis web yang terintegrasi. SIMAK dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dengan menggunakan Login yang diberikan. SIM ASN dapat dilihat dengan menggunakan Android dan IOS.

Pengembangan SIMAK akan dilakukan secara swakelola dengan melibatkan pranata komputer dan jabatan fungsional tertentu lainnya yang ada di BKPP. Berikut proses manajemen kepegawaian yang dilakukan dengan menggunakan SIMAK: (1). e-Baperjakat Aplikasi berfungsi untuk membantu Kabid Mutasi dan Pengembangan, dan Kasubid Pengembangan Karir untuk proses Kegiatan Baperjakat. Data ASN dipresentasikan ke Tim Penilai Kinerja Pegawai dan bersifat rahasia (aplikasi berdiri sendiri tidak terhubung dengan jaringan). Aplikasi dipakai menggunakan database yang ditanamkan di laptop Kasubid Pengembangan Karir. Proses kerjanya untuk pengusulan dan pencetakan SK Mutasi. (2). e-KGB Aplikasi KGB di pergunakan untuk mempermudah pengguna dalam proses Kenaikan Gaji Berkala. Dalam aplikasi tersedia data prediksi KGB setiap bulannya (data nominatifnya) yang akan dicek ulang dengan data usulan KGB yang masuk dari perangkat daerah. (3). e-Kenpa Aplikasi untuk keperluan proses kenaikan pangkat. Dalam aplikasi tersedia data daftar Nominatif Kenaikan Pangkat. Data yang ada di aplikasi SIMAK sebagai data pembanding, dicek untuk proses pengelola Kenaikan Pangkat dengan menggunakan aplikasi yang terhubung dengan BKN (Aplikasi SAPK). (4). e-Pensiun Aplikasi digunakan untuk keperluan proses Pensiun. Dalam aplikasi tersedia data daftar Nominatif Pensiun. Data yang ada di aplikasi SIM ASN sebagai data pembanding, dicek untuk proses pengelola Pensiun dengan menggunakan aplikasi SAPK. (5). e-Jafung Aplikasi untuk keperluan proses usulan Jabatan Fungsional dan Cetak SK Jafung. (6). e-Cuti Aplikasi untuk keperluan proses usulan Cuti dan Cetak SK Cuti. (7). e-Tubel Ibel Aplikasi digunakan untuk keperluan proses usulan tugas belajar dan izin belajar, dan cetak SK.

B. Inovasi Program Jam Ke Nol Dan Taman Pendidikan Al Qur'an (Tpa) Berbasis Sekolah Di Kota Palembang

Palembang merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia, berdasarkan data BPS Kota Palembang jumlah penduduknya mencapai 1,6 juta jiwa, dengan penduduk yang masih berstatus pelajar hampir 20 persen atau sekitar 300.851 jiwa, sehingga dengan jumlah tersebut, pelajar sebagai generasi penerus bangsa akan memiliki peranan penting dan potensial dalam membangun bangsa ini, pelajar yang dimaksud terdiri dari semua jenjang pendidikan dari tingkat SD, SMP dan SMA sederajat.

Pada era globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda khususnya pelajar di Kota Palembang dalam menghadapi berbagai dampak negatif yang dapat mempengaruhi budaya dan karakter masyarakat. Berdasarkan pengamatan dilapangan saat ini dampak negatif era globalisasi sangat dirasakan dikalangan generasi muda khususnya pelajar, dimana berbagai bentuk kenakalan remaja saat ini semakin meningkat, seperti; tawuran antar pelajar, pergaulan bebas, berbagai bentuk tindak kriminal dikalangan pelajar, penyalahgunaan narkoba, degradasi moral dan etika, dalam kehidupan sehari-hari sangat sering ditemukan. Kondisi tersebut di atas salah satunya disebabkan oleh terjadinya penurunan pengamalan nilai-nilai agama, rendahnya pengamalan nilai-nilai agama tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai agama itu sendiri.

Dinas Pendidikan Kota Palembang sebagai instansi pemerintah yang turut andil dalam mengembangkan potensi kehidupan manusia, baik intelegensia, kreativitas, maupun akhlakul karimah melalui bimbingan, pengajaran dan latihan, dengan melaksanakan aktivitas pendidikan terkait dengan tujuan pembentukan manusia seutuhnya dalam rangka memajukan peradaban, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Bab II, pasal 3 dirumuskan bahwa : "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa, berakhlak mulia; sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang Baik serta bertanggung jawab.” jelas disini bahwa pemerintah dan masyarakat harus bahu membahu dalam melaksanakan pendidikan. Dalam mensikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palembang melakukan langkah kongkrit dengan menggagas dan melaksanakan kegiatan “Jam Ke Nol dan Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) Berbasis Sekolah”.

Program kegiatan “Jam Ke Nol dan TPA Berbasis Sekolah” ini, dilaksanakan sebagai jawaban atas permasalahan remaja khususnya pelajar yang sudah cukup mengkhawatirkan. Materi pokok kegiatan Jam Ke Nol meliputi; bagi yang beragama Islam terdiri dari Sholat Dhuha, Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an dan Tausyiah Keagamaan, sedangkan bagi pemeluk agama lain dapat disesuaikan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari sebelum jam pelajaran reguler dimulai, yaitu pukul 06.40 sampai dengan 07.00 wib, dengan kegiatan ini akan terwujud pelajar yang berakhlakul karimah, berimtaq dan menguasai iptek. Selain itu tidak ada lagi pelajar di Kota Palembang yang mengalami buta aksara Al-Qur’an, sebab dari data yang ada tingkat buta aksara Al-Qur’an dikalangan pelajar Kota Palembang masih cukup tinggi, yaitu pelajar SD mencapai 72 persen dari 148.595 pelajar, SMP 66 persen dari 74.198 pelajar dan untuk SMA 54 persen dari 45.397 pelajar, dengan rata-rata 64 persen masih masuk kategori buta aksara Al-Qur’an angka ini hampir sama dengan jumlah rata-rata buta aksara Al-Qur’an secara nasional, yaitu 65 persen. Dengan meningkatnya kemampuan membaca Al-Qur’an akan berpengaruh pada tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an, sehingga pada akhirnya akan lahir pelajar-pelajar yang berkarakter.

Tujuan dari adanya inovasi ini yaitu diantaranya Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang, sejalan dengan tujuan pendidikan di Indonesia sebagai Negara beragama, maka untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007, dengan kewajiban seluruh jenjang satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan agama, yang

berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa. Selain itu bertujuan juga untuk berkembangnya kemampuan memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam iptek dan seni.

Manfaat merupakan dampak positif dari suatu pelaksanaan program yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, dalam pelaksanaan program “Jam Ke Nol dan Taman Pendidikan Al Qur’an Berbasis Sekolah”, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan, antara lain : (1). Adanya gerakan membaca Al Qur’an secara masif dikalangan pelajar, hal ini memberikan ruang bagi pelajar untuk menambah waktu belajar dan memahami Al Qur’an, yang terkadang waktu mereka banyak tersita oleh berbagai aktifitas yang lain. (2). Menurunnya angka buta aksara Al Qur’an dikalangan remaja khususnya pelajar di Kota Palembang, data sebelumnya tercatat 64 persen dari 300.851 orang pelajar di Kota Palembang masuk kategori buta aksara Al Qur’an, setelah dilaksanakan program “Jam Ke Nol dan Taman Pendidikan Al Qur’an Berbasis Sekolah” angka tersebut menurun menjadi 31 persen, data ini hasil dari survey ke lapangan. (3). Suasana sekolah lebih kondusif dan religius, karena biasanya di pagi hari sebelum siswa masuk kelas telah dilantunkan Ayat-Ayat Suci AL Qur’an melalui pengeras suara yang terdengar di seluruh lingkungan sekolah tersebut. (4). Hampir tidak ada lagi laporan tentang kenakalan remaja dikalangan pelajar, kalau sebelumnya masih sering terjadi tawuran antar pelajar, sekarang nyaris tidak terdengar lagi kasus seperti itu. (5). Membantu Pemerintah Kota Palembang dalam pencapaian tujuan dari Visi Palembang EMAS tahun 2018, khususnya dalam menciptakan masyarakat madani, berkarakter membangun dengan basis agama yang kuat mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. (6). Adanya piagam penghargaan yang diberikan oleh Walikota Palembang kepada pelajar yang berprestasi dalam bidang keagamaan, pemberian beasiswa, dan juga ada jalur prestasi bagi siswa hafis Qur’an untuk melanjutkan sekolah, seperti dari SD melanjutkan ke SMP atau dari SMP ke SMA. (7). Adanya kontribusi nyata terhadap program Penguatan Pendidikan Karakter yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (8). Adanya

kontribusi nyata terhadap program pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar, yang merupakan program dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Selatan.

Ada pun penerapan program “Jam Ke Nol dan “Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) Berbasis Sekolah”, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan “Jam Ke Nol”. Kegiatan “Jam ke Nol” merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari oleh Sekolah di Kota Palembang, berlangsung sebelum jam pelajaran reguler di mulai, yaitu mulai dari pukul 06.40 wib sampai dengan 07.00 wib, jadi sejak pukul 06.40 wib seluruh peserta didik sudah hadir dan berada di dalam kelas untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan yang dimaksud bisa pembacaan Ayat Suci AlQur’an, Sholat Dhuha dan Tauziah Keagamaan bagi yang muslim, sedangkan untuk yang non muslim disesuaikan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut diawasi dan didampingi oleh Guru masing-masing, dikoordinasikan oleh Guru Agama dan Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan “Program Jam Ke Nol” di sekolah masing-masing. Secara rutin maupun insidental Tokoh Agama yang tergabung dalam Gerakan Umat Melalui Masjid (GUMMAS) Sumatera Selatan, melakukan pembinaan, pengayaan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan “Jam Ke Nol” tersebut, sebagai bentuk spirit bagi program untuk mencapai hasil yang maksimal.
2. Kegiatan “Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) Berbasis Sekolah”. Kegiatan “Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) Berbasis Sekolah” merupakan bentuk tindak lanjut dan pengembangan dari kegiatan “Jam Ke Nol”, jika pelaksanaan program “Jam Ke Nol” tetap, yaitu setiap hari jam sekolah, yang dimulai pukul 06.40 wib sampai dengan 07.00 wib, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan “Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) Berbasis Sekolah” bervariasi tergantung dari kebijakan sekolah. Ada kegiatan yang dilaksanakan secara rutin, seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh eksekul kerohanian sekolah secara terjadwal, Sholat berjama’ah, pembacaan Yasin setiap hari Jum’at. Ada juga kegiatan yang dilaksanakan secara insidental, seperti

program khatam Qur’an massal, peringatan Hari Besar Keagamaan, dan lain sebagainya. Dengan dilaksanakannya program “Jam Ke Nol dan Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) Berbasis Sekolah”, diharapkan akan muncul pembiasaan dalam membaca Al Qur’an dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya bagi seluruh pelajar di Kota Palembang, yang akhirnya akan membudaya dikalangan pelajar itu sendiri. Dengan adanya kebiasaan tersebut akan berpengaruh pada tingkat pengamalan nilai-nilai agama, yang berujung pada lahirnya generasi yang beriman dan berakhlakul karimah serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara seimbang.

C. Inovasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ujung Tanah (Assipana) Di Kota Makassar

Kecamatan Ujung Tanah termasuk dalam wilayah teritorial Kota Makassar, Salah satu organisasi birokrasi yang memberikan pelayanan adalah Kecamatan Ujung Tanah. Kecamatan Ujung Tanah merupakan line office dari Pemerintah Kota Makassar yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, Kecamatan Ujung Tanah juga tidak terlepas dari permasalahan administratif dalam melakukan manajerial pelayanan dalam suatu wilayah. Kompleksitas masalah yang dihadapi juga berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, demikian halnya dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di wilayah Kecamatan Ujung Tanah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat (seperti pelayanan E-KTP, IMB, KK dan sebagainya). Agar tercipta suatu pekerjaan yang efisien dan efektif kami juga mengharapkan agar ada timbal balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan baik itu rasa puas atas pelayanan yang diberikan atau rasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan dengan menuangkan dalam bentuk pengaduan atau keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Agar terciptanya pekerjaan yang efisien dan efektif dengan ini kami melakukan

inovasi agar suatu pengaduan atau keluhan dapat tersalurkan kepada kami sehingga dapat tercipta kinerja aparatur Sipil di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yang terampil dan profesional.

Tujuan dibentuknya Aplikasi Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ujung Tanah atau "ASSIPANA" adalah : (1). Memudahkan masyarakat dalam proses pengaduan/keluhan terkait pelayanan di Kecamatan Ujung Tanah. (2). Menindaklanjuti pengaduan masyarakat Kecamatan Ujung Tanah secara cepat dan tepat. (3). Membantu organisasi dalam menyukseskan visi & misi yang Sombere, Inovatif, Amanah, dan Profesional (SIAP) sesuai dengan motto Kecamatan Ujung Tanah. (4). Mengeliminasi/ meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang timbul. (5). Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu mewujudkan Kecamatan Ujung Tanah yang Sombere, Inovatif, Amanah, dan Profesional (SIAP).

Manfaat dari Aplikasi Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ujung Tanah atau "ASSIPA" adalah sebagai berikut : (1). Masyarakat dimudahkan untuk melapor pengaduan/keluhan terkait pelayanan yang diberikan Kecamatan Ujung Tanah. (2). Masyarakat diberikan tindaklanjut yang cepat dan tepat dalam pengaduan/keluhan terkait pelayanan di Kecamatan Ujung Tanah. (3). Dapat membantu organisasi / Kecamatan Ujung Tanah dalam mengukur sejauh mana optimalisasi kinerja pelayanan di Kecamatan Ujung Tanah. (4). Dapat menciptakan pelayanan Kecamatan Ujung Tanah yang SIAP (Sombere, Inovatif, Amanah, dan Profesional) dalam bekerja. (5). Agar masyarakat dapat lebih dekat hubungannya dengan Pemerintah Daerah. (6). Akan membuat kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah semakin meninggi. (7). Terciptanya kepedulian masyarakat untuk membangun daerahnya.

Hasil Inovasi : ASSIPANA menghasilkan reaksi cepat dan tepat dari Kecamatan Ujung Tanah dalam menindaklanjuti pengaduan / keluhan dari masyarakat Kecamatan Ujung Tanah.

D. Faktor Pendorong Dan Penghambat Inovasi Di Perkotaan

Robbins (2009: 55) lebih memfokuskan pada tiga hal utama yaitu : (1). Gagasan baru yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu

fenomena yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan, gagasan baru ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran, Ide, sistem sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal. (2). Produk dan jasa yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindak lanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan dimplementasikan termasuk hasil inovasi dibidang pendidikan. (3). Upaya perbaikan yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan (Improvement) yang terus menerus sehingga buah in novasi itu dapat dirasakan manfaatnya.

Dalam pelaksanaannya menurut Albury dalam Simon & Dedy (2018: 38-39) inovasi tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Banyak dari kasus inovasi di antaranya justru terkendala oleh berbagai faktor, antara lain: 1. Budaya yang tidak menyukai risiko (risk aversion). Hal ini berkenaan dengan sifat inovasi yang memiliki segala risiko, termasuk risiko kegagalan. Sektor publik, khususnya pegawai cenderung enggan berhubungan dengan risiko, dan memilih untuk melaksanakan pekerjaan secara proseduraladministratif dengan risiko minimal. 2. Secara kelembagaan, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menangani risiko yang muncul akibat dari pekerjaannya. 3. Keengganan menutup program yang gagal. 4. Ketergantungan terhadap figur tertentu yang memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor publik hanya menjadi follower.

Menurut Irwan (2013:110) menyatakan bahwa inovasi Pemerintah Daerah merupakan keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Inovasi daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Inovasi. Menurut Irwan (2013:110) menyatakan bahwa inovasi Pemerintah Daerah merupakan keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Dimana inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru.

Inovasi SIMAK yang dilakukan oleh Kota Bontang memberikan pemenuhan kebutuhan data dari SKPD yang melakukan permintaan data sesuai Format yang dibutuhkan. Sedangkan untuk proses administrasi kepegawaian, misalkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat (Kenpa), apabila ada usulan dari SKPD akan diproses dengan kelengkapan arsipnya. Selain itu untuk maksud proses layanan percepatan maka dikembangkan lagi aplikasi berbasis web yang terintegrasi. SIMAK dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dengan menggunakan Login yang diberikan. SIM ASN dapat dilihat dengan menggunakan Android dan IOS.

Program kegiatan "Jam Ke Nol dan TPA Berbasis Sekolah" yang dilakukan oleh Kota Palembang, dilaksanakan sebagai jawaban atas permasalahan remaja khususnya pelajar yang sudah cukup mengkhawatirkan. Materi pokok kegiatan Jam Ke Nol meliputi; bagi yang beragama Islam terdiri dari Sholat Dhuha, Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an dan Tausyiah Keagamaan, sedangkan bagi pemeluk agama lain dapat disesuaikan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari sebelum jam pelajaran reguler dimulai, yaitu pukul 06.40 sampai dengan 07.00 wib, dengan kegiatan ini akan terwujud pelajar yang berakhlakul karimah, berimtaq dan menguasai iptek.

Sedangkan, hasil inovasi ASSIPANA yang dilaksanakan oleh Kota Makassar yaitu menghasilkan reaksi cepat dan tepat dari Kecamatan Ujung Tanah dalam menindaklanjuti pengaduan / keluhan dari masyarakat Kecamatan Ujung Tanah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini,

sehingga penelitian dapat selesai dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Deepublish.
- Cahyadi, R. (2016). Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 10(3), 569-586.
- Setiamey, A. A., & Deliani, E. (2019). STRATEGI INOVASI DAN KINERJA INDUSTRI RUMAHAN DALAM MENINGKATKAN MINAT PEMBELIAN KONSUMEN DI PASAR SUKARAMAI MEDAN. *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX*, 2(1), 45-52.
- Dama, J., & Ogi, I. W. (2018). Pengaruh Inovasi Terhadap Dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Bank Mandiri (PERSERO) TBK. *MANADO. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(1).
- Suryani, Tatik, 2008. *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, Graha Ilmu. Yogyakarta
- Manangkoda, F. J., Mantiri, M., & Kumayas, N. (2020). INOVASI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM SISTEM KEPENDUDUKAN (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sangihe). *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(5).
- Sutarno, 2012, *Serba Serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fontana. 2009. *Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Rahman, S. (2019). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN INOVASI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. PLN (PERSERO) AREA MANADO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(1).
- Setijaningrum, E. (2017). *Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practice di Indonesia*.
- Rumengan, G. (2017). *Kontribusi Manajemen Talenta, Inovasi Dan Keunggulan Kompetitif Dalam Meningkatkan Kinerja Bisnis Perusahaan*. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 4(4).

- Kartini, N. M., Mahsyar, A., & Ma'ruf, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Papa Sehat Di SDN 81 Kalukubodo Kabupaten Takalar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(3), 921-934.
- Winata, N. T. (2020). Membangun Gerakan Literasi Sekolah melalui Koper. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 6(2), 584-592.
- Fitrah, M. (2018). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Creswell, J. W. (2011). "Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed". Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Simon & Dedy. 2018, Membangun Inovasi Pemerintah Daerah, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Tahir, M. M., & Harakan, A. (2018). Inovasi Program Kesehatan 24 Jam Dalam Mewujudkan Good Health Care Governance di Kabupaten Bantaeng.
- Robbins stevens, 2009. Teori Organisasi. Jakarta: Erlangga.

INDEKS AFILIASI

| | |
|---|----|
| Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Surabaya, Indonesia | 1 |
| Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Bekasi, Indonesia | 7 |
| Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Indonesia | 15 |
| Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Bekasi, Indonesia | 26 |
| Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Jambi, Indonesia | 26 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Banten, Indonesia | 32 |
| Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Indonesia | 39 |
| Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Bekasi, Indonesia | 48 |
| Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Indonesia | 56 |



Inovbook Publications

 <https://www.inovbook.com>

 contact@inovbook.com